

SMERU

Laporan Penelitian



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA

**Buku I:
Peta Upaya Penguatan
Usaha Mikro/Kecil
di Tingkat Pusat
Tahun 1997-2003**

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-31936336; Faks: 62-21-31930850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Lembaga Penelitian SMERU

Kerjasama Lembaga Penelitian
SMERU dengan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan

Desember 2003

Tim Peneliti

Koordinator:

H a s t u t i

Penasehat:

Sudarno Sumarto
Asep Suryahadi
Sri Kusumastuti Rahayu

Peneliti:

Rizki Filaili
Agus Priambada
Akhmadi
Bambang Soelaksono
Hariyanti Sadaly
Vita Febriani
Wawan Munawar

PRAKATA

Buku ini merupakan salah satu dari tiga buku laporan hasil studi tentang Pemetaan Upaya Penguatan Usaha Mikro yang telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU dalam rangka memenuhi permintaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan guna mengisi kebutuhan informasi tentang keberadaan upaya penguatan usaha mikro dan gambaran umum tentang usaha mikro itu sendiri, khususnya usaha mikro perempuan.

Hasil studi Pemetaan Upaya Penguatan Usaha Mikro disampaikan dalam tiga buku berbeda yaitu:

- Buku I: Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997 - 2003**
- Buku II: Laporan Lapangan Keberadaan Upaya Penguatan Usaha Mikro di Enam Kabupaten/Kota**
- Buku III: Pedoman Pendataan Usaha Mikro di Tingkat Kabupaten/Kota**

Buku I: Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997 – 2003 menyajikan upaya/program/proyek/kegiatan/aktivitas yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga, yaitu lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah (Ornop) lokal dan internasional, perusahaan dan koperasi, perbankan, lembaga donor, dan lembaga lainnya, dalam rangka memperkuat usaha mikro. Karena umumnya lembaga tidak membedakan usaha mikro dengan usaha kecil, atau upaya yang ditujukan untuk usaha mikro biasanya juga dapat diakses oleh usaha kecil dan sebaliknya, maka upaya untuk usaha kecil dimasukkan ke dalam upaya yang dipetakan.

Peta Upaya ini diharapkan antara lain dapat menjadi acuan bagi berbagai lembaga dan masyarakat yang menaruh perhatian pada pengembangan usaha mikro/kecil, dalam rangka melengkapi dan melanjutkan upaya penguatannya. Di samping itu dapat juga dijadikan acuan awal untuk menghindari tumpang tindih upaya dan tumpang tindih sasaran penerima manfaat.

Buku II: Laporan Lapangan Keberadaan Upaya Penguatan Usaha Mikro di Enam Kabupaten/Kota menyajikan hasil penelitian lapangan tentang verifikasi keberadaan upaya dan keberadaan usaha mikro, termasuk usaha mikro perempuan, di tingkat lapangan. Penelitian lapangan dilakukan pada September/Oktober 2003 secara serentak di enam kabupaten/kota, yaitu di Kota Padang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.

Penelitian Lapangan dilakukan dalam rangka melengkapi informasi peta upaya penguatan usaha mikro/kecil di tingkat pusat. Melalui penelitian lapangan diperoleh gambaran umum tentang keberadaan dan pelaksanaan upaya penguatan usaha mikro/kecil tertentu serta dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro di wilayah sampel, dan akses usaha mikro/kecil, termasuk usaha mikro/kecil perempuan, terhadap upaya penguatan.

Data keberadaan usaha mikro, khususnya usaha mikro perempuan, sangat diperlukan. Namun mengingat data tentang keberadaan usaha mikro di Indonesia belum tersedia, maka indikasi keberadaan usaha mikro untuk sementara dapat didekati melalui kegiatan pemetaan ini yang dilengkapi dengan verifikasi upaya di tingkat kabupaten/kota ditelusur sampai ke tingkat usaha mikro. Meskipun demikian, pada dasarnya data keberadaan (jumlah, jenis usaha, dan lain-lain) usaha mikro hanya dapat diperoleh melalui pendataan dalam bentuk sensus.

Pendataan seperti ini tentu saja memerlukan biaya besar, waktu yang lama, serta tenaga dan pemikiran yang mendalam. Dengan berlakunya otonomi daerah, kegiatan pendataan usaha mikro membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Buku III: Pedoman Pendataan Usaha Mikro di Tingkat Kabupaten/Kota merupakan alternatif acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengumpulan data usaha mikro dan peranan perempuan pada usaha tersebut di wilayahnya masing-masing. Melalui buku ini diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mempunyai kesamaan atau standard yang memadai perihal muatan atau substansi dari kondisi usaha mikro. Pedoman ini tidak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengembangan muatan dan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sangat berbeda-beda. Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam memperoleh data yang objektif dan *up to date* sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah dan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai.

Sebagai penutup, kami berharap hasil kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta, perbankan, donor, dan siapa saja yang selama ini menaruh perhatian terhadap upaya penguatan usaha mikro, dan khususnya yang dikelola perempuan, serta bagi peningkatan upaya penguatan usaha mikro di masa datang. Kegiatan ini merupakan satu upaya awal pemetaan dan pendataan yang lebih rinci. Kami membuka diri terhadap saran dan kritik atas hasil penelitian ini, yang dapat disampaikan melalui email/website kami: smeru@smeru.or.id atau www.smeru.or.id

Jakarta, Desember 2003

Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan kepada Ibu Nurlini Kasri, Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Ibu Sulikanti Agusni, Asisten Deputi (Asdep) Urusan Ekonomi Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan bimbingan teknis selama kegiatan ini berlangsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Luli Altruismwati, Ibu Santi Herliana dan Bapak Purwo Adi Prasetyo dari Asdep Urusan Ekonomi Keluarga atas dukungan yang diberikan, juga kepada Bapak Heru Prasetyo Kasidi, Kepala Biro Perencanaan dan Ibu Agustina Erni, atas saran, kritik, dan masukan yang diberikan sejak perencanaan kegiatan dilakukan

Penghargaan yang tinggi juga kami berikan kepada para nara sumber di lembaga yang telah bersedia memberikan informasi tentang upaya penguatan usaha mikro, baik lembaga pemerintah, non-pemerintah, swasta, perbankan, donor, dan lembaga lain di tingkat pusat, pemerintah daerah, serta responden dan informan di lapangan. Tanpa ijin dan kontribusi dari Ibu/Bapak, studi Pemetaan Upaya Penguatan Usaha Mikro ini tidak akan terwujud.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Mitra Kerja di lembaga pelaksana upaya di tingkat pusat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang dengan kesabaran dan keuletannya telah menjembatani para Peneliti dengan para nara sumber. Demikian juga kepada Mitra Kerja lepas yang turut mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga, yakni Yusuf Suharso, Dewi Meiyani, Inca Juanita, M. Hendrik A., Budi Yana Saefullah, dan Sri Mastuti. Kami menyadari bahwa hasil kegiatan ini kurang sempurna apabila tidak ada bantuan pengolahan data dari Luluk Kholisoh Nurona dan Maemunah, bantuan tata letak laporan dari Mona Sintia dan dukungan administrasi dari seluruh Staf Administrasi Lembaga Penelitian SMERU.

Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada para peserta Pemaparan dan Diskusi rencana kegiatan Pemetaan Upaya Penguatan Usaha Mikro pada bulan Juli 2003 dan Pemaparan dan Diskusi Hasil pada bulan Nopember 2003 di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, atas komentar konstruktifnya sehingga hasil studi Pemetaan Upaya Penguatan Usaha Mikro menjadi lebih baik.

Jakarta, Desember 2003

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
UCAPAN TERIMAKASIH	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Metode Penelitian	3
1.4 Ruang Lingkup Studi/Pemetaan	6
II. DEFINISI	7
2.1 Upaya	7
2.2 Usaha Mikro dan Usaha Kecil	7
III. PETA UPAYA PENGUATAN USAHA MIKRO/KECIL	10

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan kaum perempuan dalam meningkatkan *bargaining position* perempuan dan keluarga.¹

Di Indonesia, usaha mikro dan usaha kecil telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.² Sebagai gambaran, tenaga kerja yang diserap industri rumah tangga (yang merupakan bagian dari usaha mikro sektor perindustrian) dan industri kecil pada tahun 2000, mencapai 65,38% dari tenaga kerja yang diserap sektor perindustrian nasional. Pada tahun yang sama sumbangan usaha kecil terhadap total PDB mencapai 39,93% (BPS, 2001).

Usaha mikro, bersama dengan usaha kecil, juga mampu bertahan menghadapi guncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Indikatornya antara lain, serapan tenaga kerja antara kurun waktu sebelum krisis dan ketika krisis berlangsung tidak banyak berubah, dan pengaruh negatif dari krisis terhadap pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil adalah lebih rendah dibanding pada usaha menengah dan besar. Lebih jauh lagi, usaha mikro dan usaha kecil telah berperan sebagai *buffer* dan katup pengaman (*safety valve*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi para pekerja sektor formal yang terkena dampak krisis³.

Kegiatan usaha mikro dan usaha kecil tidak terlepas dari peran kaum perempuan. Usaha mikro banyak diminati oleh perempuan dengan pertimbangan bahwa usaha ini dapat menopang kehidupan rumah tangga dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan diri (Sumampouw, 2000). Meskipun sulit untuk memisahkan peran perempuan dan laki-laki dalam usaha mikro, dan belum ada angka pasti tingkat keterlibatan perempuan dalam usaha mikro, diperkirakan persentasenya cukup besar dan sebanding dengan porsi perempuan dalam usaha kecil, yaitu sekitar 40%.⁴

Kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan bertambahnya pendapatan

¹ Dapat dilihat antara lain pada *Microenterprise Development: Not by Credit Alone*, ADB, dalam: <http://www.adb.org/Documents/Books/Microenterprise/microenterprise.pdf>; *Empowering Women and Coping with Financial Crisis: An Exploratory Study of Zimbabwean Microenterpreneurs*, dalam: [http://www.usaidmicro.org/pdfs/aims/Empowering Women \(zimbabwe\).pdf](http://www.usaidmicro.org/pdfs/aims/Empowering_Women_(zimbabwe).pdf).

² Usaha mikro dan usaha kecil sulit untuk dipisahkan karena dalam beberapa hal mempunyai ciri dan sifat yang hampir sama, sehingga banyak lembaga dan banyak studi masih meletakkan usaha mikro dalam satu kelompok dengan usaha kecil.

³ Lihat diantaranya dalam *Media Indonesia*, 26 Mei 2003, *Jakarta Post*, 3 Juni 2003, Laporan ILO "Dimensi Gender dalam Kiris Ekonomi", bekerja sama dengan Lembaga Demografi, UI, Jakarta 2002

⁴ Informasi dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

perempuan atau akses perempuan kepada sumber-sumber daya ekonomi lewat usaha ini, maka kemampuan dan kesempatan mereka bernegosiasi dalam rumah tanggapun meningkat. Posisi tawar mereka berubah dan pendapat mereka mulai diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga.⁵

Partisipasi perempuan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Upaya pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh perempuan ini menjadi penting, karena perempuan mempunyai kendala-kendala tertentu yang berkaitan dengan "triple burden of women", dimana mereka menjalankan fungsi reproduksi, produksi, dan fungsi sosial di masyarakat. Walaupun demikian, kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada masih sangat terbatas. Sebagian besar perempuan masih berkuprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan ketrampilan yang spesifik. Pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, disamping kondisi kerja yang memprihatinkan serta pendapatan yang rendah. Beberapa studi mengindikasikan upah perempuan lebih rendah dari laki-laki.⁶ Salah satu studi memberikan gambaran upah perempuan sekitar 70% dari upah laki-laki. Dilihat dari akses terhadap kredit, pengusaha perempuan diperkirakan mempunyai akses yang lebih kecil, 11% dibandingkan laki-laki, 14%.⁷

Mengingat porsi perempuan dalam usaha mikro cukup menonjol, maka peningkatan ekonomi perempuan, antara lain dilakukan melalui upaya/program/proyek/ kegiatan/aktivitas penguatan usaha mikro. Upaya ini diketahui telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga swasta, lembaga perbankan, lembaga donor, maupun lembaga atau individu lain. Upaya tersebut dilakukan di tingkat nasional ataupun tingkat regional. Namun demikian hingga kini sulit memastikan seberapa besar upaya yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi perempuan. Selain itu, belum diketahui secara pasti apakah upaya-upaya tersebut dilaksanakan tumpang tindih yang pada akhirnya justru mempengaruhi efisiensi dan efektivitas upaya-upaya tersebut. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sedini mungkin peta upaya-upaya dimaksud.

1.2 Tujuan

1. Memetakan upaya penguatan usaha mikro (UPUM) dalam rangka peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai lembaga/individu pada kurun waktu 1997 - 2003;
2. Memberi acuan awal kepada berbagai lembaga dan masyarakat yang menaruh perhatian pada pengembangan usaha mikro/kecil, dalam rangka melengkapi dan melanjutkan upaya penguatan serta menghindari tumpang tindih upaya dan tumpang tindih sasaran penerima manfaat.

⁵ ADB Report, *loc cit.*

⁶ Diantaranya adalah studi tentang "Industri Keramik di Plered" oleh Henry Sandee yang menyatakan bahwa pada industri keramik di Plered lebih banyak mempekerjakan perempuan karena upah mereka lebih rendah 25% dari pada laki-laki. Brahmantio Isdijoso dan Sri Sulandjari: "SME clusters in Indonesia: An Analysis of Growth Dynamics and Employment Conditions", kerjasama dengan ILO, Jakarta 2002 dan studi tentang "Dimensi Gender dalam Krisis Ekonomi" yang dilakukan atas kerjasama ILO Manila dengan Lembaga Demografi, FEUI 2000. Meskipun demikian, hasil penelitian dari SMERU pada "Aspek KetenagakerSemasa Krisis Ekonomi", dalam SMERU Newsletter No.7/Agustus 1999, hal.5 dan pada "Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung", 2001, menemukan bahwa penetapan upah pekerja tidak didasarkan pada perbedaan jender, melainkan pada jenis pekerjaan yang dilakukan, masa kerja, dan tingkat jabatan pekerja, yang berarti bahwa upah perempuan tidak selalu lebih rendah dari laki-laki.

⁷ Informasi dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

1.3 Metode Penelitian

Studi pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan metoda kualitatif, yaitu: menggali informasi dan mencatat upaya penguatan usaha mikro dan upaya penguatan usaha kecil yang dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro, di tingkat pusat. Informasi yang menjadi acuan utama ini digali dari lembaga dan individu yang mempunyai peran yang signifikan dalam upaya penguatan usaha mikro, yaitu meliputi:

- 18 lembaga pemerintah;⁸;
- 20 lembaga non-pemerintah;⁹
- 13 perusahaan swasta nasional maupun asing, BUMN, dan koperasi;¹⁰
- 7 lembaga perbankan pemerintah maupun swasta;
- 8 lembaga donor; dan
- 6 lembaga atau individu lainnya.

Penggalan informasi dilakukan dengan menggunakan daftar isian yang telah dipersiapkan. Informasi yang digali merupakan data setiap upaya penguatan usaha mikro yang dilaksanakan sejak tahun 1997. Daftar isian tersebut antara lain memuat informasi tentang: (1) pelaksana; (2) nama upaya; (3) jenis upaya; (4) wilayah; (5) sasaran; (6) waktu; (7) masalah; (8) status saat ini; dan (9) potensi di masa mendatang.

Penggalan informasi dan pengolahan upaya penguatan usaha mikro di tingkat pemerintah pusat dilakukan pada Juni – Nopember 2003. Guna mempercepat kegiatan pemetaan dan mengoptimalkan hasil, Tim Peneliti bekerjasama dengan Mitra Kerja di setiap lembaga yang memiliki upaya dan Mitra Kerja lepas untuk mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.

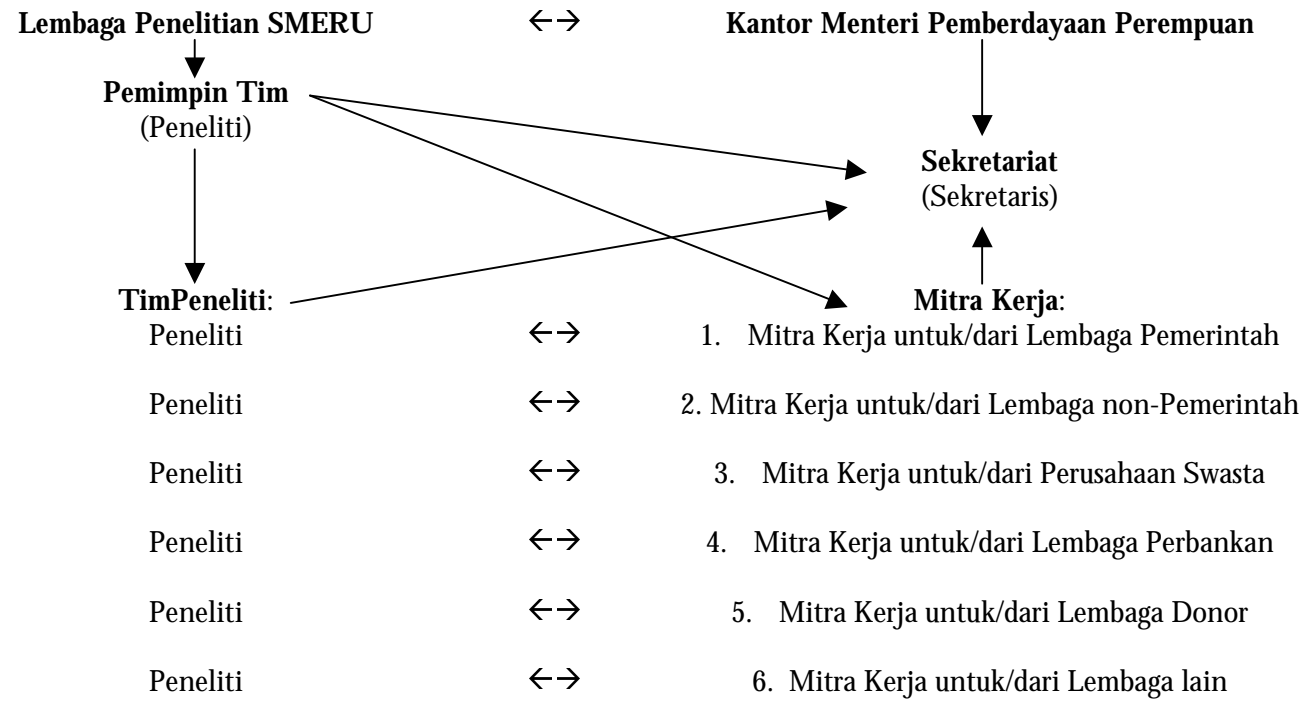
⁸ Pada awalnya Peneliti melakukan pemetaan di 18 lembaga pemerintah/departemen/kementerian, tetapi hasil temuan lapangan mengindikasikan 6 lembaga diantaranya (cetak miring) tidak memiliki upaya:

1. <i>Bappenas</i>	6. <i>Dep.Keuangan</i>	11. <i>K. Kom&Informasi</i>	15. <i>K. Koperasi & UKM</i>
2. <i>K.Koord Kesra</i>	7. <i>Depdiknas</i>	12. <i>Dep.Pertanian</i>	16. <i>Dept. Kelautan &Perikanan</i>
3. <i>Depdagri</i>	8. <i>Dep.Kesehatan</i>	13. <i>BKKBN</i>	17. <i>BPPT</i>
4. <i>Depsos</i>	9. <i>Dep.Kimprasw</i>	14. <i>Deperindag</i>	18. <i>BPS</i>
5. <i>K.BUMN</i>	10. <i>Depnakertrans</i>		

⁹ Melalui jaringan lembaga non-pemerintah.

¹⁰ Setelah dilakukan penelitian, ternyata 3 lembaga tidak memiliki upaya.

Tabel 1. Mekanisme Kerja Pemetaan Upaya Penguatan Ekonomi Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan



1.4 Ruang Lingkup Studi/Pemetaan

Ruang lingkup studi ini tidak dibatasi pada pemetaan upaya penguatan usaha mikro yang dilakukan oleh perempuan atau mempunyai mayoritas tenaga kerja perempuan. Hal tersebut karena berdasarkan pengalaman, sulit membedakan peran perempuan dan laki-laki dalam usaha mikro. Umumnya usaha mikro dilakukan secara bersama-sama oleh anggota keluarga (suami istri). Di samping itu, pemetaan ini tidak dibatasi pada upaya yang ditujukan pada usaha mikro saja tetapi juga termasuk upaya untuk usaha kecil. Hal ini karena masih terdapat pengertian yang rancu antara usaha mikro dan usaha kecil, umumnya lembaga tidak membedakan usaha mikro dengan usaha kecil, dan kadangkala suatu upaya yang ditujukan untuk usaha mikro pada kenyataannya dimanfaatkan oleh usaha kecil, dan sebaliknya. Karena latar belakang tersebut maka studi ini mempunyai ruang lingkup:

1. Memetakan upaya/program/kegiatan penguatan yang dinyatakan ditujukan kepada usaha mikro dan yang ditujukan kepada usaha kecil tetapi dapat diakses oleh usaha mikro yang dilakukan oleh lembaga-lembaga/individu di tingkat nasional, baik lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga swasta, lembaga perbankan, lembaga donor, maupun lembaga atau individu lainnya.
2. Rentang waktu upaya yang dipetakan adalah yang dilaksanakan sejak tahun 1997 hingga studi ini dilakukan, tahun 2003. Upaya yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya tetapi pada periode 1997 – 2003 dinyatakan masih berlangsung di tingkat masyarakat (misalnya upaya yang dilakukan melalui perguliran dana) tetap akan menjadi jenis upaya yang dipetakan. Hasil pemetaan akan mencakup pemetaan: (1) jenis; (2) wilayah; (3) sasaran; (4) masalah; dan (5) potensi dari setiap upaya penguatan usaha mikro.

II. DEFINISI

2.1 Upaya

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan lainnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI 1999).

Upaya penguatan usaha mikro (UPUM) adalah usaha/program/proyek/kegiatan/aktivitas untuk menguatkan usaha mikro yang dapat diwujudkan dalam berbagai jenis kegiatan, antara lain:

- **Permodalan, melalui pemberian kredit**
- **Pelatihan**
- **Pendampingan dan fasilitator**
- **Bantuan teknis dan konsultasi**
- **Penyediaan informasi**
- **Penelitian**

2.2 Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Terdapat beberapa pengertian usaha mikro yang diberikan oleh beberapa lembaga, antara lain:

- **BPS**
Industri kerajinan rumah tangga yaitu perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang, sedangkan industri kecil mempekerjakan 5 -19 orang.
- **Departemen Perindustrian dan Perdagangan:**
Industri-Dagang Mikro adalah industri-perdagangan yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang.
- **Departemen Keuangan:**
Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 per tahun, sedangkan usaha kecil memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1 milyar per tahun.¹¹
- **Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:**
Usaha mikro dan usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp200 juta dan atau mempunyai omzet/nilai output atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak-banyaknya Rp1 milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri.
- **Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional**
Pengusaha mikro adalah pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimum Rp25 juta.
- **ADB:**
Usaha mikro adalah usaha-usaha non-pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga.¹²

¹¹ SK Menteri Keuangan RI No.40/KMK.06/2003.

¹² ADB Report, op cit.

- **USAID:**
Usaha mikro adalah kegiatan bisnis yang mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai termasuk anggota keluarga yang tidak dibayar. Kadangkala hanya melibatkan 1 orang, yaitu pemilik yang sekaligus menjadi pekerja. Kepemilikan aset dan pendapatannya terbatas.¹³
- **Bank Dunia:**
Usaha mikro merupakan usaha gabungan (*partnership*) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (*self-employed*). Usaha mikro sering merupakan usaha tingkat survival (usaha untuk mempertahankan hidup – *survival level activities*), yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil.¹⁴
- **ILO:**
Usaha mikro di negara berkembang mempunyai karakteristik, antara lain usaha dengan maksimal 10 orang pekerja, berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, aset minim, kemampuan manajerial rendah, dan tidak membayar pajak.
- **Farbman dan Lessik (1989):**
Usaha mikro mempunyai karakteristik, antara lain mempekerjakan paling banyak 10 orang pekerja, merupakan usaha keluarga dan menggunakan tenaga kerja keluarga, lokasi kerja biasanya di rumah, menggunakan teknologi tradisional, dan berorientasi pasar lokal.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dalam melakukan Pemetaan UPUM ini, pengertian Usaha Mikro yang digunakan adalah sebagai berikut:

Usaha non pertanian (termasuk peternakan dan perikanan) yang mempekerjakan paling banyak 10 pekerja, termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga, memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100 juta per tahun, dan mempunyai aset di luar tanah dan bangunan paling banyak Rp25 juta.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi penggunaan definisi tersebut dalam studi ini, yaitu:

- Sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No.40/KMK.06/2003 yang menyebutkan bahwa usaha mikro memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 per tahun;
 - Mengacu pada definisi internasional tentang usaha mikro yang umumnya menyatakan bahwa pekerjaannya maksimal 10 orang; dan
 - Mengacu pada definisi Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan diperkuat dengan pengamatan lapangan Lembaga Penelitian SMERU: aset di luar tanah dan bangunan, maksimal Rp25 juta.

¹³ <http://www.usaidmicro.org/About>

¹⁴ Riley, Thyra A and Steel, William F.1998. *Development of Micro, Small Enterprise and Rural Finance in Sub Saharan Africa: The World Bank's Strategy*. World Bank Newsletter, March 31st., West Bank and Gaza Microenterprise Project <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,contentMDK:20026975~menuPK:34471~pagePK:40651~piPK:40653~theSitePK:4607.00.html>; *Self-Employed for The Unemployed, Experiences in OECD and Transitional Economics*, Sandra Wilson and Avril V Adams (1994), World Bank Discussion Paper no 263, http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/10/19/000009265_3970311124051/Rendered/PDF/multi_page.pdf

III. PETA UPAYA PENGUATAN USAHA MIKRO

3.1 Daftar Lembaga yang Upayanya Dipetakan

I. Kelompok Instansi Pemerintah

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
3. Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
4. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)
5. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)
6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag)
7. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)
8. Departemen Pertanian (Deptan)
9. Departemen Sosial (Depsos)
10. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
11. Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
12. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP)
13. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

II. Kelompok Organisasi Non-Pemerintah

A. Ornop Lokal

1. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)
2. Bina Desa
3. Bina Masyarakat Sejahtera (BMS)
4. Bina Sumberdaya Mitra (BISMI)
5. Bina Swadaya
6. Forum Gerakan Pengembangan Koperasi Indonesia (Formasi Indonesia)
7. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
8. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sosial Ekonomi (LPPSE)
9. Pemulihan keberdayaan Masyarakat (PKM)
10. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)
11. Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)
12. Yayasan Dharma Bakti Parasahabat (YDBP)
13. Yayasan Mitra Usaha (YMU)
14. Yayasan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia (Yayasan Pekerti)
15. Yayasan Permata Hati
16. YPM Kesuma Multi Guna

B. Ornop Internasional

1. Care International Indonesia
2. Catholic Relief Services (CRS) Indonesia
3. Christian Children Fund Indonesia (CCF)
4. Mercy Corps

III. Kelompok Perusahaan

1. PT Astra International Tbk
2. PT. Bahana Artha Ventura
3. Koperasi Bina Masyarakat Mandiri
4. PT Caltex Pacific Indonesia (CPI)
5. PT ISM Bogasari Flour Mills
6. Pertamina
7. PT Pos Indonesia (Persero)
8. PT Pupuk Kaltim Tbk
9. PT Sucofindo
10. PT Unilever Indonesia

IV. Kelompok Lembaga Perbankan

1. Bank Indonesia
2. Bank Bukopin
3. Bank Central Asia (BCA)
4. Bank Mandiri
5. Bank Negara Indonesia (BNI)
6. Bank Niaga
7. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

V. Kelompok Lembaga Donor

1. Asian Development Bank (ADB)
2. The Asia Foundation
3. Australian Agency for International Development (AusAID)
4. Bank Dunia
5. The European Union
6. International Labour Organization (ILO)
7. Swisscontact
8. United State Agency for International Development (USAID)

VI. Kelompok Lembaga Lain

1. Gema PKM Indonesia
2. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
3. Koperasi Annisa Muslimat NU
4. Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)
5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
6. PT Ukabima

PETA UPAYA PENGUATAN USAHA MIKRO/KECIL

**Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997 - 2003
Kelompok Instansi Pemerintah**

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)									
1.1	Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra)	- Pemberian pinjaman modal secara bertahap. - Penyuluhan dan bimbingan kepada kelompok.	BKKBN (executing program); BNI dan PT Pos (penyalur)	Tahun 1996 – Januari 2003.	Seluruh Indonesia (seluruh desa non-IDT)	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	Program sudah selesai, tapi pembayaran pinjaman dan tunggakan masih berjalan.	- Tidak tersedia dana dampingan untuk pembinaan. - SDM kurang profesional, terutama tenaga teknis lapangan yang dirangkap PLKB. - Mata rantai yang panjang menjadi kendala dalam pelaksanaan teknis (pengucuran dan	Berpotensi untuk melihat kemampuan dan menggugah minat kaum ibu untuk berusaha sehingga menjadi kelompok usaha yang mandiri
1.2	Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU)	- Pemberian kredit - Pembinaan	BKKBN, Kementerian Kop & UKM, BNI, BRI, Depperindag, , Deptan (Diklat P4K), Depdagri (PMD), PKK	Tahun 1997– Juni 2002	Seluruh Indonesia	- Kelompok UPPKS/kelompok lain yang bermitra dengan pengusaha UKM atau koperasi - Pengusaha UKM atau koperasi yang bermitra dengan kelompok UPPKS/kelompok lain	Sudah selesai	- Mitra memperoleh kredit hanya pada dua tahun pertama - Perebutan kepentingan dengan pemda karena alasan ketidakfokusan program KPKU dengan pola mitra, sehingga dibentuk pola KPTTG (Kredit Pengembangan Teknologi Tepat Guna) tahun 1997	Mendorong anggota UPPKS mengaktualisasikan diri lebih lanjut dalam kegiatan usaha mikro melalui program kemitraan dengan modal yang lebih besar daripada modal Kukesra
1.3	Kukesra Mandiri	- Pemberian modal - Pembinaan - Pemantauan - Pendampingan - Pelaporan - Evaluasi	BKKBN, BNI, LKM/LPSM (YDBP, Koperasi BMM, Perbarindo, Yayasan Siti Khadijah, Yayasan Mitra Usaha, BPR Swadharma)	Tahun 2001 – Januari 2003.	8 provinsi	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang tergabung dalam UPPKS	Program sudah selesai, tapi pembayaran pinjaman dan tunggakan masih berjalan.	- Tunggakan yang masih besar hingga saat ini - Tidak fokusnya tenaga teknis dalam membina anggota dan kelompok UPPKS	Mendorong anggota UPPKS menjadi usahawan yang mandiri dan profesional serta siap mendapatkan kredit komersial dari perbankan sekaligus menjadi teladan bagi anggota yang lain.
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)									

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1	Proyek Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Iptek di Daerah (PKPID), Program Diseminasi Teknologi	Diseminasi teknologi	BPPT	Tahun 1998 sekarang	Seluruh Indonesia	Usaha kecil (termasuk mikro), menengah dan koperasi (UKMK)	Masih berjalan	Lihat masing-masing kegiatan	Lihat masing-masing kegiatan
2.1.1	Budidaya Udang di Lahan Berpasir	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Budidaya Pertanian	Tahun 1998-1999	Jawa Timur (Kab. Lamongan)	Petani tambak udang	Selesai		
2.1.2	Penerapan Teknologi Budidaya Rumput Laut	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. KPPT2	Tahun 1998-1999	NTB (Kota Mataram)	Nelayan	Selesai		
2.1.3	Udang Galah bagi Petani Sawah	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. KPPTPW	Tahun 1998-1999	D.I Yogyakarta (Kab. Kulonprogo)	Petani sawah	Selesai		
2.1.4	Tempe Skala Industri Kecil dan Rumah Tangga	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Bio Industri	Tahun 1998-1999	D.I Yogyakarta (Kab. Gunung Kidul)	Industri kecil dan rumah tangga	Selesai		
2.1.5	Teknologi Pembuatan Briket Batubara untuk Usaha Kecil/Koperasi	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. KKE-UPT LSDE	Tahun 1998-1999	Jawa Tengah (Semarang)	Usaha kecil/koperasi	Selesai		
2.1.6	Pembuatan Alat Pengering Cabe Skala Kecil	Pembuatan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1998-1999	Jawa Tengah (Kab. Brebes)	Petani cabai	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.7	Pembuatan Peralatan Pengolah Gambir	Pembuatan peralatan	BPPT, Dit. AgroIndustri	Tahun 1998-1999	Riau (Koto Kari dan Taluk Kuatan)	Petani gambir	Selesai		
2.1.8	Penerapan Teknologi Besi Cor Nodular	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1998-1999	Jawa Tengah (Kab. Klaten)	Usaha pengecoran logam	Selesai		
2.1.9	Packaging Pasca Panen Sayur Mayur	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1998-1999	Jawa Barat (Kab. Bandung)	Petani sayur mayur	Selesai		
2.1.10	Pemanfaatan Bahan Galian untuk Penjernih Minyak dan Bahan Kerajinan	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Agro Industri	Tahun 1998-1999	D.I. Yogyakarta (Kab. Gunung Kidul)	Industri kerajinan	Selesai		
2.1.11	Paket Informasi Teknologi Pengecoran Logam	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. KPPUD	Tahun 1998-1999	Jawa Barat (Kab. Sukabumi), Jawa Tengah (Kab./Kota Tegal)	Usaha pengecoran logam	Selesai		
2.1.12	Penerapan Teknologi Aklimatisasi terhadap Benur untuk Menunjang Budidaya Udang Windu pada Sawah Tambak	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah	Tahun 1999-2000	Jawa Timur (Lamongan)	Petani tambak udang	Sudah dilaksanakan dan diteruskan oleh para petani tambak udang, Koperasi Tamyamsang, dan Pemda Tk.II Lamongan.	- Waktu kegiatan - Kesiapan petugas lapangan - Ketersediaan bahan	- Kabupaten Lamongan memiliki sawah tambak yang luas. - Harga udang terus membaik.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.13	Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Efisiensi Penanganan Plastik Bekas di Bekasi	- Disain dan pembuatan peralatan pengolah plastik bekas - Pelatihan tentang teknologi dan pengembangan bisnis	BPPT, Dit. Kebijakan dan Penerapan Teknologi Unggulan Daerah	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Bekasi)	Usaha pengolahan plastik	Sudah dilaksanakan dan saat ini dikelola oleh Koperasi Hijau.	-Sulit menentukan bengkel pembuat yang baik, dengan biaya yang sesuai. -Proses pencarian bahan, pembuatan komponen dan perakitan alat membutuhkan waktu cukup lama. -Pendekatan terhadap penduduk sekitar lokasi pengolahan dan pengurusan perizinan.	Bekasi merupakan tempat tinggal sebagian pekerja Jakarta, sehingga menghasilkan sampah plastik yang cukup banyak.
2.1.14	Pemanfaatan dan Pemasyarakatan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Rumput Laut di Kabupaten Serang	- Pembinaan dan pendampingan - Diseminasi teknologi budidaya rumput laut, ikan bandeng, dan pengolahan agar-agar	BPPT, Dit. Kebijakan dan Pemasyarakatan Teknologi	Tahun 1999-2000	Banten (Kab.Serang)	Petani/nelayan	Selesai	Sebagian besar tambak dimiliki penduduk Jakarta sehingga agak sulit menentukan tambak yang dimiliki petani berpenghasilan rendah dan memerlukan bantuan	- Pemda Kab.Serang menjadikan rumput laut sebagai produk ekspor unggulan - Kab. Serang terkenal dengan sate bandengnya. Pasokan setempat sering tidak mencukupi dan harus didatangkan dari luar Serang
2.1.15	Penerapan Teknologi Pertanian Terpadu (Ayam, Sapi, Kedelai, Jagung Hibrida) untuk Meningkatkan Usaha Tani Desa Pesantren di Jabotabek	- Diseminasi teknologi - Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Budidaya Pertanian	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kab. Sukabumi-Kec.Baros)	Pesantren, masyarakat, dan Pemda	Sudah dilaksanakan dan dikelola oleh Kelompok Pondok Pesantren Imaratul Masajid, Pesantren Hayatan Thayyibah	- Keterbatasan waktu tenaga kerja setempat memperlambat proses penanaman - Lokasi kurang air pada musim kemarau dan sistem pengairan kurang menunjang kegiatan sehingga harus menunggu musim hujan. - Keterbatasan dana sehingga model "pertanian terpadu" tidak dapat diterapkan pada tempat/pondok pesantren lain.	Mengali semua potensi yang ada untuk dipadukan secara optimal dengan mengacu pada peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, serta sesuai dengan situasi pasar dan kondisi lingkungan setempat.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.16	Upaya Peningkatan Produktivitas Budidaya Ikan Kerapu Ekspor dalam Keramba Jaring Apung	Diseminasi teknologi	BPPT	Tahun 1999-2000	Kepulauan Bangka-Belitung (Kab. Belitung)	Nelayan	Selesai		
2.1.17	Paket Peralatan Penyamak Kulit dan Bahan Penyamak kulit Ramah Lingkungan untuk Industri Kecil	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Bioindustri	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Garut); Jawa Timur (Ponorogo).	Pengrajin penyamakan kulit industri kecil	Sudah selesai dan diteruskan oleh pengrajin penyamakan kulit di Sukaregang, Garut, Jawa Barat.	- Beberapa peralatan laboratorium mengalami kerusakan. - Terjadi kerusakan perangkat peralatan penyamakan kulit di UPT-Kulit Sukaregang Garut, pada tahap pemasangan.	Pengembangan teknologi penyamakan kulit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM pengrajin kulit dan membuka kesempatan kerja baru.
2.1.18	Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Produksi Susu Steril di Pangalengan, Jawa Barat	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Bioindustri	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kab. Bandung-Pangalengan)	Peternak	Sudah selesai dan diteruskan oleh Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS)	- Dalam tahap percobaan terjadi masalah pada alat pasteurisasi sehingga dilakukan perbaikan atau modifikasi peralatan. - Dana untuk membuat susu steril tidak mencukupi sehingga pengolahan ini hanya sampai menghasilkan susu pasteurisasi	- Meningkatkan kemampuan produsen susu/peternak dalam mengembangkan usaha, mendapatkan penghasilan tambahan dan membuka kesempatan kerja baru. - Membantu penguasaan teknologi produksi susu steril - Peralatan menggunakan teknologi sederhana dan tidak membutuhkan banyak tempat.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.19	Penerapan Teknologi Pasca Panen Rempah-Rempah	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 1999-2000	D.I. Yogyakarta	Kelompok tani wanita di D.I. Yogyakarta	Sudah selesai dan diteruskan oleh pemda setempat saat ini sudah sampai ke kelompok tani.	- Alat yang tersedia harus dimodifikasi - Waktu pelaksanaan kegiatan sangat singkat terutama akibat tertundanya pencairan dana. - Tertundanya pencairan dana menyebabkan kegiatan tidak segera dilaksanakan	Industri pengolahan di Yogyakarta mempunyai potensi untuk berkembang karena Yogyakarta merupakan daerah pemasaran /penampung dan distribusi produk-produk pertanian dari berbagai daerah disekitarnya
2.1.20	Penerapan Teknologi Ekstraksi Minyak Jarak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab.Boyolali)	Pemda Tk. II Kab. Boyolali, BIPP dan koperasi/pengolah biji jarak	Sudah selesai dan kini dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Tiga Jaya.	Belum ada hambatan teknis. Namun dalam pengembangannya diperlukan alih teknologi dan pelatihan untuk petani jarak atau koperasi pengolah biji jarak agar dapat mandiri.	- Potensi tanaman jarak di Kab. Boyolali dan sekitarnya cukup besar. - Indonesia mengeksport biji jarak kering dan masih mengimpor minyak jarak untuk memenuhi kebutuhan lokal.
2.1.21	Penerapan Teknologi Pasca Panen Teripang di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 1999-2000	Sulawesi Selatan (Kab. Selayar)	Nelayan dan pengrajin	Sudah selesai dan selanjutnya dikelola oleh Koperasi Tani Maju Mandiri	- Keterbatasan dalam menerima informasi teknis operasional kegiatan - Kondisi infrastruktur dan geografi tidak mendukung sehingga transportasi menjadi kendala utama - Keadaan faktual di lokasi tidak selalu sesuai dengan rencana	Memiliki SDA perikanan (teripang) potensial: 12 desa - 5 kecamatan, lahan perairan pantai 64 hektar, 1.350 KK nelayan teripang tradisional, dan lembaga profesi (a.l. koperasi) yang siap dijadikan mitra
2.1.22	Penerapan Teknologi Proses Minyak Atsiri (Nilam) untuk Usaha Kecil di Muara Enim	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 1999-2000	Sumatera Selatan (Kab.Muara Enim)	Petani dan masyarkat	Sudah selesai dan diteruskan oleh Koperasi "Selawi Jaya"	Tidak ada	Tersedia lahan luas yang subur sepanjang pegunungan Bukit Barisan, dan belum dibudidayakan secara intensif

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.23	Penerapan Teknologi untuk Pengolahan Kemiri di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 1999-2000	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)	Petani, masyarakat setempat, dan CV Matahari Terbit	Sudah selesai dan kini dikelola oleh "CV Matahari Terbit"	Pada awal pekerjaan konstruksi muncul beberapa masalah, tetapi pekerjaan secara keseluruhan tidak terhambat.	Tersedianya areal kemiri seluas 2.735 Ha dengan jumlah produksi sebanyak 534 ton/tahun
2.1.24	Penerapan Teknologi Pengolahan Mete Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 1999-2000	Sulawesi Tenggara (Kab./Kota Kendari)	Petani, masyarakat dan koperasi	Sudah selesai dan saat ini diteruskan oleh koperasi setempat	- Lambatnya pembangunan sarana serta pengadaan barang karena terbatasnya peralatan teknik di lokasi dan ketrampilan tenaga kerja. - Dana perjalanan terbatas sehingga alih teknologi serta bimbingan teknik pengolahan mete sulit dilaksanakan.	NTB, NTT, Sulsel dan Sultra sangat potensial untuk pengembangan kacang mete tapi pemanfaatannya masih rendah (mete diekspor dalam bentuk gelondongan) karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi pengolahan,
2.1.25	Penerapan Teknologi Proses Fermentasi dan Pengeringan Kakao Rakyat di Kabupaten Pinrang, Sulsel	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri BPPT.	Tahun 1999-2000	Sulawesi Selatan (Kab. Pinrang)	Petani dan masyarakat	Sudah selesai saat ini dikelola oleh Koperasi Sumber Hasil	Belum ada masalah atau hambatan yang berarti dan masih berjalan sesuai jadwal.	Terdapat perkebunan kakao rakyat seluas 19.289 ha dengan produktivitas 1.511 kg biji kering/ha/tahun.
2.1.26	Penerapan Teknologi Biofertilizer dan Pengeringan Hijauan Makanan Ternak untuk Peningkatan Produktivitas Pakan Ternak Sapi	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Pusat Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi Industri dan Pertanian	Tahun 1999-2000	Bali (Kab. Karang Asem)	Petani dan masyarakat	Sudah selesai dan diteruskan oleh Dinas Peternakan setempat	- Beberapa bahan (seperti kompos) harus dikirim dari Jakarta - Daerah setempat mempunyai angin lembah yang sangat kuat sehingga pergantian atap green house dilakukan 2 kali	Populasi ternak sapi di Kab. Karangasem, Bali menunjukkan peningkatan.
2.1.27	Pelatihan Kerja Santri tentang Sistem Tambak Ikan, Ayam dan Pisang	Pelatihan	BPPT	Tahun 1999-2000	DKI Jakarta; Jawa Barat (Bogor, Bekasi); Banten (Tangerang)	Guru-guru pesantren	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.28	Pelatihan Manajemen Produksi dan Teknologi Fermentasi di Pondok Pesantren dan Industri Kecil	Pelatihan	BPPT	Tahun 1999-2000	Madura & Jawa Timur	Pondok pesantren dan masyarakat peternak/petani	Selesai		
2.1.29	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Inditik (Integrasi Penanaman Padi dengan Pemeliharaan Itik)	- Budidaya pertanian - Pengembangbiakan itik	BPPT	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab. Purworejo)	Petani dan peternak itik	Selesai		
2.1.30	Penerapan Teknologi Budidaya Kepiting Bakau di Pertambakan dalam Upaya Pemberdayaan Petani Tambak	Diseminasi teknologi	BPPT	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab. Demak)	Petani tambak	Selesai		
2.1.31	Pembuatan dan Alih Teknologi Lemari Pengereng Serba Guna dan Alat Pengupas Singkong	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Transportasi	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kab./Kota Sukabumi); D.I. Yogyakarta (Kab. Gunung Kidul)	Masyarakat pengolah ikan dan Pemda	Sudah selesai dilaksanakan dan diteruskan oleh Pemda dan kelompok pengolah ikan setempat.	Perbedaan sumber energi yang direncanakan (listrik) dengan yang biasa digunakan sasaran (bahan bakar cair) mengharuskan perubahan desain dan mempengaruhi bahan dan peralatan untuk membuat lemari	Daerah Pelabuhan Ratu terkenal dengan komoditas perikanan dan mensuplai ke beberapa daerah, seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan bahkan sudah banyak yang diekspor.
2.1.32	Penerapan Teknologi untuk Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis SDA di Kalimantan Timur	- Pelatihan - Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam (TISDA)	Tahun 1999-2000	Kalimantan Timur (Kota Balikpapan)	Masyarakat dan Pemda	Sudah selesai kini dilanjutkan oleh pemda setempat	Masalah mobilisasi dan demobilisasi peralatan untuk demo dan uji kaji di lapangan	Pemerintah Kota Balikpapan memiliki potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Potensi tersebut dapat segera dikembangkan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.33	Pemberdayaan IKM Karet - Majalengka Jawa Barat untuk Memproduksi Barang Teknik Karet Substitusi Impor	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kab. Majalengka)	Koperasi pengrajin bola	Sudah selesai dan saat ini dikelola oleh koperasi pengrajin bola	Tidak ada.	Kabupaten Majalengka memiliki berbagai industri yang menjadi sumber PAD, a.l. pembuatan bola yang berkembang sejak tahun 1990
2.1.34	Pembuatan Mesin Pengolah Bambu untuk Usaha Kerajinan Rakyat di Sukabumi, Jawa Barat	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kab. Sukabumi)	Pengrajin dan Pemda	Sudah selesai dilaksanakan dan kini dilanjutkan oleh kelompok pengrajin bambu di Desa Datarnangka.	Rencana membuat mesin pengolah bambu serba guna tidak terlaksana karena konstruksinya mengalami kendala dan pengoperasiannya sulit, sehingga mesin pengolah bambu dibuat secara terpisah.	Sukabumi kaya akan potensi wisata dan hutan bambu sehingga mesin pengolah bambu berpotensi mendukung kerajinan bambu rakyat, menyerap hasil hutan bambu dan mendukung potensi wisata melalui produksi barang souvenir.
2.1.35	Pengembangan Teknologi Proses di Sentra Industri Kecil Genteng Klaten	Diseminasi teknologi	BPPT	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab. Klaten)	Pengusaha genteng	Selesai		
2.1.36	Peningkatan Kemampuan Industri Logam Kecil-Menengah di Sentra IKM Tegal untuk Pembuatan Komponen Otomotif	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab. Tegal)	Pengrajin dan Pemda	Sudah dilaksanakan kini diteruskan oleh pemda setempat	- Menentukan jenis propeler - Mengubah kebiasaan pengrajin dalam menggunakan pasir sungai sebagai pasir cetak tanpa memperhatikan persyaratan	- Pangsa pasar Tegal yang cukup memotivasi industri kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. - Keterampilan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat mengembangkan usaha industri kecil.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.37	Rancang Bangun Alat Pengering Gabah Skala Industri Pedesaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kab. Cianjur)	Petani dan kelompok tani	Sudah selesai dan kini diteruskan oleh kelompok tani dan IKM di sekitar Cianjur, dan dikelola oleh Balai Benih Tani Makmur, Cihea, Cianjur Jawa Barat	Tidak ada hambatan.	Kab.Cianjur merupakan sentra produksi padi di Jabar yang memasok sebagian besar kebutuhan padi daerah lain seperti DKI Jakarta dan sekitarnya.
2.1.38	Rancang Bangun Alat Penggiling Cabe Kering Skala Industri Pedesaan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab. Brebes)	Petani dan masyarakat pedesaan	Sudah selesai kini dikelola oleh 2 KUD setempat	Pada desain awal, roto mempunyai sirip penghancur (sudut 0) sehingga setiap selesai proses selalu terdapat sisa di dalam penggiling	Kabupaten Brebes merupakan daerah pertanian dengan produk unggulan cabe merah dan bawang merah.
2.1.39	Rancang Bangun Alat Pengolah Sabut Kelapa Skala Industri Kecil	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kab.Ciamis)	Karang Taruna Kelana Jaya, petani dan masyarakat dan Pemda	Sudah selesai dan kini diteruskan oleh Karang Taruna, petani, masyarakat setempat, dan Pemda setempat	- Lokasinya jauh di pelosok. - Transportasi dan sarana telekomunikasi tidak memadai.	
2.1.40	Rancang Bangun Peralatan Iodisasi Garam Rakyat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab. Pati)	Petani, masyarakat dan Pemda	Sudah selesai kini dilanjutkan oleh Pemda, petani, dan masyarakat Kab. Pati	Terdapat beberapa masalah pada <i>trial running</i> mesin pencuci garam tetapi ditemukan solusinya.	Garam merupakan produk unggulan Kab.Pati dan tumpuan nasional. Resistensi masyarakat terhadap informasi luar lambat laun dapat diatasi sehingga dapat menerima peralatan menggantikan yang tradisional.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.41	Rancang Bangun Pusat Penanganan Pasca Panen (Packing House) Sayur Mayur di Pedesaan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 1999-2000	Jawa Timur (Kab. Malang)	Kelompok tani "Tani Mulya," Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Malang	Sudah dilaksanakan dan dikelola oleh kelompok "Tani Mulya".	Tidak ada	Kecamatan Pujon dapat dijadikan sebagai pelopor dan penggerak kegiatan agribisnis karena kesiapan dan kemampuan SDM, variasi sayuran yang ditanam, serta lokasinya tidak terlalu jauh.
2.1.42	Pemanfaatan <i>Container</i> Bekas untuk Teknologi <i>Cold Storage</i> dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Hasil Tangkapan Nelayan	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Tenologi Alat dan Mesin Industri	Tahun 1999-2000	Lampung (Kab. Lampung Selatan)	Nelayan	Sudah selesai dan diteruskan oleh koperasi perikanan setempat	Tidak ada	- Lampung Selatan merupakan lokasi penangkapan ikan yang sangat strategis - Teknologi yang terapkan dalam proyek ini tidak baru, dan disesuaikan dengan lingkungan dan kemampuan SDM setempat
2.1.43	Penerapan Teknologi <i>Cool Box</i> untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Tangkapan Nelayan Kecil	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Tenologi Alat dan Mesin Industri	Tahun 1999-2000	Lampung (Kab. Lampung Selatan)	Nelayan dan pemda	Sudah dilaksanakan dan diteruskan oleh KUD dan pemda setempat.	Adanya perselisihan antara koperasi yang ditunjuk sebagai pengelola cool box (KUD Mina Jaya) dengan dinas teknis terkait (Dinas Perikanan).	Lampung merupakan salah satu lokasi penangkapan ikan yang sangat strategis
2.1.44	Pengembangan Industri Pakan Ternak dari Tepung Bongkol Jagung	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Dit. Tenologi Alat dan Mesin Industri	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kab. Garut)	Petani, KUD dan pemda	Sudah selesai dan diteruskan oleh KUD setempat	Terjadi perubahan desain untuk memenuhi permintaan petani dan pemda di mana peralatan yang dikembangkan harus bersifat terpadu dan serbaguna.	Garut merupakan sentra industri jagung utama di Jawa Barat, dan Jawa Barat adalah daerah penghasil jagung terbesar ke empat di Indonesia.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.45	Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselen	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Unit Pelayanan Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali.	Tahun 1999-2000	Bali (Kab. Tabanan :Pejaten)	Pengrajin dan masyarakat Tabanan, Bali	Sudah dilaksanakan dan diserahkan ke CV. Keramik Pejaten.	Tidak ada	Daerah Pejaten merupakan sentra produk gerabah yang dapat dikembangkan menjadi sentra kerajinan keramik karena SDM-nya memiliki keterampilan yang cukup.
2.1.46	Pemasyarakatan Mesin Pengiris Serba Guna (PSG) untuk Terciptanya Peningkatan Kegiatan Ekonomi Rakyat	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero – Gasdinamika dan Getaran	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab. Pati)	Petani/pengrajin dan Pemda Pati, Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan kini dilanjutkan oleh para petani/pengrajin dan Pemda Tk.II yang terkait: Pati, Magetan, Brebes, dan Tanggerang.	Tidak ada	Daerah-daerah tersebut sangat potensial untuk dikembangkan karena mempunyai potensi pertanian yang bagus (mis. di Pati terdapat 11.364 ha tanaman ketela)
2.1.47	Peningkatan Teknologi dan Pemberdayaan Industri Kecil Logam di Pasuruan	Diseminasi teknologi	BPPT	Tahun 1999-2000	Jawa Timur (Pasuruan)	Industri kecil logam	Selesai		
2.1.48	Rancang Bangun Peralatan Pertanian Pasca Panen Portable untuk Tanaman Padi	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Unit Pelaksana Teknis – Laboratoria Uji Konstruksi	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Sukabumi)	Petani/kelompok tani dan Pemda	Sudah dilaksanakan dan dilanjutkan oleh petani, kelompok tani dan KUD.	- Keterlambatan pelaksanaan - Masyarakat tani masih sangat sukar diberi pengertian untuk memanfaatkan rancangan atau memproduksi sendiri peralatan - Krisis moneter mengakibatkan bahan dan peralatan mahal dan sulit diperoleh.	Sukabumi sangat potensial pertaniannya. Dengan adanya peralatan pertanian pasca panen diharapkan petani dapat meningkatkan hasil gabah keringnya.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.49	Rancang Bangun Teknik Pandai Besi untuk Memproduksi Alat-alat Pertanian dan Disain Ergonomi	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan - Bantuan peralatan	BPPT, Unit Pelaksana Teknis – Laboratoria Uji Konstruksi	Tahun 1999-2000	Jawa Barat	Pengrajin	Sudah dilaksanakan dan terletak di belakang gedung UPT – LUK.	Tidak dijumpai hambatan yang berarti kecuali beberapa pandai besi yang diundang tidak hadir.	Potensi industri kecil pandai besi sangat besar namun belum tergarap secara optimal bahkan mulai ditinggalkan karena pasar lebih menyukai produk impor
2.1.50	Pembuatan dan Pemasaran Briket dan Tungku Gambut untuk Rumah Tangga	- Pembuatan peralatan - Pelatihan dan pembinaan	BPPT, Dit. Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi – TPSA	Tahun 1999-2000	Kalimantan Barat (Kab/Kota Pontianak)		Sudah dilaksanakan dan diteruskan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kanwil Dep. PU. Kalimantan Barat dan Koperasi Karyawan Eka Mutiara Sari Pontianak.	- Hasil penelitian dan literatur masih terbatas - Kerjasama pemerintah dan swasta masih kurang - Kerjasama pemerintah dengan luar negeri belum ada - Belum memiliki laboratorium dan workshop sendiri - Tidak seimbang dana penelitian dengan kebutuhan yang dihadapi - Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai	- Partisipasi dan minat membeli/memproduksi tungku/kompor dan briket gambut dan produk lainnya meningkat - Dari SKE tahun 1998, konsumsi energi (minyak tanah) rumah tangga di Kalbar 8.473.08 kca/kk/hari, diharapkan semakin tergantikan oleh produk dan teknologi gambut.
2.1.51	Teknologi Daur Ulang Logam Timbal/Timah Hitam (Pb) dari Aki Bekas di Temanggung, Jawa Tengah	- Perancangan dan pembuatan peralatan - Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Lingkungan	Tahun 1999-2000	Jawa Tengah (Kab. Temanggung)	Masyarakat dan pengrajin	Sudah dilaksanakan dan dilanjutkan oleh pengrajin pendaur ulang di Temanggung, Jawa Tengah	- Diperlukan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup. - Hambatan dalam sosialisasi penggunaan peralatan yang efisien dan efektif karena pengrajin khawatir akan meningkatnya biaya produksi.	Di Temanggung terdapat industri kecil pengolah aki bekas yang melakukan kegiatan secara tradisional tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Melalui kegiatan IPTEKDA industri ini dapat dijadikan contoh dan dapat diimplementasikan pada industri sejenis di daerah lain

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.52	Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Industri Tahu-Tempe	Diseminasi teknologi	BPPT	Tahun 1999-2000	Jawa Barat (Kodya Bandung)	Usaha tahu - tempe	Selesai		
2.1.53	Penerapan Teknologi Destilasi Minyak Akar Wangi di Kab. Garut	- Pembuatan peralatan - Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 2000	Jawa Barat (Kab. Garut)	Petani penyuling minyak akar wangi	Selesai	- Teknologi yang diterapkan masih bersifat ujicoba - Belum terasanya manfaat langsung bagi mitra pengguna - Belum jelasnya pola kerjasama dengan mitra kerja - Penerimaan masyarakat terhadap teknologi perlu penanganan khusus	
2.1.54	Penerapan Teknologi Fermentasi dan Formulasi Roti Pakan Sapi untuk Meningkatkan Kualitas Daging	- Pembuatan peralatan - Pelatihan dan sosialisasi	BPPT, PPP-BIOTEK	Tahun 2000	Bali (Kab. Klungkung)	Peternak sapi	Selesai	- Sasaran kegiatan tidak dapat dicapai sekaligus - Penerimaan masyarakat terhadap teknologi perlu penanganan khusus	Sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai usaha/bisnis
2.1.55	Penerapan Teknologi Evaporasi dan Kristalisasi untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Garam	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Farmasi dan Medika	Tahun 2000	Jawa Tengah (Kab. Grobogan-Lahan Pegaraman Jono)	Petani garam	Selesai	Target produksi belum tercapai karena masalah pasokan bahan baku, SDM dan lain-lain dll	
2.1.56	Perekayasa Paket Peralatan dan Teknologi Produksi Nata de Soya	- Pelatihan - Pendampingan dalam pengoperasian alat	BPPT, Dit. Teknologi Bioindustri	Tahun 2000	DIY (Kab. Bantul)	Perajin tahu tempe.	Selesai		Teknologi ini membantu penciptaan produk baru yang memiliki prospek bisnis.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.57	Penerapan Teknologi Pembuatan Kecap Ikan Secara Enzimatik Terkendali untuk Industri Skala Menengah dan Rumah Tangga	Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi BioIndustri	Tahun 2000	Jawa Timur (Kab. Tuban)	Perajin (petani nelayan) tradisional, industri rumah tangga dan industri menengah	Selesai	Diperlukan upaya pemasaran karena produk ini relatif baru dan belum banyak dikenal masyarakat.	Sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai usaha/bisnis
2.1.58	Penerapan Teknologi Pengeringan Bebas Lalat	Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 2000	Jawa Timur (Kab. Tuban)	Nelayan	Selesai	- Pelaksanaan tidak mencapai sasaran - Teknologi masih bersifat percobaan - Kurang memperhitungkan skala penerapan dan respon masyarakat yang terbiasa menggunakan formalin	Berpotensi untuk diterapkan dalam skala kecil
2.1.59	Penerapan Teknologi Penggemukan Sapi dengan Menggunakan Pakan Ternak Organik Lactogrand dan Lactomin ...	- Pembuatan kandang sapi koloni - Pengadaan bibit sapi - Pembentukan kelompok tani - Pendampingan	BPPT, Dit. Teknologi Budidaya Pertanian	Tahun 2000	Jawa Tengah (Kab. Boyolali)	Peternak sapi	Selesai	Kesulitan mendapatkan <i>lactogrand</i>	Masyarakat banyak yang ingin terlibat dalam kegiatan dan turut menerapkannya
2.1.60	Pembuatan dan Pemasarakan Tungku Berbahan Bakar Gas untuk Industri Kerajinan Keramik	- Pembuatan tungku berbahan bakar gas - Pendampingan	BPPT, Dit. Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi	Tahun 2000	Jawa Tengah (Kab. Banjarnegara)	Pengrajin keramik	Selesai	Kenaikan harga LPG saat kegiatan hampir selesai mengurangi nilai tambah tungku berbahan bakar gas dibandingkan tungku minyak tanah yang selama ini dipakai pengrajin.	Pemasarakan tungku berbahan bakar gas perlu ditingkatkan dengan membuat kajian tekno-ekonomi.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.61	Aplikasi Mineral Alumino Silikat untuk Industri Pertanian	- Bantuan suplemen dan pakan ternak - Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral	Tahun 2000	Jawa Barat (Kab. Ciamis)	Petani peternak	Selesai	- Sasaran kegiatan belum tercapai - Manfaat teknologi di masyarakat belum dibuktikan secara ilmiah - Aspek kemitraan sebagai tindak lanjut belum digarap dengan jelas	
2.1.62	Strategi Pemanfaatan Rumput Laut Melalui Pemasarakatan Teknologi Pengolahan Gracilaria sp Menjadi Agar-Agar	- Pelatihan - Pendampingan	BPPT, Dit. Kebijakan Pemanfaatan dan Pemasarakatan Teknologi	Tahun 2000	Sulawesi Selatan (Kab. Sinjai)	Masyarakat	Selesai	Target dan sasaran belum tercapai karena keterlambatan jadwal akibat adanya perubahan desain alat untuk mencari harga yang lebih murah	
2.1.63	Peningkatan Kemampuan Tekno-Bisnis dalam Pengembangan Produk Unggulan Koperasi	- Pembuatan mesin penggorengan <i>vacuum</i> kripik dan buah-buahan - Bantuan teknis dan konsultasi	BPPT, Dit. Kebijakan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Unggulan Daerah	Tahun 2000	Jawa Timur (Kab. Pasuruan)	Koperasi (KPSP) "Setia Kawan"	Selesai	- Teknologi <i>vacuum frying</i> yang dikembangkan dan diterapkan bukan milik BPPT melainkan milik lembaga swasta	
2.1.64	Penerapan Teknologi Budidaya Jagung dan Sapi Perah Terpadu di Jombang dan Penerapan Bioteknologi untuk Produksi Kelapa dan Sari Kelapa di Kab. Banyumas	- Pelatihan - Perguliran dana (awal tahun 2001 s/d akhir tahun 2003)	BPPT, Biro Umum	Tahun 2000-2003	Jawa Timur: (Kab. Jombang) Jawa Tengah (Kab. Banyumas)	Pesantren dan masyarakat	Masih berlangsung (sampai akhir 2003)	- Untuk kegiatan pertanian terpadu, tidak terlihat konsep keterpaduan antara budidaya sapi dengan jagung karena tempatnya yang berjauhan dan tidak ada teknologi yang baru atau punya nilai tambah	
2.1.65	Pemanfaatan Teknologi Rancang Bangun pada Peralatan Pemroses Sirlac	- Pembuatan peralatan pemroses sirlac untuk industri politur - Pendampingan	BPPT, Dit. Teknologi Alat dan Mesin Industri	Tahun 2000	Jawa Barat (Kab. Cirebon)	Industri kecil penghasil politur	Selesai	Pengoperasian alat belum berjalan karena supply bahan baku dari Perhutani belum berjalan.	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.66	Penerapan Teknologi Proses Pembuatan Kompon di Koperasi Pengusaha Industri Kecil Suku Cadang Mesin Bandung	- Bantuan sarana dan prasarana - Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 2000	Jawa Barat (Bandung)	Pengusaha industri kecil suku cadang mesin	Selesai	Teknologi/formula yang dikembangkan masih didasarkan pada teknologi kompon di pasaran yang sangat beresiko.	
2.1.67	Penerapan Alat Deteksi Ikan dalam Rangka Pra dan Penangkapan Ikan Terpadu	- Pemberian bantuan alat deteksi ikan (ADI) - Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Alat dan Mesin Industri	Tahun 2000	Lampung	Nelayan kecil di bawah binaan KUD Mina Jaya	Selesai	Peralatan teknologi kunci (<i>fish finder</i> , GPS dan <i>transducer</i>) masih impor	
2.1.68	Pembuatan dan Pengembangan Teknologi Proses Produksi Pengolahan Kayu Karet (<i>Sawn Timber</i>) Skala Industri Rakyat dan Berkualitas Ekspor	- Rekayasa dan rancang bangun peralatan - Pendampingan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 2000	Jawa Barat (Kab. Padalarang)	Industri kecil menengah dan masyarakat desa	Selesai	- Penerapan teknologi belum selesai, karena peralatan yang dibangun belum berfungsi secara optimal akibat tidak adanya sistem alat pengontrol - Dana tidak cukup sehingga peralatan yang menentukan kualitas produk tidak dapat dibeli	
2.1.69	Penerapan Teknologi Perlakuan Panas di Sentra Industri Pengecoran Logam Ceper - Klaten	Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 2000	Jawa Tengah (Kab. Klaten)	Pengrajin pengecoran logam	Selesai	Koperasi yang bermitra belum memberikan kontribusi yang lebih besar	Penerapan teknologi memberikan manfaat dan peluang untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh IKM
2.1.70	Pengembangan Bahan Baku Dasar Penunjang Industri Perikanan	- Pelatihan - Pendampingan	BPPT, Dit. Teknologi Transportasi	Tahun 2000	Jawa Tengah (Kab. Rembang)		Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.71	Rancang Bangun Alat Pembuat Bubuk Tempurung Kelapa sebagai Bahan Baku Pembuatan Obat Nyamuk	- Pembuatan alat pembuat bubuk tempurung kelapa - Pendampingan	BPPT, UPT-LUK	Tahun 2000	Jawa Tengah (Kab./Kota Semarang)	Petani	Selesai	- Daya tahan mesin belum diketahui, karena belum pernah dibuat sebelumnya - Pemasaran produk bubuk kelapa harus dijamin sehingga mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan hanya dibuat arang aktif	
2.1.72	Rancang Bangun Mesin Press (<i>Packaging</i>) Kapuk sebagai Komoditi Ekspor	- Rancang bangun mesin press (<i>packaging</i>) - Pendampingan	BPPT, UPT-LAGG	Tahun 2000	Jawa Tengah (Kab. Pati)	Pengusaha kapuk	Selesai	Kegiatan mengalami keterlambatan karena perencanaan yang kurang baik, aspek teknis tidak dikuasai, dan masih bersifat coba-coba.	
2.1.73	Pemasyarakatan Teknologi Pengolahan Air Siap Minum Skala Industri Kecil	- Bantuan alat pengolahan air siap minum - Pelatihan	BPPT, Dit. Teknologi Lingkungan	Tahun 2000	Jawa Timur (Kab. Sidoarjo)	Pengusaha air minum skala kecil	Selesai	- Pola kemitraan belum disepakati - Sarana produksi air belum diserahkan pengelolaannya	Memberikan prospek bisnis yang baik
2.1.74	Aplikasi Teknologi Silase Limbah Hasil Pertanian Tanaman Pangan untuk Pakan Ternak pada Pengembangan Sapi Potong dan Ikan Patin Secara Terpadu	- Pelatihan - Perguliran dana (mulai awal tahun 2001 s/d akhir tahun 2003)	BPPT, Dit. Teknologi Lingkungan	Tahun 2000 - 2003	Jawa Timur (Kab. Tulungagung - Pondok Pesantren Yayasan Al-Husna)	Peternak sapi dan ikan patin	Masih berjalan sampai akhir 2003	Konsep keterpaduan antara selulosa, budidaya sapi dan ikan patin belum tercapai, karena ada perubahan alokasi anggaran untuk ikan patin ke produksi selulosa.	
2.1.75	Rancang Bangun Krusibel untuk Peleburan Logam Skala Industri Kecil	- Penelitian - Pembuatan tungku kokas dan pengujian - Pelatihan - Pendampingan	BPPT, Dit. Teknologi Material	Tahun 2000	Jawa Barat (Kab./Kota Bandung)	Industri kecil pengecoran logam	Selesai	Aspek kemitraan untuk memanfaatkan peluang bisnis masih belum jelas.	Memberikan inovasi produk yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai usaha bisnis.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.76	Peningkatan Teknologi Proses dan Kualitas Keramik dari Desa Benoh, Denpasar-Bali	- Bantuan peralatan - Bantuan teknis dan konsultasi - Pendampingan	BPPT UPT-PSTKP	Tahun 2000	Bali (Kota Denpasar-Desa Benoh)	Pengrajin keramik	Selesai		Program ini dapat dilanjutkan melalui kerjasama dengan Sucofindo seperti dilakukan di tempat lain
2.1.77	Penerapan Alat Pengering Tepung Tapioka Hemat Energi pada Industri Rumah Tangga	- Pembuatan alat - Pembangunan gudang penampung - Pelatihan	BPPT, UPT-LSDE	Tahun 2000	Jawa Tengah (Kab. Temanggung)	Pengrajin tepung tapioka	Selesai		Alat ini perlu disosialisasikan ke masyarakat di lokasi lain yang membutuhkan. Selain itu, riset dan pengembangan perlu terus dilanjutkan agar kapasitas meningkat, harga makin rendah serta mutu meningkat.
2.1.78	Peningkatan Produksi dan Mutu Kopra Rakyat dengan Pengering Berbahan Bakar Arang Tempurung Kelapa	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi	Tahun 2001	Riau (Kab. Bengkalis)	Produsen kopra	Selesai		
2.1.79	Penerapan Teknologi Pembuatan Briket Arang Tempurung Kelapa di Sentra Perkebunan Kelapa Rakyat	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi	Tahun 2001	Riau (Kab. Indragiri Hilir)	Petani kelapa	Selesai		
2.1.80	Penerapan Pendorong Air Berbaling-Baling untuk Pemberdayaan Petani Tambak	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi	Tahun 2001	Sulawesi Selatan	Petani tambak	Selesai		
2.1.81	Rancang Bangun Alat Pengolah Serat Alam Limbah Pabrik Kelapa Sawit	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 2001	Lampung		Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.82	Rancang Bangun Alat Pengering Gabah dengan Bahan Sekam	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 2001	Sulawesi Selatan (Kab. Sidrap)	Petani	Selesai		
2.1.83	Penerapan Rancang Bangun Alat Proses Produksi Briket Arang Serbuk Gergajian	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Proses dan Rekayasa	Tahun 2001	Sulawesi Selatan (Kab. Sidrap)		Selesai		
2.1.84	Pemanfaatan Botol Plastik Bekas dan Limbah Kayu Gergajian untuk Pembuatan Papan Partikel	Diseminasi teknologi	BPPT, UPT Laboratorium Uji Konstruksi	Tahun 2001	Jawa Tengah		Selesai		
2.1.85	Teknologi Pemanfaatan Lumpur Limbah Pabrik Pulp sebagai Bahan Bangunan	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Lingkungan	Tahun 2001	Jawa Barat		Selesai		
2.1.86	Peningkatan Mutu dan Produktivitas Industri Kecil Kerajinan Tembaga Ukir	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Material	Tahun 2001	Jawa Tengah (Kab. Boyolali - Cepono)	Pengrajin tembaga ukir	Selesai		
2.1.87	Pengembangan Pasar Produk Agrobisnis Melalui Teknologi Informasi	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Informasi dan Elektronika	Tahun 2001	Jawa Timur (Kab. Ponorogo)		Selesai		
2.1.88	Proses Pembuatan Bubur Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia) sebagai Bahan Baku Obat Alami	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Farmasi dan Medika	Tahun 2001	Jawa Barat (Kab. Bogor - Desa Lawang Gintung)		Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.89	Penerapan Teknologi Industri Pengolahan Kopi Rakyat	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 2001	Sumatera Selatan	Pondok Pesantren Darul Muttaqien Desa Tanjung Menang	Selesai		
2.1.90	Penerapan Teknologi Produksi Chips dengan Vacuum Frying	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 2001	D.I Yogyakarta	Produsen keripik	Selesai		
2.1.91	Penerapan Teknologi Dry Klin Skala Industri Rakyat dengan Kualitas Ekspor	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 2001	Riau (Kab. Kampar)		Selesai		
2.1.92	Pemasyarakatan Teknologi Pengolahan Sagu	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Agroindustri	Tahun 2001	Sulawesi Tenggara (Kab. Kendari)	Petani sagu	Selesai		
2.1.93	Pengembangan Teknologi Proses Produksi Tapioka Rakyat dan Pengolahan Limbah Secara Terpadu	Diseminasi teknologi	BPPT, UPT EPG	Tahun 2001	Jawa Tengah (Kab. Temanggung)	Produsen tapioka	Selesai		
2.1.94	Pemberdayaan IKM di Sentra Industri Melalui Pengembangan Collective Cybermarketing	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Kebijakan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Unggulan Daerah	Tahun 2001	Jawa Timur (Kab. Sidoarjo); Jawa Tengah (Kab. Tegal, Klaten)	Industri kecil dan menengah	Selesai		
2.1.95	Implementasi Pengering Tepung Tapioka Hemat Energi pada Industri Tepung Tapioka Rakyat	Diseminasi teknologi	BPPT, UPT-LSDE	Tahun 2001	Lampung (Kab. Lampung Tengah)	Industri tepung tapioka rakyat	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.96	Aplikasi Teknologi Kelautan dalam Menunjang Manajemen Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Diseminasi teknologi	BPPT, UPT Baruna Jaya	Tahun 2001	Banten (Kab. Serang)	Nelayan	Selesai		
2.1.97	Peningkatan Produktivitas Lahan Melalui Produksi Bibit Unggul Unggas, Ikan Lele dan Pelatihan untuk Mendukung Pemasarakatan Teknologi <i>Bio-Cyclofarming</i>	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Kawasan	Tahun 2001	Jawa Timur (Kab. Tuban)	Peternak unggas dan ikan lele	Selesai		
2.1.98	Aplikasi Teknologi Peralatan Penunjang Produksi pada Ladang Garam Sistem Semi Intensif	Diseminasi teknologi	BPPT, Dit. Teknologi Transportasi	Tahun 2001	DKI Jakarta	Petani garam	Selesai		
2.1.99	Pembuatan Alat Penyeimbang Propeller untuk Meningkatkan Kualitas Produk Pengrajin <i>Propeller</i> Konvensional	Diseminasi teknologi	BPPT, UPT-Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika	Tahun 2001	Jawa Barat	Pengrajin <i>propeller</i> konvensional	Selesai		
2.1.100	Pelatihan Manajemen Produksi dan Teknologi Pembuatan Pakan Tambak dari Bahan Baku Lokal	Pelatihan	BPPT, Pusdiklat	Tahun 2001	Jawa Timur	Petani tambak/ Produsen pakan tambak	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.101	Pelatihan Pembuatan Kompon dan Barang Karet untuk Industri Kecil	Pelatihan	BPPT, Pusdiklat	Tahun 2001	Jawa Barat (Bandung)	Produsen kompon dan barang karet	Selesai		
2.1.102	Pelatihan Penggunaan Teknologi <i>Fish Finder</i> untuk Nelayan Ikan	Pelatihan	BPPT, Pusdiklat	Tahun 2001	Jawa Timur	Nelayan	Selesai		
2.1.103	Pelatihan Pengembangan Usaha Pengecoran Logam	Pelatihan	BPPT, Pusdiklat	Tahun 2001	Jawa Tengah (Tegal)	Pengrajin pengecoran logam	Selesai		
2.1.104	Aplikasi Biofertilizer Mikroriza Arbuskular dan Probiotik untuk Peningkatan Produktivitas Sapi Bali	- Studi literatur - Diskusi dengan pakar - Pembuatan sarana dan prasarana	BPPT, Balai Pengkajian Bioteknologi (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	Bali (Nusa Penida)	Peternak	Selesai	- Kendala musim kemarau. - Aplikasi di "green house" kemungkinan berhasil cukup tinggi tetapi butuh waktu yang lama	
2.1.105	Penerapan Teknologi Pengolahan Karet Alam Menjadi Bahan Baku Industri di Muara Enim	- Disain dan pembuatan peralatan - Bantuan teknis penggunaan alat	BPPT, P3TA (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	Sumatera Selatan (Kab. Muara Enim)	KUD "Berkas", Desa Lubuk Raman, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim	Selesai	Belum tersedia sumber air baku (belum adanya sumur yang seharusnya dibuat oleh pemda)	
2.1.106	Unit Pengelolaan Pasca Panen Hasil Laut dengan Teknologi Konservasi Energi Matahari di Pulau Sumbawa	- Pembuatan peralatan - Pelatihan	BPPT, UPT-LSDE (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	NTB (Kab Sumbawa)	Koperasi "Mina Cahaya"	Selesai	- Peran masyarakat selaku pengguna dirasakan kurang - Perguruan tinggi lebih berperan sebagai perantara - Manfaat teknologi di masyarakat belum terlihat	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.107	Peningkatan Teknologi dan Pemberdayaan Industri Kecil Keramik	- Penyediaan sarana dan prasarana - Pendampingan	BPPT, P3TM (Direktorat)	Tahun 2002 (6 bulan)	NTB (Kab Lombok Tengah - Desa Penunjak)	25 pengrajin keramik/gerabah	Selesai		
2.1.108	Pembangunan Industri Kecil Daur Ulang untuk Menangani Sampah Pasar Tradisional	- Pengumpulan data - Desain dan pembuatan peralatan - Sosialisasi	BPPT, P3TL (Pusat)	Tahun 2002 (7 bulan)	Jawa Barat (KabBandung-Desa Margaasih)	Koperasi dan masyarakat	Selesai		
2.1.109	Penerapan Teknologi Mikroba Probiotik untuk Pemulihan Kualitas Lingkungan Perairan Tambak Udang	- Pembuatan peralatan - Pendampingan - Monitoring	BPPT, P3TL (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	Jawa Tengah (Kab.Pemalang)	Koperasi Perikanan Darat "Mino Rejo"	Selesai	Kegiatan belum banyak melibatkan petani setempat dan lebih banyak melakukan uji produk-produk probiotek.	
2.1.110	Otomasi Mesin Punch/Stamping Berbasis PLC pada Industri Logam di IKM Ngingas	- Pembuatan peralatan - Pendampingan	BPPT, P3TIAM (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	DKI Jakarta; Jawa Timur (Kab.Sidoarjo)	Industri kecil menengah logam	Selesai		
2.1.111	Diseminasi Teknologi Konvensional untuk Rancang Bangun Kapal Nelayan di Daerah Cilacap	Diseminasi teknologi (Sosialisasi)	BPPT, P3TIST (Pusat)	Tahun 2002 (6 bulan)	Jawa Tengah (Kab.Cilacap)	Masyarakat nelayan dan pengrajin kapal kayu tradisional	Selesai		
2.1.112	Rancang Bangun Peralatan : Aplikasi Teknologi Pengolahan Produk Perikanan Laut	Disain dan pembuatan peralatan	BPPT, P3TIT	Tahun 2002 (8 bulan)	NTB (Kota Mataram)	Dinas Pertanian Mataram, nelayan dan peternak	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.113	Rancang Bangun Sistem Pengering pada Skala Industri Kecil Menengah	- Disain dan pembuatan peralatan - Pengujian alat	BPPT, BTMP (Direktorat)	Tahun 2002 (6 bulan)	Jawa Barat (Kab. Bandung)	Kelompok pengrajin mendong	Selesai		
2.1.114	Rancang Bangun dan Rekayasa Peralatan Pembuatan Keramik untuk Industri Kecil	Pembangunan sarana dan prasarana	BPPT, P3TIP (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	Sulawesi Selatan (Kab. Gowa)	Industri kecil gerabah/keramik dan KUB "Bontote'ne", Kab. Gowa	Selesai	-Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan tungku kurang -Kegiatan lebih ditekankan pada pembuatan alat, sedangkan sosialisasi kegiatan dan penggunaannya kurang	
2.1.115	Rancang Bangun Alat Pengolah Serat Alam dari Limbah Pabrik Kelapa Sawit untuk Pembuatan Papan Partikel	- Disain dan pembuatan peralatan, - Monitoring	BPPT, P3TIP (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	Banten (Kab. Pandeglang)	Industri <i>spring bed</i>	Selesai	Perbedaan jenis bahan baku yang digunakan dengan perjanjian kerjasama	
2.1.116	Rancang Bangun Sistem Apung Darat Guna Meningkatkan Produktivitas Tangkapan Kapal Ikan Tradisional	-Disain dan pembuatan peralatan - Uji coba alat	BPPT, UPT-BPPH (Direktorat)	Tahun 2002 (7 bulan)	Jawa Tengah (Kab. Cilacap)	Kelompok nelayan	Selesai	-Teknologi yang digunakan belum pernah diuji coba -Kepemilikan desain sistem -Pengelolaan prototype -Terlalu berat pada kegiatan penelitian.	
2.1.117	Pemberdayaan IKM Logam untuk Pengecoran Komponen Motor Bakar Aluminium	- Disain dan pembuatan peralatan - Informasi proses pembuatan	BPPT, P3TM (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	Jawa Barat (Kab./Kota Bandung)	Kelompok usaha pengecoran logam	Selesai	-Tidak diketahui berapa potensi skrap aluminium daerah, apakah mampu mensuplai industri motor bakar yang dimaksud - Pelatihan yang direncanakan tidak dilakukan	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.118	Optimalisasi Potensi Industri Kecil Menengah (IKM) untuk Pembuatan Komponen Motor Bakar	- Diseminasi teknologi - Pembuatan prototipe	BPPT, P3TM (Direktorat)	Tahun 2002 (8 bulan)	Jawa Barat (Kab./Kota Bandung)	Industri kecil pengecoran	Selesai	- Kurang terlihat kerjasama dengan masyarakat - Kurang terlihat penerapan pada masyarakat luas/daerah setempat	
2.1.119	Strategi Pengembangan Usaha Peternakan	Diseminasi teknologi	BPPT (P2KDT)	Tahun 2003	Sulawesi Selatan (Kab. Wajo)	Peternak	Masih berjalan		
2.1.120	Fasilitas Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir	Diseminasi teknologi	BPPT (BIT)	Tahun 2003	Jawa Barat (Kab. Krawang)	Masyarakat pesisir	Masih berjalan		
2.1.121	Pabrik Pengolahan <i>Crumb Rubber</i> Mini di Pesantren "Al Islah"	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TA)	Tahun 2003	Sumatera Selatan (Kab. Ogan Komering Ilir - Tulung Selapan)	Pesantren	Masih berjalan		
2.1.122	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengolahan Batang Padi untuk Pembuatan Dos Tempat Telur	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TA)	Tahun 2003	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.123	Teknologi Ekstraksi Minyak Kelapa dengan Cara Semi Mekanis	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TA)	Tahun 2003	Sulawesi Selatan (Kab. Majene)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.124	Penerapan Teknologi Pengolahan Karet Alam Menjadi Bahan Baku Industri	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TA)	Tahun 2003	Sumatera Selatan (Kab. Muara Enim)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.125	Penerapan Teknologi Penanganan Pasca Panen Gabah	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TA)	Tahun 2003	Jawa Timur (Kab. Lamongan)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.126	Pemberdayaan Peternakan Rakyat Terpadu Melalui Penerapan Teknologi Industri Pakan	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TBP)	Tahun 2003	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)	Peternak	Masih berjalan		
2.1.127	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Limbah Jagung untuk Pakan Ternak dan Pupuk Organik	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TBP)	Tahun 2003	Gorontalo (Gorontalo)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.128	Penerapan Teknologi dan Diseminasi Produksi Benih Ikan unggul	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TBP)	Tahun 2003	Jawa Barat (Kab. Bogor)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.129	Penerapan Teknologi dan rancang bangun Peralatan Pengeringan dan Produksi Serbuk Minuman Berbasis Rimpang-Rimpangan	Diseminasi teknologi	BPPT (P2TFM)	Tahun 2003	Jawa Barat (Kota Bekasi)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.130	Pengurangan Penggunaan Air di Usaha Kecil Pencucian Botol untuk Menunjang Produksi Bersih	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TL)	Tahun 2003	Jawa Barat (Kab/Kota Cirebon)	Usaha kecil pencucian botol	Masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.131	Pemanfaatan Teknologi Bambu Laminasi untuk Pengembangan UKM Furniture dan Kerajinan	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TL)	Tahun 2003	Jawa Barat (Bogor)	UKM furniture dan kerajinan	Masih berjalan		
2.1.132	Pelatihan dan Bantuan Teknik Pembuatan Kokas Briket Batubara Kaway XVI Aceh Barat sebagai Kokas Metalurgi untuk Industri Pengecoran Logam	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TPSE)	Tahun 2003	Nanggroe Aceh Darussalam	Industri pengecoran logam	Masih berjalan		
2.1.133	Penerapan Teknologi Pembakaran Kapur Menggunakan Dual Fuel sebagai Bahan Bakar	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TPSE)	Tahun 2003	Sumatera Barat (Kota Padang)	Usaha pembakaran kapur	Masih berjalan		
2.1.134	Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengolahan Produk Buah Salak	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TPSE)	Tahun 2003	Jawa Tengah (Kab. Wonosobo)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.135	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan Agroindustri Terpadu untuk Memberdayakan Lahan Pertanian	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TPSLK)	Tahun 2003	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.136	Pemanfaatan Kawasan Pesisir Gorontalo untuk Pengembangan Budidaya Rumput Laut (<i>Eucheuma spp</i> dan <i>Gracilaria spp</i>)	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TPSLK)	Tahun 2003	Gorontalo (Gorontalo)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.137	Peningkatan Kualitas Teknologi Pembuatan Kapal Fibre Glass untuk Mendukung Pengembangan Masyarakat UKM	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TPSLK)	Tahun 2003	NTB	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.138	Rancang Bangun Alat Proses Pemintalan dan Pewarnaan Benang Sutera	Rancang bangun	BPPT (P3TIP)	Tahun 2003	Sulawesi Selatan (Kab. Soppeng)	Industri benang sutera	Masih berjalan		
2.1.139	Penerapan Teknologi Peleburan Biji dengan Devided Blast Cupola di UPT Lab. Logam Ceper	Diseminasi teknologi	BPPT (P3TIP)	Tahun 2003	Jawa Tengah (Kab. Klaten)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.140	Pelatihan Pembuatan Bagan Penangkap Ikan tipe Semi Benam Beserta Alat Tangkapnya	Pelatihan	BPPT (UPT BPPH)	Tahun 2003	NTB (Kab. Lombok Barat)	Usaha kecil menengah	Masih berjalan		
2.1.141	Disain Kapal dan Alat Tangkap yang Sesuai Kondisi Perairan	Diseminasi teknologi	BPPT (UPT BPPH)	Tahun 2003	Sumatera Selatan	Industri kapal dan alat tangkap	Masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
2.1.142	Peningkatan Kemampuan Teknologi Pembuatan Paduan Perunggu sebagai Bahan Gamelan dan Uang kepang untuk Para Perajin Kecil	Diseminasi teknologi	BPPT (UPT LUK)	Tahun 2003	Bali (Kab. Klungkung)	Perajin kecil	Masih berjalan		
2.1.143	Penerapan Teknologi Tepat Guna Proses Pembuatan Baling-Baling Kapal	Diseminasi teknologi	BPPT (UPT LUK)	Tahun 2003	Sumatera Selatan	Industri baling-baling kapal	Masih berjalan		
2.1.144	Rancang Bangun Alat Hammer Mill untuk Diaplikasikan di Tambang Kapur Rakyat	Rancang bangun	BPPT (P3TIAM)	Tahun 2003	Jawa Timur (Kab. Malang - Desa Sumberejo, Kec Turen)	Tambang kapur rakyat	Masih berjalan		

3. Departemen Dalam Negeri (Depdagri)

3.1	Pengembangan Pelatihan Masyarakat	- Pelatihan - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelatihan di 17 provinsi.	Depdagri , Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD)	Januari - Desember 2002	Beberapa provinsi di Indonesia	Sasaran utama aparat PMD propinsi dan kab/kota yang secara langsung melakukan pelatihan masyarakat di wilayahnya.	Berlanjut ke tahun 2003	- Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar unit kerja - Belum terinformasikannya program pelatihan masyarakat - Dukungan program dari pusat untuk daerah pasca pelatihan masih rendah. - Pembinaan pelatihan tidak berkesinambungan. - Belum adanya evaluasi dampak - Keterbatasan dana pendamping dan fasilitator	- Potensi keuangan daerah - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah; Lembaga Keuangan Mikro; perguruan tinggi; dan LSM
-----	-----------------------------------	--	--	-------------------------	--------------------------------	---	-------------------------	---	--

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
3.2	Program Pemberdayaan Perempuan	- Fasilitasi dan sosialisasi gender - Temu konsultasi - Penyusunan laporan evaluasi.	Depdagri, Ditjen PMD	Januari - Desember 2002	Beberapa provinsi di Indonesia	Pemda, masyarakat dan keluarga miskin pedesaan.	Berlanjut ke tahun 2003		- Potensi keuangan daerah - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah; Lembaga Keuangan Mikro; perguruan tinggi; dan LSM
3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	- Mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK - Menyusun beberapa Rancangan Pedoman Umum pemberdayaan - Melaksanakan peringatan Hari Keluarga Nasional - Sosialisasi tentang narkoba	Depdagri, Ditjen PMD	Januari - Desember 2002	Beberapa provinsi di Indonesia	Masyarakat, khususnya perempuan	Berlanjut ke tahun 2003	Adanya beberapa kegiatan yang tidak direncanakan sejak awal sehingga belum terprogram, baik untuk pelaksanaan kegiatan maupun penyediaan dananya	- Potensi keuangan daerah - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah; Lembaga Keuangan Mikro; perguruan tinggi; dan LSM
3.4	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Fasilitasi - Pengembangan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam - Pengembangan Pemasaran - Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga - Penanganan masyarakat tertinggal	Depdagri, Ditjen PMD	Januari - Desember 2002	Beberapa propinsi di Indonesia	Keluarga dan kelompok masyarakat miskin pedesaan.	Berlanjut ke tahun 2003	- Perubahan struktur organisasi - Kurangnya kemampuan SDM untuk fasilitasi - Belum tertatanya seluruh perangkat daerah - Program tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan daerah - Adanya gangguan keamanan di beberapa daerah - Birokrasi yang berbelit - Terbatasnya alokasi dana - Belum optimalnya pendataan dan informasi potensi daerah	- Potensi keuangan daerah - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah; Lembaga Keuangan Mikro; perguruan tinggi; dan LSM

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
3.5	Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	- Pembangunan prasarana produktif (pilihan masyarakat) - Penyediaan pinjaman usaha - Pertemuan dengan Tim Koordinasi pusat dan daerah - Pertemuan konsultasi regional bagi para konsultan pendamping	Depdagri, Ditjen PMD	Waktu pelaksanaan bersifat <i>multiyears</i> (PPK dan CERD)	20 provinsi (130 kabupaten, 990 kecamatan, 15.481 desa)	Penduduk miskin di kecamatan miskin	Berlanjut ke tahun 2003	- Sasaran kegiatan dan pinjaman modal kurang tepat - Pengembalian pinjaman tidak lancar - Kurangnya partisipasi orang miskin dan kelompok perempuan - Kurangnya disiplin dan kemampuan masyarakat desa - Sanksi tidak diterapkan secara efektif - Terjadinya benturan antara semangat otoda dan sifat sentralistik proyek - Masalah aparat birokrasi	- Potensi keuangan daerah - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah; Lembaga Keuangan Mikro; perguruan tinggi; dan LSM
3.6	Program <i>Community Empowerment for Rural Development</i> (CERD) / Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD)	- Mobilisasi konsultan - Pelatihan - Pembentukan dan pemberdayaan kelompok masyarakat. - Pembentukan Kelompok Simpan Pinjam - Pembangunan prasarana - Monitoring dan evaluasi.	Depdagri, Ditjen PMD	Waktu pelaksanaan bersifat <i>multiyears</i> (PPK dan CERD)	11 Kabupaten di 6 propinsi (Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra)	Masyarakat miskin perdesaan dengan lebih memperhatikan kelompok perempuan	Berlanjut ke tahun 2003	- Lokasi Kutai Kertanegara tidak layak sebagai sasaran proyek - Penjajagan kemungkinan BPD tidak bersedia menjadi <i>executing bank</i>	- Potensi keuangan daerah - Pendayagunaan dukungan perbankan di daerah; Lembaga Keuangan Mikro; perguruan tinggi; dan LSM
4. Departemen Kelautan dan Perikanan									
4.1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	- Pendampingan - Pelatihan - Pembentukan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) - Bantuan modal bergulir	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2000 - 2003	Seluruh provinsi, sebagian kota/kabupaten	Masyarakat pesisir yang kurang berdaya (miskin)	Masih berjalan	- Penyerapan dana belum maksimal - Dana belum bergulir sepenuhnya	Sudah berjalan selama 4 tahun dan akan dilaksanakan lagi pada tahun 2004

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
4.2	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Budidaya Laut di Merauke	- Pembentukan Lembaga Usaha - Penyerahan <i>seed capital</i> - Penyerahan dana - Sosialisasi Program - Sosialisasi Program	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2001	Papua (Kab. Merauke)	Masyarakat Pesisir	Selesai	Tidak ada	Mempunyai potensi untuk terus dikembangkan.
4.3	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Daerah yang Mengalami Tekanan Ekologis di Bali dan Maluku	- Penyuluhan - Pelatihan - Pendampingan - Pembentukan kelompok pelatihan	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2001	Bali dan Maluku	Masyarakat pesisir, khususnya Kelompok Nelayan "Lestari" (Bali) dan KUM "Mina Mandiri" (Maluku)	Selesai	Bali (budidaya ikan kerapu): - Penyediaan ikan kerapu belum dapat dipenuhi secara berkelanjutan - Ukuran ikan beragam - Mutu produk sulit dijaga.	Bali: Potensi pasar ikan kerapu sangat baik sehingga kegiatan ini layak dikembangkan di tempat lain.
4.4	Pemberdayaan Masyarakat melalui Sistem Pengolahan Ikan	- Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) - Pendampingan - Pelatihan - Peningkatan akses modal	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2001 dan 2002	Tahun 2001: Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, Jawa Tengah (4 kota/kab.) Tahun 2002: Jawa Timur (Kab. Malang)	Perempuan pesisir	Selesai	Yang dihadapi pengurus KUB: - Keterbatasan kemampuan, pengetahuan manajerial dan interpretasi di setiap KUB - Tidak/belum adanya simpanan anggota yang tetap - Keterbatasan keuangan/modal anggotanya - Masih rendahnya minat anggota untuk memanfaatkan/mengembangkan KUB	Dapat dilanjutkan pada tahun mendatang dengan lokasi yang berbeda.
4.5	Pemantapan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir melalui Kemampuan Manajerial Usaha Budidaya Rumput Laut	- Pelatihan - Bantuan teknis - Pengembangan manajerial dan pemasaran - Pembentukan kelompok - Pembinaan rutin	Departemen Kelautan dan Perikanan,	Tahun 2001	NTT, Papua, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Banten (1 kota/kabupaten di tiap provinsi)	Masyarakat pesisir	Selesai	Masyarakat kurang menguasai teknologi	Dapat terus dilaksanakan pada tahun mendatang melalui penerapan teknologi tepat guna budidaya rumput laut.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
4.6	Pemantapan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir Melalui Pesantren dan Lembaga Agama Lainnya	- Sosialisasi program - Pembentukan kelompok - Pelatihan - Pemberian dana bantuan langsung - Pendampingan - Pengembangan potensi - Pelaporan	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2001 dan 2003	Th 2001: 7 kabupaten di 5 provinsi (Jabar, Bali, Jatim, Sulut, dan NTT) Th 2003: 4 kabupaten di 4 provinsi (Sumbar, Bali, Jatim, Sulut)	Pondok pesantren dan masyarakat di daerah pesisir	Selesai	Iklim/cuaca laut menghambat aktivitas penangkapan ikan. Hal ini tidak menguntungkan bagi komunitas nelayan yang memanfaatkan pinjaman investasi.	Memungkinkan untuk dikembangkan terus pada lokasi yang berbeda.
4.7	Pengembangan <i>Grameen Bank</i> melalui Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir Mikro Mitra Mina (LKMP-M3)	- Pendampingan - Pelatihan - Pinjaman modal	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2001, 2002 dan 2003	Th 2001: 5 kota/kab di 4 provinsi (Jabar, Jateng, NTT, Maluku Tenggara) Th 2002: 2 kota/kab di 2 provinsi (Banten, Jateng) Th 2003: 4 kota/kab di 4 provinsi (Sumbar, Jatim, Jateng, Banten)	Orang-orang miskin berdasarkan kriteria standar kemiskinan yang digunakan oleh <i>Grameen Bank</i> yaitu kriteria "pendapatan dan aset"	Selesai	Dana yang digulirkan kurang berkembang	Sangat memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahun mendatang pada lokasi sebelumnya ataupun lokasi baru yang berbeda.
4.8	Pengembangan Mina Ventura	- Pelatihan - Pengadaan modal usaha (barang, uang atau jasa) - Pengembangan sistem bagi hasil - Pengembangan pemasaran - Pembinaan manajemen usaha dan teknologi	Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tahun 2001 dan 2002	Jawa Timur, NTT, Bali, Sulawesi Utara, Jawa Tengah	Usaha kecil menengah, koperasi dan kelompok masyarakat pemanfaat	Selesai	Dana bantuan sulit bergulir	Sangat memungkinkan untuk terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
4.9	Program Pemberdayaan Wanita Nelayan	- Pendampingan - Pelatihan - Permodalan - Pengembangan usaha	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2001 dan 2003	Th 2001: 3 kabupaten di Jateng, Jatim, Lampung Th 2003: 3 kabupaten di Jatim, Kalsel, Sulsel	Wanita nelayan	Tahun 2001: selesai; tahun 2003: masih berjalan.	Daerah cakupan terlalu luas	Sangat memungkinkan untuk terus dilanjutkan dan dibuat suatu model pemberdayaan perempuan nelayan
4.10	Pengembangan Alternatif Pendapatan Masyarakat Pesisir di Lokasi Konservasi Terumbu Karang	- Penyusunan Pedoman - Sosialisasi dan Diseminasi Program - Pengembangan kapasitas kegiatan melalui lembaga keuangan Mikro Mitra Mina (M3) - Pemberian dana bergulir	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2002	3 kabupaten di Papua, Banten, Maluku	- Masyarakat pesisir dan pulau kecil yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem terumbu karang - Perempuan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi melakukan usaha	Selesai	- Lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan - Transportasi terbatas	Memungkinkan untuk diteruskan
4.11	Dana Ekonomi Produktif (DEP) Khusus Pengadaan Bahan Bakar Solar bagi Nelayan	Pengadaan bahan bakar solar bagi nelayan	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2003	Seluruh provinsi, sebagian kota/kabupaten	- Nelayan tradisional yang berdomisili di sekitar SPD (<i>Solar-Packed Dealer</i>) nelayan setempat - Nelayan pendatang yang terdaftar pada dinas terkait	Selesai	Tidak ada masalah	Dapat terus berkembang.
4.12	Korporatisasi Nelayan	- Identifikasi lokasi dan kelompok - Pelatihan - Fasilitasi pembentukan badan usaha perikanan - Pendampingan	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2003	6 provinsi, 6 kota/kabupaten	- Masyarakat pesisir - Kelompok masyarakat pemanfaat	Selesai	Tidak ada masalah	Dapat terus dilaksanakan dalam tahun mendatang dengan lokasi yang berbeda

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
4.13	Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi masalah dan sumber permodalan - Penyusunan buku dan leaflet - Workshop - Sosialisasi - Fasilitasi - Monitoring dan evaluasi - Pelaporan 	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2003	6 kota/ kab di Riau, Jabar, Kalbar, Sulsel, dan NTB,	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga perbankan dan penyandang dana lain - Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) M3 - Masyarakat pesisir - Usaha kecil masyarakat pesisir dengan <i>cash flow</i> harian 	Selesai	Tidak ada masalah	Dapat terus dilaksanakan pada tahun mendatang
4.14	Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Praktek usaha ekonomis produktif - Pembentukan kelompok - Pendampingan - Pengadaan modal usaha - Pengembangan pemasaran - Pembinaan 	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2003	Jawa Timur (Kab. Sumenep)	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat desa pesisir. - Perguruan tinggi lokal dan/atau lembaga riset dan lembaga lain (LSM) yang relevan. 	Selesai	Tidak ada masalah	Dapat terus dilaksanakan dalam tahun mendatang pada lokasi yang berbeda
4.15	Pemberdayaan Petani Garam	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kelompok - Penguatan kelembagaan - Pelatihan dan peningkatan SDM - Fasilitasi dan pendampingan - Bantuan langsung masyarakat (modal) - Pembuatan pedoman 	Departemen Kelautan dan Perikanan,	Tahun 2003	Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan	Petani garam	Selesai	Tidak ada masalah	Memungkinkan untuk terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang hingga dapat dibuat model pemberdayaan petani garam

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
4.16	Inventarisasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	- Identifikasi dan analisis teknologi - Diskusi pakar, praktisi, dan LSM - Pembuatan panduan - Pembuatan pilot project - Lokakarya /workshop - Peluncuran <i>web site</i>	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2003	Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan	Masyarakat pesisir	Selesai	Tidak ada masalah	Memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun mendatang pada lokasi yang berbeda
4.17	Tindak Lanjut Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil T.A. 2000-2001	- Survei Lapangan - Penguatan kelembagaan - Pelatihan - Lokakarya - Studi banding	Departemen Kelautan dan Perikanan	Tahun 2002	9 provinsi, 10 kota/kabupaten	Masyarakat pesisir	Selesai	- Penyerapan dana belum maksimal - Dana belum bergulir sepenuhnya	Memungkinkan untuk dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya di lokasi yang berbeda.
5. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)									
5.1	Proyek Peningkatan Peranan Wanita (P2W) di Pendidikan	- Pelatihan - Dana bergulir	Depdiknas, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda	Tahun 1997/1998-1999	Th 1997-1999: 9 provinsi; Tahun 1999: 4 provinsi: Kalbar, NTB, Sulsel, dan Lampung.	- Sasaran Latihan Keterampilan Usaha Wanita (LKUW): wanita miskin dan tidak berdaya - Sasaran Latihan Kepemimpinan Wanita (LKW)/Pusat Kegiatan Wanita (Pusginita): Dharma Wanita Depdiknas kecamatan	Proyek sudah selesai pada tahun 1999, tetapi pada tingkat kelompok masih berjalan.	- Proyek tidak sustainable karena bersifat bertahap dan bergulir. - LKW/Pusginita: peserta pelatihan adalah isteri pejabat, sehingga bila suami pindah, maka istri ikut pindah pula. - LKUW: tidak ada pembinaan sehingga usaha mikro menemui kendala pemasaran.	Ada usaha yang meningkat, ada pula yang tidak.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
5.2	Proyek Subsidi BBM <i>Life Skill Education</i>	- Pelatihan - Bantuan modal	Depdiknas, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda	Tahun 2002- 2003	Tahun 2002: 11 provinsi; Tahun 2003: seluruh provinsi.	Perempuan yang menganggur, miskin dan berada dalam usia produktif	Masih berjalan	Tidak ada masalah	Proyek ini sangat bermanfaat bagi peningkatan usaha mikro.
6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag)									
6.1	Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang <i>Software</i>	Pelatihan	Depperindag Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Elektronika (ILMEA)	Tahun 2002 dan 2003	DKI Jakarta	Mahasiswa tingkat akhir atau baru lulus dari Universitas Gunadarma, yang dikelompokkan dalam kelompok usaha (klaster)	Sudah selesai dilaksanakan	Pada tahun 2002 pihak Ditjen ILMEA mengalami kesulitan menempatkan peserta sesuai spesifikasinya setelah mereka menempuh pelatihan tingkat dasar.	Berpotensi mengembangkan masing- masing kelompok di bidang teknologi informasi.
6.2	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Industri <i>Software</i> Skala Kecil dan Menengah	Pelatihan <i>software</i> komputer	Depperindag Ditjen ILMEA	Juni 2002; Juli 2003	Jawa Barat (Kota Bandung)	Pengusaha kecil dan menengah di bidang <i>software</i> , yang membuat animasi dengan menggunakan komputer.	Selesai	Tidak ada	Meningkatkan jasa layanan UKM yang bergerak di bidang <i>software</i> .
6.3	Pelatihan Teknologi Produksi Industri Alas Kaki	Pelatihan	Depperindag Ditjen ILMEA	Tahun 2002 dan September 2003	5 kota/kab. Di 3 provinsi (Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat)	UKM	- Tahun 2002 telah dilaksanakan - Tahun 2003 akan dilakukan pada bulan September.	Peralatan IFSC yang merupakan bantuan dari Italy belum tersedia hingga Agustus 2003.	Membantu dan meningkatkan usaha kecil dan menengah yang memproduksi alas kaki.
6.4	Peningkatan Kemampuan SDM Bengkel Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	Pelatihan	Depperindag Ditjen ILMEA	Tahun 2002 dan September 2003	Sumatera Barat (kota Padang)	UKM	- Tahun 2002 telah dilaksanakan - Tahun 2003 akan dilakukan pada bulan September.	Tidak ada masalah	Peningkatan UKM di daerah yang berpotensi menghasilkan permesinan, khususnya alat-alat pertanian.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.5	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemeliharaan Mesin Sederhana	Pelatihan	Depperindag Ditjen ILMEA	Tahun 2003	Jawa Barat (kota Bekasi)	Karyawan perusahaan kecil yang mesinnya <i>idlle capacity</i>	Akan dilaksanakan pada bulan September 2003	Belum ada karena belum dilaksanakan	Membuat mesin yang <i>idle capacity</i> dapat bekerja secara optimal sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
6.6	Pengembangan Desain Alsintan di Kalimantan Selatan	Membuat cetak biru <i>prototype</i> alsintan	Depperindag Ditjen ILMEA	Tahun 2003	Kalimantan Selatan (kota Banjar Baru)	UKM perbengkelan	Bulan September 2003	Tidak ada	Pengembangan UKM perbengkelan di Banjar Baru.
6.7	Meningkatkan Pemahaman Peraturan tentang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	Sosialisasi melalui workshop.	Depperindag Ditjen ILMEA	Agustus 2003	4 kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur	UKM di lingkungan industri logam, mesin, elektronika, dan aneka.	Sosialisasi telah dilaksanakan.	Belum ada	Apabila diterapkan oleh masing-masing UKM, hasil workshop akan meningkatkan mutu dan kepercayaan industri di bidang HaKI.
6.8	Temu Usaha Kemitraan Industri Besar dengan Industri Alat Olah Raga Skala Kecil-Menengah	Temu usaha	Depperindag Ditjen ILMEA	Tahun 2003	Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten (6 kabupaten/ kota)	UKM yang membuat <i>shuttle cock</i>	Belum dilaksanakan.	Belum ada masalah karena belum dilaksanakan	Meningkatkan industri peralatan olah raga (<i>shuttle cock</i>)
6.9	Pengembangan Kemitraan Industri Besar dengan IKM Kapal Nelayan	- Kajian - Menyusun pola kemitraan antara industri besar dan industri kecil menengah kapal nelayan - Memberikan bantuan kapal nelayan	Depperindag Ditjen ILMEA	September - November 2003	Maluku Utara	- Nelayan kecil - Industri kecil - menengah kapal nelayan	Masih berjalan	Belum ada, karena upaya ini masih dalam tahap kajian	Meningkatkan pendapatan para nelayan di wilayah tersebut

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.10	Klinik Konsultasi Pembiayaan Ekspor ke UKM/ Bimbingan Tata Laksana Konsultasi Ekspor bagi UKM	- Bimbingan - Konsultasi	Depperindag Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen PLN)	Tahun 1999-2003	1999: 2 provinsi (2 kota/kab) 2000: 4 provinsi (5 kota/kab) 2001: 5 provinsi (5 kota/kab) 2002: 7 provinsi (7 kota/kab) 2003: 11 provinsi (11 kota/kab)	UKM di masing-masing wilayah	Masih berjalan	- Peserta sulit memahami prosedur ekspor walaupun sudah diberi pengarahan - UKM sulit mengakses perbankan karena terbentur agunan	
6.11	Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000	- Seminar peduli mutu - Pelatihan - Konsultasi	Depperindag Ditjen PLN	Tahun 2001-2003	2001: 5 daerah; 2002: Medan, Jabotabek, Yogyakarta, Bali; 2003: Surabaya, Semarang.	UKM	Masih berjalan	- Kualitas UKM (seperti manajemen dan produknya) masih kurang - Banyak UKM yang mengundurkan diri di tengah pelaksanaan upaya	Apabila ISO 9000 tercapai UKM akan mampu bersaing dalam hal mutu dan pemasaran sesuai dengan standar pasar internasional
6.12	Proyek Peningkatan Peranserta Wanita (P2W) di Bidang Perdagangan	- Penataran /penyuluhan - Temu usaha - Konsultasi usaha - Partisipasi pameran Hari Ibu (PHI)	Depperindag Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN)	Tahun 1992/1993 - 1998/1999	- Desa / kecamatan di Pulau Jawa - Ibukota kabupaten di luar Pulau Jawa	- Perempuan pedagang golongan ekonomi lemah - Perempuan yang menjadi tokoh masyarakat setempat - Wakil kelompok perempuan atau KUB yang menjadi binaan P2W departemen sektoral	Sudah selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.13	Lembaga Pembinaan Terpadu, Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT INDAK)	Tahun 1998/1999: penyaluran dana (pinjaman/dana bergulir) Tahun 2000 - sekarang: perguliran oleh LPT INDAK: - Pembinaan /pelatihan - Pemberian modal bergulir	Depperindag , Ditjen IKDK (Th 1998/1999 - 1999) LPT INDAK (Th 2000 – sekarang)	- TA 1998/1999 dan 1999: penyaluran - Th 2000 - sekarang: perguliran	23 provinsi (yang aktif 15 provinsi)	Industri kecil dan pedagang kecil.	Selesai	- Beberapa pengusaha tidak disiplin mengembalikan pinjaman. - Kendala teknis dihadapi oleh masing-masing LPT provinsi.	Berpotensi cukup besar dalam mengembangkan usaha kecil dan mikro asalkan disertai dengan pembinaan
6.14	Pengembangan Kerjasama Pasar Modern dengan Pedagang Informal dalam Rangka Memperluas Sarana Tempat Usaha Pedagang Kecil (UDK) (Proyek Pengembangan Dagang Kecil -PDK)	- Identifikasi sarana dagang non-produsen - Koordinasi pemanfaatan sarana dagang non-produsen - Penyusunan pedoman pemanfaatan sarana dagang bagi pedagang kecil non produsen	Depperindag Direktorat Jenderal Industri Kecil-Menengah (IDKM)	Januari-Desember 2001		Pedagang kecil non-produsen	Selesai		
6.15	Pengembangan Kelembagaan Pembinaan UDK (Proyek PDK)	Pembentukan forum konsultasi lembaga pembina UDK	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		- Langsung: lembaga pembina UDK - Tidak langsung: usaha dagang kecil	Selesai		
6.16	Peningkatan Mutu Sarana Pasar Hasil Industri untuk Mendukung Perluasan Pasar Produsen (Proyek PDK)	- Identifikasi sarana dagang yang potensial untuk dikembangkan - Koordinasi dalam penataan dan penyusunan sarana dagang dengan instansi terkait	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		Produsen industri kecil	Selesai		
6.17	Pengembangan Sistem Pemasaran Hasil Pertanian di DKI Jakarta (Proyek PDK)	Penetapan sistem pemasaran melalui <i>warehouse</i>	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		Petani dan pedagang kecil	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.18	Bantuan Tenaga Ahli untuk Pengembangan UKM (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil - PKUK)	- Penyempurnaan program UDK - Penyusunan kebijakan IKDK	Depperindag Sesditjen IKDK	Januari-Desember 2001		- Langsung: IKDK - Tidak langsung: usaha kecil dan menengah	Selesai		
6.19	Assesment Kemampuan Penerapan Teknologi Tepat Guna/Teknologi Maju UKM-Indag Kerjasama dengan Perguruan (Proyek - PKUK)	Penyusunan matrik penerapan teknologi pada UKM-Indag per komoditi	Depperindag Sesditjen IKDK	Januari-Desember 2001		Tidak langsung: UKM	Selesai		
6.20	Pengembangan Industri Kulit Pendukung Pendirian IFFC Bantuan Italia (Proyek PKUK)	Pemantauan dan evaluasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2000		Usaha kecil	Selesai		
6.21	Pembinaan dan Pengembangan GKM (Proyek PKUK)	- <i>Workshop</i> - <i>Monitoring</i>	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2000		Usaha kecil	Selesai		
6.22	Pemasyarakatan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah yang Prioritas dan Strategis bagi Usaha Industri Kecil Pangan (Proyek PKUK)	- Lokakarya lintas sektoral - Sosialisasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		Industri kecil pangan	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.23	Pengembangan UKM-Indag (Proyek PKUK)	- Dana bergulir - Pendampingan - Bantuan sarana kelembagaan (UPK dan LPT Indag-Propinsi)	Depperindag Sesditjen IKDK	Januari- Desember 2001	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bengkulu	UKM	Selesai		
6.24	Bimbingan Penyusunan Proposal Kelayakan Usaha (Proyek PKUK)	- Pemilihan UKM-Indag yang prospektif - Pemilihan konsultan penyusun proposal - Pengumpulan data/informasi - Penyusunan proposal usaha - Diseminasi kepada Perbankan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2001		UKM	Selesai		
6.25	Penguatan Kelembagaan Pembina UKM-Indag (Proyek PKUK)	- Sosialisasi program dana bergulir - Pelatihan dan bantuan tenaga ahli (<i>resident consultant</i>) - <i>Monitoring</i> dan evaluasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2001		- Langsung: lembaga pembina UKM-Indag - Tidak langsung: UKM-Indag	Selesai		
6.26	Penumbuhan Kewirausahaan Pada Lembaga Keagamaan/Pontren Melalui TOT AMT (Proyek PKUK)	Pelaksanaan ToT AMT	Depperindag Sesditjen IDK	Juli- September 2000		Pondok pesantren	Selesai		
6.27	Inisiasi WUB (Proyek PKUK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2000		80 tenaga kerja yang mengalami PHK	Selesai		
6.28	Peningkatan Kapabilitas Kewirausahaan UKM (Proyek PKUK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2000		80 wira usaha baru (WUB) terpilih	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.29	Penguatan Kelembagaan UPK Kabupaten/Kota dalam Penyaluran Dana Bergulir (Proyek PKUK)	- Sosialisasi UPK ke kab/kota - Penyusunan panduan lembaga UPK kab/kota	Depperindag Sesditjen IKDK	Januari- Desember 2000		- Langsung: UPK - Tidak langsung: UKM-Indag	Selesai		
6.30	Pemutakhiran Informasi Hasil Litbang Perindag dalam Pemecahan Masalah Teknologi (Proyek PKUK)	Penyebarluasan hasil-hasil litbang untuk UKM	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2000		UKM	Selesai		
6.31	Fasilitasi Pengembangan Minyak Atsiri Nasional (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah -PIKM)	Fasilitasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2001		Produsen minyak atsiri	Selesai		
6.32	Fasilitasi Pengembangan Gambir Nasional (Proyek PIKM)	Fasilitasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2001		Produsen gambir	Selesai		
6.33	Pengembangan Industri Kelapa Sawit Terpadu (Proyek PIKM)	- Diseminasi teknologi - Bantuan tenaga ahli - Promosi dan informasi pasar - Fasilitasi /koordinasi pihak-pihak terkait - Monitoring dan evaluasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2001		Produsen minyak goreng kelapa sawit skala kecil.	Selesai		
6.34	Pengembangan Industri Garam Rakyat (Proyek PIKM)	Pembuatan modul pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2001	9 provinsi (Selatan)	UKM garam	Selesai		
6.35	Pengembangan UKM Barang Karet (Proyek PIKM)	Penyusunan buku panduan pengembangan mutu barang-barang karet.	Depperindag Ditjen IDKM	Februari- Desember 2001	Sumut, Lampung, Jabar, Jatim, Kalsel	UKM produsen barang-barang karet	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.36	Pengembangan UKM Pestisida Organik (Proyek PIKM)		Depperindag Ditjen IDKM	Februari-Desember 2001	Sumut, Sumbar, Lampung, Jawa, Sulsel	Wirausaha	Selesai		
6.37	Pengembangan UKM Pupuk (Proyek PIKM)	Mengadakan temu usaha	Depperindag Ditjen IDKM	Februari-Desember 2001		UKM pupuk	Selesai		
6.38	Peningkatan Mutu Kemasan Produk Industri Kecil Pangan (Proyek PIKM)	- Bimbingan - Bantuan bahan dan peralatan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2000		Industri kecil pangan	Selesai		
6.39	Bantuan Tenaga Ahli dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan IK-LME (Proyek PIKM)	- Konsultasi bimbingan/pelatihan - Monitoring dan evaluasi - Menentukan komoditas unggulan IK-LME	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001	14 provinsi	IK LME (Industri Kecil Logam, Elektronika dan Mesin)	Selesai		
6.40	Peningkatan Pemanfaatan Limbah Pertanian untuk Pengembangan Industri Pulp (Proyek PIKM)	- Penyusunan draft pemanfaatan limbah pertanian - Workshop - Uji coba lapangan - Sosialisasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		Masyarakat peminat industri pulp skala kecil	Selesai		
6.41	Pemasyarakatan Kemitraan Usaha IK Sanlita dengan Usaha Besar (Proyek PIKM)	- Identifikasi dan inventarisasi kelompok sasaran pelaksanaan kemitraan - Temu usaha/bisnis	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		IK Sanlita	Selesai		
6.42	Pengembangan Aliansi Usaha Produk Kayu Olahan Pasar Ekspor (Proyek PIKM)	- Pembuatan buku panduan - Pembentukan aliansi usaha	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		IKM produsen kayu	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.43	Pengembangan Aliansi Usaha Produk Barang Jadi Rotan Pasar (Proyek PIKM)	Pembuatan buku panduan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		IKM produsen barang jadi rotan pasar	Selesai		
6.44	Pengembangan Distribusi Pengadaan Bahan Baku untuk Mendukung Pusat Pemasaran (Proyek PIKM)	Identifikasi kemampuan daerah penghasil rotan (bahan baku) dan jenis rotan yang dihasilkan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		IKM produsen rotan	Selesai		
6.45	Peningkatan Pemanfaatan Skim Kredit UKM/Permodalan UKM (Proyek PIKM)	- Workshop - Penyusunan sistem perguliran dana industri kecil/rumah tangga kab/kota - Pemasyarakatan	Depperindag Sesditjen IKDK	Januari-Desember 2001		UKM indag	Selesai		
6.46	Fasilitasi Kelancaran Pengadaan Bahan Baku (Kayu,Emas, Perak) (Proyek PIKM)	- Temu usaha - Penyusunan kerjasama	Depperindag Sesditjen IKDK	Januari-Desember 2001		UKM indag	Selesai		
6.47	Pengembangan Pola Kerjasama UKM-Indag Antar Negara Asean (Proyek PIKM)	- Pemasyarakatan pola kerjasama UKM antar ASEAN - Analisis tingkat kemampuan UKM representatif - Penyusunan hasil evaluasi kesiapan UKM menghadapi AFTA	Depperindag Sesditjen IKDK	Januari-Desember 2001		UKM Indag	Selesai		
6.48	Penyusunan Informasi Peralatan dan Mesin Industri Kecil Pangan (Proyek PIKM)	Penyusunan informasi mesin dan peralatan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		IK pangan	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.49	Penyusunan Modul Pelatihan Pembuatan Arang Briket (Proyek PIKM)	Pembuatan modul peningkatan teknologi pembakaran	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001	7 provinsi	IKM produsen arang briket	Selesai		
6.50	Penyusunan Materi Bimbingan Penerapan Sikap Kerja 5-K/5-S (Proyek PIKM)	Penyusunan materi 5-K/5-S	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		- Tidak langsung: IK LME - Langsung: pembina pengrajin	Selesai		
6.51	Penyusunan Katalog Mesin dan Peralatan Pengolah Hasil Produk Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Proyek PIKM)	- Menyusun katalog - Menyebarkan dan mengadakan desiminasi ke sentra hasil pengolahan pertanian dan perkebunan - Menyusun laporan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		IKM	Selesai		
6.52	Penyusunan Katalog Pakaian Jadi Wanita Dewasa (Proyek PIKM)	- Mengumpulkan data dan informasi - Menyusun /mencetak katalog mesin/peralatan - Distribusi katalog ke daerah	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		IKM produsen pakaian jadi dewasa	Selesai		
6.53	Penyusunan Informasi Pakaian Jadi (Proyek PIKM)	- Inventarisasi dan identifikasi pola dan desain - Pemberian informasi mengenai pola, teknik pengerjaan bahan/tekstil.	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		IKM pakaian jadi	Selesai		
6.54	Peningkatan Promosi Pasar Hasil Ikra (Proyek PIKM)	- Pengiriman tenaga ahli - Supervisi / evaluasi - Penyusunan laporan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2001		Industri kecil rumah tangga dan kerajinan	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.55	Pelatihan Peningkatan Pemanfaatan Minyak Atsiri (Proyek Pengembangan Kemandirian Usaha Kecil dan Menengah -PKUKM)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		Produsen minyak atsiri	Selesai		
6.56	Percepatan Peningkatan Daya Saing Minyak Atsiri (Proyek PKUKM)	Workshop	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002	Jawa Barat	Petani/perajin (60 orang)	Selesai		
6.57	Bantuan Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk (Proyek Peningkatan Peran Serta Wanita Bidang Industri dan Perdagangan - P2W Indag)	- Bimbingan dan penyuluhan - Bantuan peralatan - Penyebaran informasi perkembangan desain dan diversifikasi produk	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2002	20 provinsi	Wanita perajin di pedesaan yang tergabung dalam KUB	Selesai		
6.58	Pelatihan Pedagang Eceran di Daerah (P2W Indag)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2002	1 provinsi	Wanita terkena PHK dan putus sekolah.	Selesai		
6.59	Partisipasi Pameran dan Uji Coba Pasar Dalam Rangka Promosi Pasar Hasil Produksi KUB P2W Indag (P2W Indag)	Pameran	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2002	10 provinsi	KUB dari desa binaan	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.60	Pameran Produk Industri Kecil Pangan yang Telah Diproduksi dengan Baik (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil -PIK)	- Pameran - Temu usaha	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2002		IK pangan	Selesai		
6.61	<i>Training Of Trainer</i> Bidang GMP Untuk Aparat Lembaga Pembina IDKM Pangan dan LSM (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2002		- Langsung: aparat lembaga pembina IDKM pangan dan lsm - Tidak langsung: IDKM pangan	Selesai		
6.62	Peningkatan Keamanan Pangan dan Pencanaan Gerakan yang Baik dan Benar Industri Kecil Pangan (Proyek PIK)	- Sosialisasi dan bimbingan - Penyusunan pedoman penerapan GMP	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2002		IKM pangan	Selesai		
6.63	Pelatihan Produksi Bersih Bagi IKM Pangan (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2002		IDKM pangan	Selesai		
6.64	Fasilitasi Peningkatan Kemasan Produk Industri Kecil Pangan (Proyek PIK)	- Bimbingan dan konsultasi - Bantuan bahan-alat pengemasan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2002		IK pangan	Selesai		
6.65	Penyusunan Konsepsi Sertifikasi Peningkatan Sistem Keamanan Pangan Produk Industri Kecil Pangan (Proyek PIK)	- Penyusunan konsep sertifikasi - Sosialisasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari- Desember 2002	5 ibukota provinsi	Rumah makan, pedagang dan industri pengolahan	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.66	Peningkatan Kemitraan Bisnis IK Pangan dengan Supermarket/Ekspor tir dan Perhotelan (Proyek PIK)	Temu usaha	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IK pangan	Selesai		
6.67	Fasilitasi Pembinaan dan Kerjasama IDKM Pangan dengan BUMN dan Perusahaan Besar (Proyek PIK)	Pembinaan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IDKM	Selesai		
6.68	Pengembangan IDKM Melalui Pondok Pesantren (Proyek PIK)	Pelatihan kewirausahaan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		Santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren.	Selesai		
6.69	Pelatihan Teknik Pencelupan dan Pewarnaan dengan Menggunakan Zat Warna Nabati (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		Pengusaha industri kecil sandang	Selesai		
6.70	Pelatihan TOT Fasilitator Teknologi Produksi Bersih pada Industri Pencelupan dan Industri Penyamakan Kulit (Proyek PIK)	- Pelatihan - Workshop	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		- Langsung: tenaga penyuluh di bidang TPB - Tidak langsung: IK pencelupan dan penyamakan kulit	Selesai		
6.71	Magang Kerja Pengusaha Penyamakan Kulit (Non-konvensional) dalam Rangka Pengembangan IKM Penyamakan Kulit (Proyek PIK)	Magang kerja	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IKM penyamakan kulit	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.72	Pilot Project Peningkatan Mutu Persuteraan di Sulawesi Selatan (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IK produsen sutera	Selesai		
6.73	Pemasyarakatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu pada Industri Barang Jadi Kulit (Proyek PIK)	- Bimbingan - Sosialisasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IKM penyamakan kulit	Selesai		
6.74	Pelatihan Pengembangan Industri Kecil Sabut Kelapa (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Tahun 2002		IKM produsen sabut kelapa	Selesai		
6.75	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Pembuatan Arang Briket (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Desember 2002	Jawa Barat, DIY	Perajin arang tempurung	Selesai		
6.76	Pelatihan Desain dan Peningkatan Mutu Produk Barang Jadi Rotan (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002	Jawa Barat (Cirebon)	Perajin rotan	Selesai		
6.77	Pengembangan Pola Distribusi Pengadaan Bahan Baku untuk Mendukung Pusat Pemasaran Hasil Rotan di Cirebon (Proyek PIK)	- Identifikasi kemampuan daerah penghasil rotan (bahan baku) di 6 wilayah - Identifikasi industri kecil barang jadi rotan di Cirebon	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002	Jawa Barat	IK rotan	Selesai		
6.78	Fasilitasi Penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) pada Industri Kecil (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		30 petani gambir	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.79	Pengembangan E-Trade Industri dan Dagang Kecil Menengah (Proyek PIK)	Pembuatan program/software <i>market place</i> dan model bisnis pengoperasian untuk IDKM pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, serta kerajinan.	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		Industri dan dagang kecil dan menengah	Selesai		
6.80	Peningkatan Kemampuan Bengkel Kendaraan Bermotor Kecil Menengah (Proyek PIK)	Workshop peningkatan kemampuan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		Perbengkelan umum kendaraan bermotor kecil menengah	Selesai		
6.81	Diseminasi Teknologi Tepat Guna Peralatan Proses Minyak Kelapa Sawit, Kelapa dan Sutera (Proyek PIK)	Temu usaha	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IK minyak sawit, kelapa dan sutera	Selesai		
6.82	Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu ISO-9000 pada Industri Mesin Pertanian (Proyek PIK)	Bimbingan konsultasi/sosialisasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		Industri mesin pertanian	Selesai		
6.83	Partisipasi IDKM Logam dan Elektronika dalam Pameran Pusat (Proyek PIK)	Pameran	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IDKM logam dan elektronika	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.84	Pengembangan Perangkat Lunak dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh IKM (Proyek PIK)		Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IKM	Selesai		
6.85	Pameran ICRA 2002 (Proyek PIK)	Pameran	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IK interior dan kerajinan	Selesai		
6.86	Penyusunan Direktori <i>Handycraft</i> Indonesia (Proyek PIK)	Penyusunan direktori	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		Pengusaha IDKM kerajinan yang potensial	Selesai		
6.87	Uji Coba Pasar Produk Kerajinan Unggulan (Proyek PIK)	Pameran	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		IK kerajinan	Selesai		
6.88	Penyusunan Manual Teknologi dan Desain Tenun Tradisional (Proyek PIK)	Penyusunan manual teknologi dan desain tenun tradisional	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2001		IK tenun	Selesai		
6.89	Penyusunan Manual Teknologi dan Desain Batik (Proyek PIK)	Penyusunan manual teknologi dan desain batik	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2001		IK batik	Selesai		
6.90	Penyusunan Manual Teknologi dan Desain Anyaman (Proyek PIK)	Penyusunan manual teknologi dan desain anyaman	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2001		IK anyaman	Selesai		
6.91	Penyusunan Manual Teknologi dan Desain Perhiasan Perak (Proyek PIK)	Penyusunan manual teknologi dan desain perhiasan perak	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2001		IK perhiasan perak	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.92	Pelatihan Fasilitator HaKI IKDM bagi Pemula (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2002		- Aparat dan pengusaha industri pedagang kecil menengah - Asosiasi.	Selesai		
6.93	Pelatihan Penulisan Dokumen Paten Tingkat Menengah (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		UKM	Selesai		
6.94	Pelatihan Penerapan Sistem Mutu (Proyek PIK)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2002		- Langsung: aparat pembina IDKM - Tidak langsung: pengusaha IDKM	Selesai		
6.95	Peningkatan Teknis Proses Produksi dan Bantuan Tungku bagi Industri Kecil Keramik (Proyek PIK)	Pemberian bantuan tungku dan bantuan teknik produksi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002	Jawa Barat, DIY	IK keramik	Selesai		
6.96	Peningkatan Teknis Proses Produksi Melalui Bantuan Alat Pengering Kayu (Proyek PIK)	Pemberian bantuan alat pengering kayu	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002	DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur		Selesai		
6.97	Peningkatan Teknis Proses Produksi Melalui Bantuan Alat Pengering Bambu (Proyek PIK)	Pemberian bantuan alat pengering bambu	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2002	Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur	Industri kecil anyaman bambu	Selesai		
6.98	Sosialisasi HaKI bagi UKM (Proyek PIK)	- Apresiasi - Penyebaran <i>booklet</i> / <i>leaflet</i> - Bimbingan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2002	20 provinsi	UKM	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.99	Temu Usaha Kemitraan Pengusaha Kerajinan Dalam Rangka Ekspor (Proyek PIK)	Fasilitasi kemitraan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2002		Pengusaha kerajinan	Selesai		
6.100	Fasilitasi Restrukturisasi Mesin/Peralatan Peningkatan Teknologi Tepat Guna Sutera Alam (Proyek Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah - PIKM)	- Penyusunan kelayakan Sentra - Bimbingan penyuluhan - Bantuan mesin/peralatan pemintalan/pertenuunan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2003	Jawa Barat (Kab. Bandung, Garut); Jawa Timur (Gresik)	IKM di bidang pemintalan dan pertenuunan	Masih berjalan		
6.101	<i>Pilot Project</i> Pengembangan Pemanfaatan Waste (Limbah) Kokon Sutera (Proyek PIKM)	Pemberian bantuan peralatan <i>hand spun</i> dan <i>rewinding</i> tangan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan	Perajin pemintalan sutera	Masih berjalan		
6.102	Pengembangan Teknologi Konservasi Ikan (Proyek PIKM)	- Bimbingan langsung - Pengembangan konservasi ikan (bantuan peralatan, fasilitasi)	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	Jawa Barat (Kab Sukabumi)	Pengelola/pengusaha tepung ikan (8 unit usaha)	Masih berjalan		
6.103	Pengembangan <i>Business Development Service</i> (BDS)/LP-IDKM (Proyek PIKM)	Bimbingan pengelolaan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	10 provinsi	UPT di bidang pertenuunan dan pemintalan	Masih berjalan		
6.104	Pengembangan Kelaikan Kapal dan Motorisasi Kapal Nelayan (Proyek PIKM)	- Penyusunan panduan - Magang	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Bali	Usaha kecil perbaikan kapal nelayan	Masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.105	Peningkatan Keterampilan Teknis Batu Mulia (Proyek PIKM)	- Pelatihan - Pemberian bantuan mesin/alat	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2003		Perajin batu mulia	Masih berjalan		
6.106	Pengembangan IKM di Propinsi NAD (Proyek PIKM)	- Pelatihan - Magang - Pemberian bantuan peralatan/mesin - Studi banding	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	NAD (9 kota/kab)	IKM	Masih berjalan		
6.107	Peningkatan Mutu Produk IKM Pangan (Proyek PIKM)	- Temu konsultasi uji BTP - Pelatihan TOT <i>cleaner production</i>	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003		Aparat dan lembaga pembina IKDM	Masih berjalan		
6.108	Fasilitasi Sertifikasi SNI Pupuk IKM (Proyek PIKM)	Fasilitasi	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	6 provinsi	IKM pupuk	Masih berjalan		
6.109	Pelatihan Pengembangan Desain Mebel Kayu (Proyek PIKM)	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	Jawa Tengah; Jawa Timur	Perajin mebel kayu (50 orang)	Masih berjalan		
6.110	Forum Komunikasi Pengembangan IKM Pupuk dalam Mengatasi Hambatan Pemasaran (Proyek PIKM)		Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	DI Yogyakarta	IKM pupuk	Masih berjalan		
6.111	Pengembangan Industri Kecil Menengah Gula Merah (Proyek PIKM)	Bantuan teknis berupa peralatan pengolahan gula merah	Depperindag Ditjen IDKM	Januari-Desember 2003	Lampung; Sulawesi Selatan	IKM gula merah	Masih berjalan		
6.112	Bantuan Langsung Peningkatan IKM "at Company Level" (Proyek PIKM)	Pembinaan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2003	20 provinsi	IKM yang berorientasi ekspor	Masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.113	Pengembangan IKM Pengolahan Jamur Pangan (Proyek PIKM)	Bimbingan teknis dan manajemen	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2003	Jawa Barat (Kab. Karawang)	IKM pengolahan jamur pangan	Masih berjalan		
6.114	Partisipasi Pengembangan IKDM Melalui Pondok Pesantren (Proyek PIKM)	TOT CEFE	Depperindag Seditjen	Maret-Desember 2003	Jawa Timur; Sumatera Utara; Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; NAD	Pondok pesantren yang prospektif	Masih berjalan		
6.115	Pengembangan Pasar Spesifik Produk Pangan Ciamis (Proyek PIKM)	Pembangunan pusat pemasaran bersama produk pangan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret-Desember 2003	Jawa Barat (Kab. Garut, Tasikmalaya, Ciamis)	IK pangan	Masih berjalan		
6.116	Lokakarya Fasilitasi Pengembangan P2W IDKM	Lokakarya	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2002;	15 provinsi	Aparat pembina P2W kabupaten/kota dan provinsi; KUB; Pelaku ekonomi (BUMN, UKM)	Masih berjalan	Dengan otonomi daerah, dinas perindustrian dan perdagangan pemda tidak mengetahui jumlah KUB di wilayahnya.	
6.117	Pendidikan dan Latihan Motivator KUB bidang IDKM	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2002;	15 provinsi	25 wanita calon motivator	Selesai		
6.118	Penyuluhan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama P2W bidang IDKM	- Penyuluhan dan bimbingan - Konsultasi	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2003	15 provinsi	KUB P2W IDKM di daerah	Masih berjalan		
6.119	Diklat Ketrampilan Teknis	- Pendidikan keterampilan - Bantuan bahan - Bantuan peralatan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2002	15 provinsi	KUB binaan baru dengan komoditi kerajinan, sandang, pangan	Selesai		
6.120	Pengembangan Desain	Bantuan bimbingan pengembangan desain dan diversifikasi produk	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2002	15 provinsi	25 KUB binaan dengan komoditi kerajinan, sandang, pangan	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.121	Uji Coba Pasar dan Partisipasi Pameran Hari Ibu	- Inventarisasi KUB yang layak untuk diikuti dalam Pameran - Seleksi barang untuk Pameran - Pengiriman barang ke lokasi Pameran - Monitoring selama Pameran	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2002	15 provinsi	25 KUB binaan, instansi pembina P2W IDKM	Selesai		
6.122	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program P2W Bidang IDKM di Daerah	- Pemantauan - Penilaian	Depperindag Ditjen IDKM	Maret – Desember 2002	15 provinsi	Instansi pembina di daerah dan KUB binaan	Selesai		
6.123	Pengembangan Wirausaha Baru melalui Pembentukan dan Pembinaan KUB P2W Bidang IDKM	Bimbingan pengelolaan KUB di 15 provinsi	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2003	15 provinsi	KUB	Masih berjalan	Dengan otonomi daerah, dinas perindustrian dan perdagangan pemda tidak mengetahui jumlah KUB di wilayahnya.	Menunjang pengembangan IKM dan program penunjang/lintas sektoral, yaitu peningkatan kemampuan manajemen usaha, dan pengembangan wirausaha baru.
6.124	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Latihan Motivator KUB Bidang IDKM	Pelatihan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2003	15 provinsi	15 calon motivator KUB P2W IDKM daerah	Masih berjalan		Menunjang program pokok pengembangan IKM dan program penunjang/lintas sektoral, yaitu peningkatan kemampuan/ pengembangan SDM.
6.125	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Diklat Ketrampilan Teknis	- Pendidikan ketrampilan - Bantuan peralatan dan bahan	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2003	15 provinsi	15 KUB di 15 provinsi	Masih berjalan		Menunjang program pokok pengembangan IKM dan program penunjang /lintas sektoral, yaitu peningkatan/pengembangan SDM

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
6.126	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pengembangan Desain	Bimbingan pengembangan desain dan diversifikasi produk	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2003	15 provinsi	500 perajin di 15 KUB	Masih berjalan		Menunjang program pokok pengembangan IKM dan program penunjang /lintas sektoral, yaitu peningkatan kemampuan/pengembangan sumber dayaa manusia, dan pengembangan desain
6.127	Fasilitasi Ketersediaan Pasar dan Informasi melalui Penyusunan Rencana Teknis Program Pengembangan P2W Bidang IDKM	Workshop	Depperindag Ditjen IDKM	Maret - Desember 2003	15 provinsi	Aparat pembina IDKM provinsi/kabupaten/kota	Masih berjalan		- Menambah fasilitator di daerah - Menunjang pengembangan IKM yaitu penyusunan program pendukung

7. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
7.1	Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	Tahap I: - Kredit modal kerja bergulir - Hibah prasarana dan sarana dasar lingkungan - Penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan Tahap II: - Pengembangan masyarakat dan kapasitas Pemda - Penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). - Penyediaan dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Tahap I : 1999-2001 Tahap II : 2002-2004	Tahap I : 5 provinsi, 59 kota/kab Tahap II : 13 provinsi, 79 kota/kab	Masyarakat miskin di tingkat kelurahan	Masih berjalan	- Masyarakat kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan - Keterlibatan pemda dalam kegiatan proyek tidak terlalu besar Pembinaan dan keberlanjutan memerlukan biaya besar - Belum ada sumber dana lain.	- Proyek sangat berpotensi mengembangkan usaha mikro - BKM merupakan ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan salah satu akses peningkatan kesejahteraan masyarakat - BKM dapat dikembangkan menjadi pusat pengembangan berbagai sektor, terutama ekonomi mikro - BKM berpotensi sebagai lembaga masyarakat untuk pengembangan good governance tingkat lokal.
8. Departemen Pertanian (Deptan)									

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.1	Program Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu (<i>Participatory Integrated Development in Rain-Fed Areas - PIDRA</i>)	Pengembangan masyarakat yang berperspektif jender: - Penguatan kelembagaan kelompok - Pengelolaan dana umum kelompok - Penggunaan simpan pinjam modal kelompok - Penyaluran dana hibah prestasi mandiri Pembangunan pertanian dan ternak: - Pengembangan tanaman pangan dan perkebunan - Pengembangan peternakan - Konservasi tanah	Departemen Pertanian, Badan Bimas Ketahanan Pangan (koord. nasional)	Tahun 2001-2004	3 provinsi: Jawa Timur (6 kab., 225 desa); NTB (3 kab., 75 desa); NTT (95 kab., 200 desa)	Kelompok mandiri yang beranggotakan masyarakat miskin	Masih berjalan	- Di Jawa Timur, kegiatan program masih terfokus pada pengembangan masyarakat dan jender. - Kegiatan kebun kelompok sebagai usaha bersama belum memperhatikan aspek kualitas. - Penyakit ternak dan kesulitan dalam mendapatkan pupuk, benih/bibit dan peralatan pertanian.	
8.2	Pengembangan Pangan Lokal (Program Penganekaragaman Pangan)	Pemberian dana BLM, digunakan untuk : - Peningkatan kesadaran dan motivasi - Pelatihan dan praktek - Penguatan modal	Departemen Pertanian, Badan Bimas Ketahanan Pangan, Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan	TA 2003	26 provinsi. Lokasi pengembangan pangan lokal disesuaikan dengan komoditas unggulan masing-masing wilayah.	Kelompok petani dengan kriteria : - Keluarga petani kecil berpenghasilan rendah - Ketahanan pangan keluarga rendah - Pelaku usaha yang gigih - Belum pernah mendapat bantuan proyek	Masih berjalan		- Potensi pangan nabati dan hewani yang cukup kaya dan beragam, tersebar di laut, danau dan hutan serta ekosistem lainnya - Berbagai sumber pangan lokal yang dimiliki seluruh wilayah masih dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah tersebut.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.3	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan (Program Penganekaragaman Pangan)	Pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat, yang digunakan untuk : - Peningkatan kesadaran dan motivasi - Pelatihan/kursus - Penguatan modal (diharapkan dapat digulirkan sesuai musyawarah dan kesepakatan kelompok)	Departemen Pertanian, Badan Bimas Ketahanan Pangan, Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan	TA 2003	23 provinsi	Kelompok wanita tani-nelayan dengan kriteria : - Keluarga petani kecil berpenghasilan rendah - Ketahanan pangan keluarga rendah - Pelaku usaha yang gigih - Belum pernah mendapat bantuan proyek	Masih berjalan		
8.4	Program Pengembangan Hortikultura	Pengembangan komoditas unggulan yang telah ditetapkan: - Pembinaan penangkar (Pengembangan informasi perbenihan dan Pemasyarakatan penggunaan benih bermutu) - Pengembangan kelembagaan usaha - Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal usaha	Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura (Ditjen BPH)	Sejak Tahun 2000	31 provinsi	Petani/kelompok tani	Masih berjalan	- Pedoman umum terlambat diterima dan informasi yang disampaikan tidak menyeluruh - Ada indikasi kesalahan target penerima BLM tahun 2002 - Tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan pola BLM	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.5	Proyek Pengembangan Kawasan Industri Perkebunan (KIMBUN)	KIMBUN PUSAT - Penerapan teknologi peningkatan produktivitas tanaman - Pemberdayaan petani KIMBUN DAERAH - Bantuan usaha ekonomi produktif - Pengembangan UPH tanaman - Pendidikan dan pelatihan teknis - Penyuluhan dan penyebaran informasi - Pengembangan usaha tani	Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan	Tahun 2002 dan 2003	Tahun 2002: 29 provinsi. Tahun 2003: 29 provinsi.	Petani/kelompok tani dengan basis komoditi perkebunan	Masih berjalan		
8.6	Proyek Pengembangan Usaha Tani dan Ternak di Kawasan Timur Indonesia (PUTKATI)	- Penyebaran ternak sapi dan kambing kepada petani - Penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang - Penyebaran agroinput - Penyediaan fasilitas penunjang - Peningkatan kelembagaan petani - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas proyek melalui pelatihan dan penyuluhan - Pengembangan produksi vaksin penyakit jembrana - Penyediaan jasa konsultan	Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan	Tahun 1996 - Desember 2002; Tahun 2003	Sulawesi Selatan (4 kab.); Sulawesi Utara (Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo); Maluku (Maluku Utara)	Petani/kelompok tani	Selesai	- Pembinaan kurang intensif - Dinamika kelompok tidak berjalan baik - Ada persepsi jika ternak mati maka kelompok bubar - Tingginya angka kematian - Terjadi penjualan ternak oleh Petani - Pencurian ternak - Paket benih sudah kadaluarsa - Kurangnya koordinasi - Pemberian Paket agroinput dianggap hibah - Ada Sasaran tidak mendapat Paket agroinput.	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.7	Peningkatan Kecintaan terhadap Komoditas Hortikultura Nusantara dan Pemanfaatan Peluang Pasar (Program Pengembangan dan Penguatan Pasar Dalam Negeri)	Observasi tentang pengolahan dan pemasaran hasil beberapa komoditi hortikultura	Departemen Pertanian , Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen BP2HP)	Tahun 2001	Jawa Barat, DI Yogyakarta	Petani hortikultura	Selesai	- Pemasaran hasil olahan buah-buahan masih terbatas pada pasar lokal - Produktivitas budidaya tanaman masih rendah - Adanya impor hasil hortikultura - Upah tenaga kerja masih tinggi - Pengolahan paska panen masih tradisional - Belum berfungsinya pasar tempat transaksi yang didirikan Departemen Perdagangan	
8.8	Bimbingan Teknis Penerapan Jaminan Mutu (HACCP) Program Pembinaan Pengembangan Jaminan Mutu	- Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja Jaminan Mutu - Pelatihan - Bimbingan teknis	Departemen Pertanian , Ditjen BP2HP.	Mei - September 2001; Mei - Agustus 2002	Tahun 2001: Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Barat; Tahun Th 2002: Batam-Riau, Sulawesi Selatan, Bali; Tahun 2003: Riau.	Pelaku usaha di bidang sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan.	Selesai	- Kesadaran akan penerapan sistem mutu masih rendah. - Penerapan HACCP belum menyentuh pelaku agribisnis, - Perlunya bimbingan dan pembinaan berkesinambungan	
8.9	Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Program Pengembangan Sistem Jaminan Mutu	Fasilitasi	Departemen Pertanian , Ditjen BP2HP,	Tahun 2002	Jawa Timur (2 kab), Lampung (1 kab), Jawa Barat (3kab)	Pelaku usaha agribisnis	Selesai	- Unit pengolahan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan Fasilitasi dan untuk dapat diusulkan mendapatkan sertifikasi - Sistem jaminan mutu tidak dapat diterapkan karena tidak tersedia dana.	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.10	Apresiasi Teknologi Pengemasan Sayuran Ekspor Program Pengembangan Sarana Pengolahan	Pelatihan	Departemen Pertanian, Ditjen BP2HP	11-12 September 2001	Sumatera Barat (Kab. Agam, Solok, Tanah Datar)	Kelompok tani dan usaha kecil	Selesai		
8.11	Lokakarya dan Pameran Agribisnis Berbasis Biofarmaka, Program Pengembangan Promosi Hortikultura	- Lokakarya dan pameran agribisnis - Penandatanganan MOU pengembangan agribisnis tanaman obat antara pengusaha swasta dengan dengan kelompok tani, koperasi tani dan perguruan tinggi	Departemen Pertanian, Ditjen BP2HP	Nopember 2001		Petani / kelompok tani	Selesai		
8.12	Program Pembinaan Teknologi Pengolahan	1. Apresiasi Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Holtikultura 2. Pertemuan Nasional Pengembangan Agribisnis Lidah Buaya	Departemen Pertanian, Ditjen BP2HP	Upaya 1: Agustus 2002; Upaya 2: Juni 2002	Upaya 1: Sulawesi Selatan (Makasar); Upaya 2: Kalimantan Barat (Pontianak)	Upaya 1: Petani, pengolah hortikultura; Upaya 2: Pelaku agribisnis lidah buaya (petani, kelompok tani, koperasi, pedagang dan industri)	Selesai		
8.13	Apresiasi Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Program Pengembangan Sarana Pengolahan	- Pemberian informasi - Praktek penggunaan alat dan pengolahan beberapa produk hortikultura	Departemen Pertanian, Ditjen BP2HP	Agustus – Oktober 2002	Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan	- Pengolah hasil hortikultura skala rumah tangga/kecil - Petugas Dinas Pertanian propinsi dan kabupaten	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.14	Pembinaan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura, Program Pengembangan Sarana Pengolahan	- Pemberian pengarahan - Penyerahan bantuan - Praktek pengoperasian sarana pengolahan	Departemen Pertanian , Ditjen BP2HP	Agustus-September 2002	DI Yogyakarta, Jambi, Nusa Tenggara Barat	Pengolah hasil hortikultura skala rumah tangga/kecil	Selesai		
8.15	Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) Proyek Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Fasilitasi di bidang : - Manajemen mutu, pengolahan, pemasaran, usaha - Peningkatan SDM - Aksesibilitas permodalan - Pengadaan prasarana/sarana pengolahan /pendukung	Dinas Pertanian kab./kota setempat	Tahun 2001, 2002 dan 2003	TA 2001 - 2002: 25 provinsi; TA 2003: 16 provinsi	Pengolah hasil hortikultura skala rumah tangga/kecil	Masih berjalan		
8.16	Temu Usaha Program Pengembangan dan Penguatan Pasar Dalam Negeri	Fasilitasi pertemuan antara produsen dengan pengusaha sayur dan buah, manggis, mengkudu, bawang merah - Temu wicara	Departemen Pertanian , Ditjen BP2HP	TA 2002	Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	- Petani sayur dan buah - Petani manggis - Petani mengkudu - Kelompok tani/petani dan pengusaha bawang merah	Selesai		
8.17	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (Proyek Pembangunan Sarana Produksi Pertanian)	- Rehabilitasi: konstruksi, pembinaan, monitoring dan evaluasi - Relokasi dan pembangunan baru: identifikasi lokasi, pembuatan desain, konstruksi, pembinaan, monitoring dan evaluasi	Departemen Pertanian , Ditjen Bina Sarana Pertanian	TA 2003	Sumatera Utara; Jawa Barat; Kalimantan Tengah; Bali; Sulawesi Utara; Sulawesi Selatan.		Masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.18	Pengembangan Lumbung Desa Modern (Proyek Pembangunan Sarana Produksi Pertanian)	Pembangunan sarana	Departemen Pertanian , Ditjen Bina Sarana Pertanian	TA 2003	10 provinsi, 21 kabupaten		Masih berjalan		
8.19	Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) (Proyek Pengembangan Sarana Produksi Pertanian)	- Pembangunan jaringan TAM seluas 7000 ha - Pengadaan hand-traktor sebanyak 40 unit - Pengadaan pompa air sebanyak 64 unit - Pengadaan pupuk dolomit, volume pengadaan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia	Departemen Pertanian , Ditjen Bina Sarana Pertanian	Tahun 2003	7 provinsi, 14 kabupaten				
8.20	Pupuk Bersubsidi Proyek Pembangunan Sarana Produksi Pertanian	Penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 6,3 juta ton	Departemen Pertanian , Ditjen Bina Sarana Pertanian	TA 2003	Seluruh kabupaten / kota	Petani dan pekebun kecil			
8.21	Penyuluhan yang Dikelola Petani (FMA : <i>Farmer-Managed Extention Activities</i>) (Proyek Dafep)	- Peningkatan kapasitas petani untuk memperkuat kelompok tani dan mengembangkan jaringan kemitraan petani - Peningkatan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan	Departemen Pertanian , Badan Pengembangan Sumberdaya Pertanian, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.	TA 2002	9 provinsi, 15 kabupaten / kota	Petani (laki-laki dan perempuan) dan anggota keluarganya, yang memiliki usaha tani dan bermaksud mengembangkan usahanya		- Adanya anggapan bahwa FMA DAFEP akan memberikan bantuan fisik, padahal DAFEP merupakan kegiatan pemberdayaan petani melalui perubahan pola pikir petani sendiri.	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.22	Proyek Pembinaan Peningkatan Petani-Nelayan Kecil (P4K)	- Penumbuh-kembangan Kelompok Swadaya (KPK) - Pelayanan keuangan mikro - Penguatan kapasitas manajemen	Departemen Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian	Fase I: Tahun 1997-1988; Fase II: Tahun 1989-1998; Fase III: Tahun 1998-2005	Fase I: 6 provinsi. Fase II: 12 provinsi Fase III: 12 provinsi.	Petani-nelayan kecil, pengrajin kecil dan kelompok masyarakat miskin di pedesaan lainnya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.	Masih berjalan		
8.23	Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian	1. Pelatihan teknis 2. Pembinaan teknis 3. Penguatan pasar benih/bibit 4. Penguatan modal	Departemen Pertanian, Kegiatan 1, 3, dan 4: Tim Teknis Kab/Kota. Kegiatan 2: Petugas Perbenihan Kab/Kota	TA 1997/1998 - 2000	22 provinsi	- Kegiatan 1, 2 dan 3: kelompok penangkar (pokkar) benih - Kegiatan 4: penangkar benih berpengalaman dan terhimpun dalam kelompok berpotensi untuk mengembangkan usahanya.	Kegiatan 1, 2, dan 3 sudah selesai. Kegiatan 4, masih terjadi perguliran dana di masyarakat		
8.24	Pemberdayaan Penangkar Bibit Ternak (Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian)	- Penguatan modal - Pembinaan dan pelatihan	Departemen Pertanian, Dinas Peternakan provinsi dan kab/kota setempat	TA 1997/1998 - 2000	21 provinsi	Peternak pembibit anggota Pokkar bibit ternak.	Kegiatan pelatihan dan pembinaan teknis selesai. Kegiatan penguatan modal, masih berjalan (dana masih bergulir di tingkat pokkar)		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
8.25	Pemberdayaan Penangkar Perikanan Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian	- Penguatan modal penangkar - Pembinaan teknis - Pelatihan teknis - Penguatan pemasaran - Penguatan kelembagaan	Departemen Pertanian , Dinas Perikanan Propinsi	TA 1997/1998 - 2000	21 provinsi	Pokkar benih ikan	Kegiatan pelatihan dan pembinaan teknis selesai. Kegiatan penguatan modal, masih berjalan (dana masih bergulir di tingkat pokkar)		
8.26	Pemberdayaan Penangkar Perkebunan Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian	- Penguatan modal penangkar - Pembinaan teknis - Pelatihan teknis - Penguatan pasar benih/bibit - Penguatan kelembagaan perbenihan - Pemurnian dan penguatan mutu benih	Departemen Pertanian , Dinas Perkebunan propinsi dan kab./kota	TA 1997/1998 - 2000	22 provinsi	Pokkar benih/bibit perkebunan	Kegiatan penguatan modal masih berjalan, dana masih bergulir di tingkat pokkar.		
8.27	Proyek Pemberdayaan Petani dan Agribisnis di Pedesaan	Pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Departemen Pertanian , Pimbagpro propinsi dan kabupaten	Tahun 2001	26 propinsi dan 157 kabupaten.	Kelompok tani dan kelompok usaha agribisnis peternakan, perkebunan (tanaman industri), hortikultura dan aneka tanaman, usaha pangan komersial, dan industri pengolah hasil pertanian	Selesai	- Kelompok tani yang tidak bermasalah dengan KUT dan yang berpengalaman sulit ditemui. - Beberapa kabupaten tidak melakukan penentuan calon komoditas dan calon lokasi sesuai dengan kriteria - Intervensi aparat dalam pengadaan sarana produksi pertanian akibat kurang optimalnya proses sosialisasi.	- Berpotensi untuk diteruskan karena menurut evaluasi Itjen Deptan, pola BLM dinilai paling sesuai dalam mencegah kebocoran dana yang disalurkan kepada Petani - Kata Bantuan diusulkan diganti menjadi Pinjaman karena bantuan cenderung diterjemahkan Petani sebagai pemberian atau hibah
9. Departemen Sosial									

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
9.1	Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin (FM)	- Bantuan alat kerja dan bahan untuk Usaha Ekonomi Produktif -UEP - Tahun 2003: Fasilitas pengadaan sapi potong (penggemukan) - Usaha Kesejahteraan Sosial	Departemen Sosial , Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial	Tahun Anggaran 1984 hingga sekarang	Th 1984: 14 Kab/kota, 9 propinsi Th 1998-1999: 106 Kab/Kota, 26 propinsi Th 1999-2000: 207 Kab/Kota, 26 propinsi Th 2001: 153 Kab/Kota, 26 propinsi Th 2002: 186 Kab/Kota, 30 propinsi Th 2003: 3 Kab/Kota, 3 provinsi.	- Fakir miskin yang termasuk Keluarga Binaan Sosial. - KUBE beranggotakan 10 KBS perempuan dan laki-laki.	Masih berjalan	Penafsiran yang berbeda tentang pengertian fakir miskin	- KUBE banyak yang berkembang dan sangat berpotensi untuk terus berkembang. - UEP berpotensi untuk berkembang karena penggemukan sapi memiliki peluang pemasaran yang sangat baik untuk memenuhi lonjakan permintaan daging sapi
9.2	Program KUBE untuk Anak Nakal, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, dan NAPZA	- Pembentukan KUBE - Pembentukan UEP - Bantuan alat kerja dan bahan untuk UEP	Departemen Sosial , Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Tahun 1996/1997 - sekarang	30 propinsi	Perseorangan, bukan keluarga, yang terdiri dari: anak nakal, anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, NAPZA	Masih berjalan		
10. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)									
10.1	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pola Grameen Bank	- Pelatihan pembinaan - Bantuan keuangan dengan sistem bergulir	Depnakertrans , Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Tahun 2000 dan 2003	- Banten (Serang) - Jawa Barat (Kab Bogor) - Jawa Timur (Malang)	Kaum wanita (dalam keluarga) miskin	Penyaluran dana sudah selesai, namun pergulirannya masih berlangsung di masyarakat	- Lemahnya sistem monitoring dari Depnakertrans ke LSM-LSM. - Jumlah dana yang disalurkan kurang memadai (kecil), sehingga untuk menjadi peserta harus mengantri.	- Peserta bisa memiliki usaha - Membuka lapangan kerja baru khususnya untuk tenaga pendamping

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
10.2	Program Pembentukan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Terdidik (TKMT)	- Pelatihan - Magang - Pembinaan	Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	TA 1994/1995-sekarang	27 provinsi	Angkatan kerja muda tamatan SLTA dan D1, terutama dari pekerja keluarga atau dari keluarga pengusaha	Masih berjalan	- Sulit mendapatkan peserta yang mempunyai bakat dan minat di bidang wirausaha - Pembinaan kurang memadai. - Peserta menghadapi kendala dalam mengakses sumber ekonomi (pengadaan modal), desain produk, pemasaran, dsb.	Meningkatkan wirausaha yang bisa membaca peluang pasar, mempunyai kemandirian usaha serta pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan - Terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi 30.000 lulusan SLTA/D-1 selama Repelita VI
10.3	Bimbingan Penerapan <i>Seri, Seton, Seso, Seiketsu, Setsuke</i> (5S) di Usaha Kecil Menengah (UKM)	- Pelatihan - Praktek	Depnakertrans, Ditjen Penempatan Dalam Negeri	Tahun 2002-2003	2002: 10 provinsi 2003: 5 daerah (belum ditentukan)	5 UKM di setiap provinsi	Masih berjalan	Banyak UKM yang dimiliki keluarga dan pengelolanya berpendidikan rendah sehingga mereka berpendapat mengurus usaha lebih penting daripada mengikuti pelatihan dan praktek hingga selesai	Meningkatkan usaha UKM.
10.4	Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok Kerja Wanita	- Pelatihan - Praktek	Depnakertrans, Ditjen Penempatan Dalam Negeri	18 Juni 2003	Jawa Barat (Kab Kuningan)	Ketua PKK (30 pengusaha kecil mandiri)	Pelatihan sudah dilakukan. Evaluasi akan dilakukan dalam enam bulan.	Peserta pelatihan membutuhkan peralatan praktek (seperti alat untuk mengiris, alat pres untuk mengemas, dsb) sehingga terjadi peningkatan anggaran	Potensi sumber daya alam daerah seperti singkong dan pisang bisa dimanfaatkan, dan peserta dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.
10.5	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Pelatihan	Depnakertrans, Ditjen Penempatan Dalam Negeri, ; Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten	Juli 2003 di Indramayu; Agustus 2003 di Bantul	Jawa Barat (Kab Indramayu), DI Yogyakarta (Kab Bantul)	Pengusaha kecil (30 peserta di setiap kabupaten)	Selesai	Tidak ada.	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam mengolah kekayaan alam menjadi produk yang lebih bernilai.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
10.6	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Wanita	Pelatihan	Depnakertrans, Ditjen Penempatan Dalam Negeri	Tahun 1994/95-2003	1997/98: Semua prov kecuali Sulteng dan Sultra 1998/99: Semua prov kecuali Sumsel 1999/2000: 18 provinsi 2000/2001: 16 provinsi 2001/2002: 6 provinsi 2002/2003: 4 provinsi	Pencari kerja, pengangguran dan ibu rumah tangga	Masih berjalan	Tidak bisa berlanjut karena keterbatasan dana	Meningkatkan kondisi pengusaha kecil di masing-masing wilayah.
11. Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)									
11.1	Proyek Kredit Mikro	Pemberian kredit.	Menko Kesra, Mennegkop; Depkeu.	Tahun 2001-2004	Seluruh propinsi di Indonesia	Individu usia produktif, keluarga miskin, dan kelompok masyarakat yang potensial produktif	Masih berjalan	- Tingginya tingkat suku bunga kredit mikro - Kebanyakan usaha mikro tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan perbankan	Tingkat kemacetan kredit yang relatif kecil.; UKM mempunyai ketahanan yang relatif baik
11.2	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Wanita	Pelatihan	Menko Kesra, Sesmenko Kesra	6-15 Maret 2000	Jakarta Pusat (peserta dari Jabar, Jateng, DKI)	- Pembina: Pemda Tk.II (Kabag Sosial); Kecamatan (Kaur Kesra ; wakil - Ketua kelompok usaha ekonomi produktif wanita	Selesai		
11.3	Pelatihan Pengelola Kegiatan Lapangan Tahun 1999/2000	Pelatihan	Menko Kesra	Tahun 1999/2000	Jakarta		Selesai		
11.4	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha Kerja Produktif		Menko Kesra						

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
11.5	Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Pasca Pengungsian di Permukiman Kembali Daerah Asal, Permukiman Bekas Kerusakan dan Permukiman Transmigrasi Baru	Bina Usaha dan Kemitraan: - Fasilitasi & pembinaan usaha - Bantuan permodalan	Menko Kesra dalam wadah Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) dan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis).		Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur.	- Masyarakat yang bermukim di daerah asal tempat kerusakan, terutama keluarga miskin (keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I alasan ekonomi). - Pengungsi daerah tempat kerusakan yang sudah memutuskan bertransmigrasi.			
11.6	Program Gerdu Taskin Pasca Pengungsian di Daerah Terpencil/Terasing	Bina Usaha dan Kemitraan: - Fasilitasi & pembinaan usaha - Bantuan permodalan	Menko Kesra dalam wadah Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) dan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis).		18 provinsi	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Komunitas adat terpencil			
11.7	Kredit Pengentasan Kemiskinan melalui Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (Kredit Taskin UKMK) dan Kredit Pengentasan Kemiskinan melalui Skim Kredit Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kredit Taskin Inkra)	Pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi	Menko Kesra	Tahun 1999	Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, NTT dan DI Yogyakarta.	- Diutamakan yang pernah menerima kukesra sampai putaran terakhir dan ibu rumah tangga. - Kelompok taskin yang telah menjadi binaan departemen	Selesai		

12. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP)

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
12.1	Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)	- Penyertaan modal usaha - Pemberdayaan / pendampingan	Meneg PP; Tim P3EL tingkat provinsi, kabupaten	Tahun 2000 sekarang	Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan yang sudah ada dan yang baru terbentuk	Masih berjalan		Positif : - Setelah 2,5 tahun pelaksanaan program, tumbuh 884 kelompok usaha. - Realisasi penyaluran dana 163% dari plafon dengan tingkat pengembalian 79%.
13. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)									
13.1	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Inkubator (P2LK-MAP Inkubator)	Penyaluran dana (sebagai dukungan modal awal dan padanan kepada inkubator bisnis)	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha; Inkubator (IPB, ITB, UNS, ITS)	Tahun 2001, 2002,	Th 2001: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Th 2002: Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara	Minimal 40 pengusaha kecil-tenant atau mitra binaan inkubator	Masih berjalan	Belum optimalnya Dinas Koperasi/badan yang membidangi Koperasi dan UKM dalam pembinaan inkubator bisnis di wilayahnya.	Konsentrasi terhadap pembinaan wirausaha-wirausaha baru. Inkubator bisnis dapat dikembangkan dan dibina.
13.2	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (P2LK-MAP KSP/USP Koperasi)	Penyaluran dana sebagai dukungan modal awal dan padanan	Kementerian Koperasi dan UKM , Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Tahun 2001, 2002,	Th 2001: 30 provinsi, 88 kab/kota Th 2002: 30 provinsi, 277 kab/kota	- KSP/USP Koperasi - Usaha Mikro dan Kecil	Masih berjalan	Setelah pelaksanaan otonomi daerah, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program P2LK MAP belum sepenuhnya tercapai.	Masih banyak KSP/USP-Koperasi yang membutuhkan dana MAP.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.3	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Keuangan Mikro (P2LK-MAP LKM)	Penyaluran dana sebagai dukungan modal awal dan padanan kepada UKM	Kementerian Koperasi dan UKM , Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Tahun 2001, 2002, 2003	Th 2001: 27 provinsi, 67 kab/kota Th 2002: 24 provinsi, 50 kab/kota	- LKM (Lembaga Keuangan Mikro) - Usaha mikro	Masih berjalan	- Sulit memetakan usaha mikro yang produktif untuk dialokasikan program dana MAP. - Sistem/pola penyaluran masih lemah	Peningkatan pembinaan terhadap LKM untuk menjadi koperasi atau LKM tangguh, sehingga dana MAP dapat diprogramkan kembali oleh pemerintah melalui wadah koperasi.
13.4	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura (P2LK-MAP Modal Ventura)	Penyaluran dana sebagai dukungan modal awal dan padanan (MAP) kepada UKK PPU	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha dan Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD)	Tahun 2001, 2002, 2003	Th 2001 : Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Lampung Th 2002 : 22 provinsi	Usaha Kecil dan Koperasi-Perusahaan Pasangan Usaha (UKK-PPU)	Masih berjalan	Koordinasi dan sinkronisasi antara tim yang ada di propinsi dan LMVD belum sepenuhnya tercapai.	Masih diperlukan pengembangan LMVD yang potensial dan bernilai tambah tinggi.
13.5	Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Penjaminan (P2LK-MAP Penjaminan)	Penyaluran dana Penjamin Kredit	Kementerian Koperasi dan UKM , Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Lembaga Penjamin	Tahun 2001	Sumatera Barat, DKI Jakarta (Jabotabek), Jawa Tengah dan Jawa Timur	UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi)	Masih berjalan	Sinkronisasi program antara program yang dikembangkan di pusat dengan pemerintah daerah masih perlu dikembangkan	Masih banyak UKMK yang potensial, produktif dan layak tapi memiliki keterbatasan modal dan membutuhkan fasilitas penjaminan kredit

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.6	Pengembangan Lembaga Pengembangan Bisnis /Business Development Services (LPB/BDS)	- Sosialisasi program - Identifikasi, seleksi, dan penetapan BDS - Penyaluran dukungan dana operasional BDS - Konsolidasi dan pematapan program BDS	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Tahun 2002	2001 : 30 provinsi, 69 kab/kota 2002 : 30 provinsi, 277 kab/kota	- BDS - UKM dalam sentra terpilih	Masih berjalan	- Menentukan BDS yang berkualitas - Kurangnya kemampuan SDM (dalam membuat proposal, perencanaan untuk sentra)	Banyak yayasan baru yang melakukan pemberdayaan
13.7	Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM	Menumbuhkan dan mengembangkan sentra UKM (Penetapan, kasifikasi dan perkuatan sentra UKM)	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Tahun 2001-2003	2001 : 30 provinsi, 69 kab/kota 2002 : 30 provinsi, 277 kab/kota	UKM	Selesai		
13.8	Proyek Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (PUK)	- Pemberian modal - Pembinaan kepada koperasi dan Kelompok Masyarakat/LKM	Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Pembiayaan	Tahun 1993-2001	1993/94: 3 provinsi 1994/95: 9 provinsi 1995/96: 10 provinsi 1996/97: 8 provinsi 1997/98: 8 provinsi 1998/99: 7 provinsi 2000: 8 provinsi 2001: 18 provinsi	- Koperasi/ kelompok masyarakat/LKM - Usaha skala kecil	Program sudah selesai, perguliran dana masih berjalan	Secara umum tidak ada masalah. Pada beberapa kasus terdapat kelompok masyarakat/LKM yang kurang lancar dalam pengembalian	Masih banyak kelompok masyarakat/LKM yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.9	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM)	- Bantuan dana bergulir - Pendampingan (oleh fasilitator)	Kementerian Koperasi dan UKM Ditjen Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam	Tahun 1998/1999	25 provinsi, 101 kota/kab	Masyarakat yang tidak lagi berada dibawah garis kemiskinan, dengan prioritas yang mampu menabung dan berusaha pada skala sangat terbatas	Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan, tapi berguliran dana kepada kelompok usaha lainnya masih berjalan	Secara umum tidak ada masalah. Namun sebagian kecil kesulitan dalam mengembalikan pinjaman akibat dampak krisis ekonomi	Dapat mengembangkan kelompok usaha dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota
13.10	Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER)	- Dana bergulir untuk modal kerja - Pendampingan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pembiayaan	Tahun 1997-2001	1997/98: 8 provinsi, 81 kota/kab 1998/99: 15 provinsi, 119 kota/kab 1999/2000 : 7 provinsi 2000 : 17 provinsi 2001 : 20	- Koperasi, Pondok Pesantren, BMT, Majelis Taklim (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat/LM3) - Usaha kecil/mikro	Program sudah selesai tapi perguliran dana pada koperasi, pondok pesantren, BMT, Majelis Taklim yang lain tetap berjalan	Secara umum tidak ada masalah, pada beberapa kasus ada anggota belum terbiasa dengan pola syari'ah	- Melalui penambahan modal lembaga sasaran dapat mengembangkan usahanya serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. - Masih banyak koperasi, pondok pesantren, BMT, Majelis Taklim lain yang sangat membutuhkan tambahan modal
13.11	Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM	- Bantuan modal dana bergulir - Pendampingan	Kementerian Koperasi dan UKM	Tahun 2000-2003	30 provinsi, sebagian besar kab/kota	- KSP/USP Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro - usaha kecil/mikro	Masih berjalan	Secara umum tidak ada masalah. Pada beberapa kasus terdapat kesulitan dalam pengembalian	Kegiatan ini dapat mengembangkan usaha anggota KSP/USP-Koperasi, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya
13.12	Diklat Manajemen Bisnis bagi Pengelola BDS-Provider	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	I. 30 Juni s/d 6 Juli 2003 II : 20 Juli s/d 26 Juli 2003 III : 28 Juli s/d 3 Agustus	DKI Jakarta	Peserta pelatihan diprioritaskan bagi pengelola BDS-Provider yang telah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan belum pernah mengikuti Diklat BDS-Provider yang difasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM	Selesai	Secara teknis tidak ada, tapi untuk penyelenggaraan Diklat selanjutnya harus memperhatikan batasan umur peserta	Melalui Diklat konsultan yang tergabung dalam wadah BDS mendapat tambahan pengetahuan. Selanjutnya dapat mengimplementasikan dalam usaha KUKM, sehingga mampu meningkatkan volume usaha KUKM

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.13	Pengembangan Diklat Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi Pemuda	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Angkatan I : 8-14 September 2003 Angkatan II : 21-27 September 2003 Angkatan III : 29 September-4 Oktober 2003	DKI Jakarta	Pengusaha muda se-Indonesia (270 orang) dalam bidang: - Kelautan dan perikanan - Industri kecil dan kerajinan - Agribisnis Kehutanan dan Perkebunan	Selesai	Belum ada	Tambahan pengetahuan melalui Diklat mampu meningkatkan volume usaha KUKM di berbagai sektor
13.14	Workshop Optimalisasi Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan SDM Berkualitas, Bermoral, Berpengetahuan	Workshop	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	9-12 Desember 2003	DKI Jakarta	Komponen masyarakat (di seluruh Indonesia) yang menaruh perhatian pada pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Belum dilaksanakan	Belum ada	Belum terlihat
13.15	<i>Training of Trainer</i> Pendidikan dan Latihan Export (TOT Diklat Ekspor)	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2001- 2003	- Th 2001: Banten, Jawa Barat, Jawa Timur - Th 2002: 8 provinsi - Th 2003: seluruh Indonesia	KUKM yang berpotensi ekspor, tetapi belum melakukan ekspor	Masih berjalan		Melalui diklat diharapkan peserta memperoleh keterampilan dan mampu meningkatkan daya saing.
13.16	Member Education	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2001	Banten	Anggota koperasi yang terseleksi	Selesai	Tingkat pendidikan peserta mempengaruhi penerimaan materi yang diberikan saat Diklat	Kinerja koperasi akan meningkat apabila SDM anggotanya ditingkatkan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.17	Pendidikan dan Latihan Keterampilan Otomotif	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2002 dan 2003	DKI Jakarta	Anggota koperasi, PKM yang mempunyai usaha bengkel, mekanik bengkel, dan sopir	Selesai	Tidak semua peserta dapat mengembangkan usaha bengkelnya sesuai dengan yang diharapkan	Meningkatkan pendapatan masyarakat
13.18	Pendidikan dan Latihan Pedagang Eceran (<i>Retail</i>)	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2003	Seluruh Indonesia	30 koperasi di seluruh Indonesia	Belum dilaksanakan	Belum ada	Belum terlihat
13.19	Pendidikan dan Latihan Keterampilan Elektronik	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	15-20 September 2003	DKI Jakarta	Anggota Asosiasi Bengkel Elektronik dan koperasi (Jasa Service) Samsung (20 orang), Sanken (20 orang), Sharp (20 orang).	Masih berjalan	Belum ada	Dengan tambahan pengetahuan melalui Diklat, peserta mampu mengembangkan usahanya
13.20	Pendidikan dan Latihan di Bidang Agribisnis dan Pasca Panen	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2003	DKI Jakarta	60 pengurus dari 15 Kopontren dan pengelola bidang usaha agribisnis Kopontren (Jabotabek + Sukabumi)	Diklat Budidaya sudah dilaksanakan, Diklat Pasca Panen belum dilaksanakan	Skala usaha tergantung dari luas lahan	Pengelolaan agribisnis ke depan melalui Kopontren sangat potensial karena dibantu santri
13.21	Pendidikan dan Latihan Pakan Ternak Sapi Potong	Pendidikan dan Latihan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2003	Sumatera Selatan (Kab. Ogan Komering Ulu)	60 anggota koperasi peternak penerima sapi	Selesai	Belum ada kios pakan ternak sapi	Melalui Diklat ini peserta dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan SDA daerah masing-masing

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.22	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Diklat Koperasi dan UKM yang Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Non Pemerintah	Evaluasi penyelenggaraan Diklat	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2001-2003	Seluruh Indonesia	Penyelenggara dan peserta Diklat UKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah	Masih berjalan	Evaluator dan dana penyelenggara terbatas untuk menjangkau seluruh propinsi di Indonesia	Penyelenggaraan Diklat UKM dapat meningkatkan kualitas peserta didik dan penyelenggara Diklat, sehingga akan meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota
13.23	Evaluasi melalui Lokakarya	Evaluasi penyelenggaraan Diklat	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2002 dan 2003	Beberapa provinsi	Penyelenggara dan peserta Diklat UKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah	Masih berjalan	Evaluator dan dana penyelenggara terbatas untuk menjangkau seluruh propinsi di Indonesia	Penting untuk mengevaluasi sistem diklat yang sudah dilaksanakan, minimal untuk memperbaiki pola Diklat
13.24	Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Bidang Budidaya dan Agro Industri Serat Rami	- Dana bergulir (modal kepada petani) untuk budidaya tanaman rami - Modal bergulir kepada koperasi berupa alat processing dan bangunannya serta modal kerja	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2001-2003	2001: Jateng (Kab Wonosobo) 2002: Sumsel (Kab OKU) 2003: Sumsel, Bengkulu, Sumut, Lampung, Jateng (12 kota/kab)	Petani dan koperasi	Masih berjalan	SDM relatif kurang	Tanaman rami sangat cocok dengan iklim Indonesia, dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian diatas 300 m dpl, dan dapat digunakan sebagai pengganti bahan katun yang selama ini impor.
13.25	Pengembangan Pengolahan Kopi	Bantuan (pinjaman) mesin <i>processing</i> kopi	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002-2003	2002: Sumsel (Kab OKU dan Lahat) 2003: Lampung, Sumut dan Jatim (3 kab)	Koperasi	Masih berjalan	SDM	Sumatera dan Jawa Timur sangat potensial untuk produksi kopi

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.26	Pengembangan Pengolahan Gambir	- Bantuan kepada koperasi berupa mesin processing gambir - Modal kerja	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002-2003	Sumatera Selatan 2002: Kab Pesisir Selatan 2003: Kab Limapuluh Kota	Koperasi	Masih berjalan	SDM	90% kebutuhan gambir dunia dari Indonesia
13.27	Bantuan Perkuatan Peralatan Pengideraan Jauh untuk Usaha Penangkapan Ikan terhadap Koperasi Perikanan	Bersama perusahaan yang memproduksi peralatan tersebut melakukan: - Sosialisasi - Pelatihan tentang penggunaan peralatan - Pemberian bantuan kepada nelayan berupa peralatan pengideraan jauh sebagai stimulan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi-Asdep Perikanan dan Peternakan	Tahun 2002	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, 5 kab	Koperasi nelayan	Selesai	Banyak nelayan yang membutuhkan peralatan pengideraan jauh	Dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu masih banyak nelayan kecil yang membutuhkan peralatan dan adanya peningkatan penghasilan nelayan setelah menggunakan peralatan, maka upaya ini mempunyai potensi sangat baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan
13.28	Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir bagi Koperasi-Koperasi Mina dalam Rangka Pengembangan Usaha Perikanan dengan Peralatan Pengideraan Jauh	Penyediaan dana bergulir	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi-Asdep Perikanan dan Peternakan	Tahun 2003	8 provinsi, 10 kota/kab	Koperasi nelayan	Masih berjalan	Banyak nelayan yang membutuhkan peralatan pengideraan jauh	Dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu masih banyak nelayan kecil yang membutuhkan peralatan dan adanya peningkatan penghasilan nelayan setelah menggunakan peralatan, maka upaya ini mempunyai potensi sangat baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan
13.29	Pengembangan Usaha Sapi Perah kepada Beberapa Koperasi di Jawa Barat	Bantuan 1.810 ekor bibit sapi perah	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	Jawa Barat	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi	Masih berjalan	Tidak ada	Berpotensi karena produksi susu di Indonesia belum memenuhi kebutuhan masyarakat

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.30	Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong kepada Koperasi OKU Cipta Mandiri di Sumatera Selatan	Bantuan 2.400 sapi potong dan sarana pendukungnya	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	Sumatera Selatan (Kab Ogan Komering Ulu)	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi	Masih berjalan	Tidak ada	Berpotensi karena produksi daging Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.31	Pengembangan Usaha Ternak Domba kepada Koperasi Pondok Pesantren Darussalam di Jawa Barat	Bantuan 450 ekor domba, terdiri 400 ekor betina dan 50 ekor pejantan	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	Jawa Barat (Kab Garut)	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi	Masih berjalan	Tidak ada masalah	Berpotensi karena produksi daging Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.32	Pengembangan Usaha Pembibitan Itik kepada Koperasi Sumber Rejeki di Jawa Barat dan Jawa Tengah	Bantuan itik berikut sarana dan prasarana pendukungnya	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	Jawa Barat (Kab Cirebon) dan Jawa Tengah (Kab Tegal, Kab Brebes)	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi	Masih berjalan	Tidak ada masalah	Berpotensi karena produksi daging dan telur Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.33	Pengembangan Usaha Budidaya Itik kepada Beberapa Koperasi	Bantuan itik berikut sarana dan prasarana pendukungnya, pola bergulir	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	10 provinsi, 17 kota/kab	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi	Masih berjalan	Pengetahuan peternak mengenai teknik beternak itik masih kurang	Berpotensi karena produksi daging dan telur Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.34	Pengembangan Usaha Budidaya Ternak Itik di Sumatera Selatan	Bantuan itik berikut sarana dan prasarana, pola bergulir	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	Sumatera Selatan	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi	Selesai		Berpotensi karena produksi daging dan telur Indonesia belum memenuhi kebutuhan (masih mengimpor)
13.35	Memberdayakan Masyarakat Melalui Usaha Budidaya Sapi Perah	Bantuan 2.400 ekor bibit sapi perah	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2003	Jawa Barat, DIY, Jawa Timur (9 kota/kab)	Petani peternak yang tergabung dalam wadah koperasi	Masih berjalan	Belum ada	Berpotensi karena produksi susu di Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.36	Memberdayakan Masyarakat Melalui Penggemukan Sapi Potong Impor	Bantuan 5.666 ekor sapi potong, sarana dan prasarana pendukungnya	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2003	6 provinsi, 6 kab	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi	Masih berjalan	Belum ada	Berpotensi karena produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.37	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Lokal Jenis Bali dan PO (Peranakan Ongol)	Bantuan 3.200 ekor bibit sapi lokal dan sarana pendukungnya.	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2003	Sumatera Selatan (Kab Muara Enim dan Musi Banyuasin) dan Bengkulu (Kota Bengkulu)	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi	Masih berjalan	Belum ada	Berpotensi karena produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.38	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Ternak Domba/ Kambing	Bantuan bibit domba/kambing	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2003	7 provinsi , 14 kota/kab	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi	Masih berjalan	Belum ada	Berpotensi karena produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.39	Memberdayakan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pembibitan Itik di 12 Koperasi Primer	Bantuan permodalan untuk pengembangan pembibitan itik	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2003	Kalsel, Kalbar, NTB, Jatim, Banten, Sumsel, Sumut (9 kota/kab)	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi	Masih berjalan	Belum ada	Berpotensi karena produksi daging di Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.40	Memberdayakan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Budidaya Itik	Bantuan itik dan sarana pendukungnya	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2003	10 provinsi	Petani peternak yang tergabung dalam koperasi	Masih berjalan	Belum ada	Berpotensi karena produksi daging dan telur Indonesia belum memenuhi kebutuhan (Indonesia masih mengimpor)
13.41	Pemantapan Usaha Koperasi Industri Garam	- Bantuan sarana dan prasarana pendukung (renovasi saluran) - Bantuan peralatan <i>processing</i> garam dan pembuatan tambak garam	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002-2003	2002: NTT (Kab Ngada) 2003: NTT (Kab Ngada) dan NTB	Koperasi yang berpotensi untuk mengolah garam	Masih berjalan	- Pengolahan dan rancangan lahan garam masih sederhana - Produksi sangat tergantung pada musim dan belum menggunakan peralatan berteknologi	Berpotensi karena produksi saat ini belum memenuhi kebutuhan dalam negeri

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status Saat Ini	Masalah	Potensi
13.42	Bantuan Mesin Yodisasi Garam Kepada Kopontren Nurul Jannah	Bantuan mesin Yodisasi dan sarana pendukung	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	Jawa Barat (Kab Bandung)	Koperasi yang berpotensi mengolah garam	Masih berjalan	Belum semua garam yang beredar di masyarakat mengandung yodium	Berpotensi karena produksi saat ini belum memenuhi kebutuhan dalam negeri
13.43	Rintisan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Agro Industri Sutera dengan Pola Dana Bergulir	- Budidaya murbey kepada petani - Bantuan mesin prosesing kepada koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2003	Sumatera Selatan, NTB, Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan (5 kab)	Koperasi/KUD yang berpotensi dalam usaha pengolahan sutera	Belum dilaksanakan	- Koordinasi di lapangan - Persyaratan untuk pencairan dana	Saat ini indonesia baru mampu memproduksi 7% bahan baku sutera dari kebutuhan bahan baku sutera dunia (1000 ton benang).
13.44	Industri Perak untuk Memenuhi Kebutuhan Bahan Baku Pengrajin di Yogyakarta dan Bali	Memfasilitasi pengrajin perak dengan BUMN (untuk memperoleh bahan baku)	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	DIY (Kota Yogyakarta) dan Bali (Kab Gianyar)	Pengrajin perak	Masih berjalan	Tidak mudah meyakinkan BUMN untuk melihat potensi pengrajin perak	Masih banyak bahan baku yang dibutuhkan pengrajin
13.45	Mesin Pengering Kayu	Bantuan mesin pengering kayu	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Produksi	Tahun 2002	Jawa Tengah (Kab Jepara)	Koperasi dan UKM	Masih berjalan	Kesulitan bahan baku	Berpotensi karena kapasitas mesin yang cukup besar

**Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997 - 2003
Kelompok Organisasi Non-Pemerintah**

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
A. ORNOP LOKAL									
1. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)									
1.1	Program Kredit Mikro untuk Penguatan Perempuan Usaha Kecil-Mikro	- Pelatihan - Kredit - Advokasi - Penerbitan Buletin - Perintisan pembentukan Jaringan PUK	Ornop Anggota ASPPUK	Tahun 1998-2002	14 propinsi, 43 kabupaten	Perempuan Usaha Kecil (PUK) yang tergabung dalam Kelompok simpan pinjam Perempuan Usaha Kecil (KPUK) binaan Ornop anggota ASPPUK	Program sudah selesai, namun kegiatan dana bergulir ASPPUK masih berjalan	- Program tidak berjalan sesuai jangka waktu pinjaman (di daerah konflik seperti Aceh) - Luasnya wilayah menyulitkan sekretariat memantau program - Minimnya dana pendampingan	Kelompok simpan pinjam berpotensi menjadi koperasi atau Lembaga Keuangan Perempuan (LKP), yang sahamnya dimiliki bersama
1.2	Pengembangan Kapasitas Perempuan Usaha Kecil-Mikro dalam Ekonomi	- Pelatihan - Pendampingan - Promosi produk PUK - Penerbitan buletin dan modul usaha - Studi banding	Ornop Anggota ASPPUK	Tahun 1996 - 1998	10 propinsi, 20 kabupaten	Perempuan usaha kecil-mikro (PUK) yang tergabung dalam KPUK dampuan Ornop anggota ASPPUK	Selesai	Keterbatasan sumber daya, sehingga pengelolaan program belum sistematis	Memberi inspirasi pada ornop pendamping dan KPUK dalam melakukan "sharing" pengetahuan dengan kelompok perempuan usaha kecil-mikro yang baru berdiri
1.3	Lokakarya berseri Dampak Krisis dan Kebijakan IMF terhadap Usaha Kecil-Mikro	- Lokakarya berkala - Dialog dengan pejabat daerah tentang kebijakan usaha kecil	Forum Wilayah ASPPUK	Juni-Juli 1998 dan Nopember 1998.	- Sumatera Utara (Medan) - DIY (Yogyakarta) - NTB (Mataram, Lombok) - Sulawesi Selatan (Ujung Pandang)	- Ornop anggota - PUK dampuan - Instansi pemerintah setempat - Perguruan Tinggi setempat - Media cetak dan radio.	Program sudah selesai, namun aliansi dengan media cetak/radio serta pemantauan terhadap kebijakan Pemda yang berkenaan dengan usaha kecil masih berjalan.	Jumlah peserta dari kalangan PUK dampuan masih relatif kecil	Melalui program ini kegiatan advokasi yang berkaitan dengan kebijakan usaha kecil di wilayah masing-masing dapat berjalan.
1.4	Lokakarya berseri tentang Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil-Mikro Mengantisipasi Era Globalisasi Ekonomi	Lokakarya berseri	Forum Wilayah ASPPUK	9 – 24 Juli 1999	- Kalimantan Barat (Pontianak) - Sulawesi Tenggara (Kendari) - Jawa Tengah (Solo)	- PUK-mikro - Instansi pemerintah - Ornop anggota - Lembaga pengembangan usaha kecil-mikro - Pers.	Program ini sudah selesai, namun beberapa kegiatan seperti diskusi kebijakan secara rutin dan kerjasama dengan media masih berlanjut.	Belum banyak mengikutsertakan PUK dampuan sehingga PUK mendapat informasi tidak langsung dari pendamping yang mengikuti kegiatan yang kemampuan- nya beragam	- Merintis jaringan PUK sebagai wadah penguatan bisnis dan advokasi. - Pengintegrasian perspektif gender dalam program pengembangan PUK yang dilakukan Ornop dan lembaga lain

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
1.5	Studi dan Advokasi Penguatan Kelompok Perempuan Pelaku Usaha Kecil-Mikro	- Penelitian - Analisis persoalan - Pencatatan dan Analisis proses - Advokasi pada permasalahan strategis.	Tim gabungan antara Sekretariat ASPPUK , AKATIGA , LPPSLH dan Persepsi .	Tahun 2001–2003	Jawa Tengah (Purwokerto dan Klaten)	- PUK yang tergabung dalam KPUK binaan ASPPUK - Pendamping Ornop anggota ASPPUK (LPPSLH dan Persepsi)	Program sudah selesai, dan dilanjutkan dengan advokasi berdasarkan temuan di lokasi dengan melibatkan masyarakat basis	- Kurangnya dana - Kader PUK masih kurang terlibat	- Berpotensi menggali kekuatan yang dimiliki PUK-mikro yang selama ini tidak diketahui - Proses dan metode identifikasi persoalan dan kebutuhan PUK bisa menjadi sumber pembelajaran Ornop
2. Bina Desa									
2.1	Pengembangan dan advokasi ekonomi rakyat	- Pendidikan - Studi - Pelatihan - Fasilitas kredit	Bina Desa bekerja sama dengan Koperasi Karya Insani dan kelompok swadaya masyarakat	Tahun 1994 - sekarang (Tahun 1994 - 1996 dikelola langsung oleh Bina Desa. Sejak 1997 bekerja sama dengan Koperasi)	6 propinsi, 16 kabupaten	Kelompok masyarakat, baik yang sudah ada maupun bentukan baru	Kegiatan simpan pinjam masih berjalan	- Pembayaran cicilan tidak lancar - Anggota kurang memahami apa yang ingin diusahakan sehingga usaha yang dilakukan sifatnya sementara - Pendamping lokal tidak disiplin.	Berpotensi mengembangkan usaha berbasis pertanian dan meningkatkan kapasitas kelompok melalui pelatihan dan pendidikan .
3. Bina Masyarakat Sejahtera (BMS)									
3.1	BMT Keluarga (BMT AI Inayah Unit I)	- Penyaluran kredit - Pendampingan - Simpan pinjam	BMS dan BMT AI Inayah unit BMT Keluarga (bentukan BMS)	Tahun 1995- sekarang	Jabar (Kabupaten Bekasi)	- Ibu rumah tangga yang memiliki warung - Pedagang kecil yang masuk kategori keluarga miskin	Masih berjalan	Kurangnya tenaga pendamping sehingga pendampingan tidak bisa dilakukan secara intensif	Berpotensi menambah anggota dan aset, yang berarti pedagang kecil yang dilayani semakin banyak
3.2	BMT Pemberdayaan Masyarakat Miskin: (BMT AI Inayah Unit II)	- Penyaluran kredit - Pendampingan - Simpan pinjam	BMS dan BMT AI Inayah Unit II	Tahun 1997- sekarang	Jabar (Kabupaten Bekasi)	Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha atau berminat kuat untuk melakukan usaha	Masih berjalan	- Pendampingan tidak intensif karena kurang dana operasional. - Kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman masih kurang (pinjaman terlalu lunak, tanpa jaminan)	Berpotensi dalam mengembangkan wilayah kerja dan meningkatkan jumlah aset, yang berarti meningkatkan usaha kecil yang dapat dilayani
3.3	BMT Komunitas Orangtua Anak Jalanan (BMT AI Inayah Unit III)	- Penyaluran kredit - Pendampingan - Simpan pinjam	BMS dan BMT AI Inayah Unit III	Tahun 1999- sekarang	Jabar (Kabupaten Bekasi)	Orang tua anak jalanan baik yang telah memiliki usaha maupun belum	Masih berjalan	Kurangnya tenaga pendamping sehingga pendampingan tidak dilakukan secara optimal	Berpotensi mengurangi jumlah anak jalanan karena membaiknya kondisi ekonomi orang tuanya

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.4	BMT Masyarakat Miskin Korban Banjir (BMT AI Inayah Unit IV)	- Penyaluran kredit - Pendampingan	BMS dan BMT AI Hinayah Unit IV	Tahun 2002-sekarang	Jabar (Kabupaten Bekasi)	Masyarakat korban banjir (petani dan peternak)	Masih berjalan	Kurangnya biaya operasional untuk tenaga pendamping lapangan	- Berpotensi menambah anggota dan menjadi unit koperasi yang produktif - Berpotensi menjadi pendorong berkembangnya usaha-usaha alternatif bagi petani dan peternak di daerah perkotaan
3.5	BMT Komunitas Kelurahan Bugis (BMT AI hinayah Unit V)	- Penyaluran Kredit - Pendampingan - Simpan pinjam	BMS dan BMT Komunitas Kelurahan Bugis.	Tahun 2003	DKI Jakarta (Kampung Bugis)	Masyarakat miskin yang memiliki usaha (dagang atau usaha rumah tangga)	Masih berjalan (dalam tahap perintisan)	Belum ada kepastian dana	
3.6	Pelatihan Pendamping Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM)	Pelatihan	BMS	Tahun 2000	Jabar (Kabupaten Bekasi)	-Organisasi sosial anggota (K3S) -Koperasi/LKM (Lembaga Keuangan Mikro)	Selesai	- Kesibukan peserta mengganggu keikutsertaan dalam pelatihan - Latar belakang dan pendidikan peserta yang beragam	Menciptakan kerjasama antara MBT dan koperasi se Bekasi
3.7	Pelatihan Manajemen Usaha	Pelatihan	BMS	Tahun 2003	Jabar (Kabupaten Bekasi)	Orang tua anak jalanan (kelompok dampingan BMT)	Selesai	- Banyak anggota tidak mengikuti pelatihan karena sibuk mencari nafkah - Selama pelatihan (2 hari) peserta tidak melakukan usaha dan kehilangan penghasilan	- Akses terhadap modal menjadi mudah melalui BMT - Mengembangkan usaha mikro para peserta pelatihan

4. Bina Sumberdaya Mitra (BISMI)

4.1	Karib Ikhtiar BISMI	- Pelatihan - Penyediaan Kredit - Pendampingan	BISMI dan kelompok dampingan	Tahun 1998 - sekarang	- 1998: DKI Jakarta, Jabar (Depok, Bekasi) -1999: DKI Jakarta - 2000 : DKI Jakarta - 2001: Jateng (Brebek) dan Maluku (Saumlaki) - 2002: Jabar (Bekasi)	Usaha mikro/kecil	Masih berjalan (kecuali untuk proyek tahun 1998)	- Sulit mengumpulkan calon penerima kredit mengikuti pelatihan awal - Kegiatan nelayan (melaut) menyebabkan pengembalian kredit terlambat - Adanya ancaman pengusuran (pindah rumah) sehingga menyulitkan penagihan	- Jumlah anggota/kelompok dampingan masih bisa bertambah - Membentuk usaha bersama - Tumbuhnya koperasi
4.2	Baithul Mal Watauil (BMT) BISMI	- Penyediaan Kredit - Pendampingan - Pelatihan - Simpan pinjam	BISMI dan kelompok dampingan	Tahun 2003-sekarang	Jawa Barat (Kota Bekasi)	Individu dan kelompok pedagang kecil	Masih berjalan	Para pedagang belum memiliki sistem pembukuan yang baik	- Kemungkinan dapat diterapkannya sistem bagi hasil - Jumlah peserta dapat bertambah

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
5. Bina Swadaya									
5.1	Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)	- Pembentukan KSM - Pemberian kredit - Pelatihan - Pendampingan - Monitoring dan evaluasi	Bina Swadaya , LSM lain, dan perbankan.	Tahun 1992-1998	5 propinsi, 14 kabupaten	Usaha mikro anggota KSM binaan	Di Bina Swadaya pusat sudah selesai, namun di Bina Swadaya cabang masih berjalan	Pengembalian kredit kurang lancar	
5.2	Pendampingan Kelompok IDT untuk Pengembangan Usaha Mikro	- Pelatihan - Pendampingan	Bina Swadaya	Tahun 1997-2000	4 propinsi, 8 kabupaten	Usaha mikro/kecil	Proyek sudah selesai tetapi di Bina Swadaya cabang masih berjalan		
5.3	Development of Environmentally Oriented Cattle Husbandry and Sustainable Agriculture	- Pendampingan - Dana Stimulan	Bina Swadaya	Tahun 1997-1999	Jawa Timur	Usaha mikro/kecil binaan Bina Swadaya	Selesai		
5.4	Proyek Peningkatan Taraf Hidup masyarakat 4 Desa IDT dan Desa Sepaso, Kec. Sangatta, Kab. Kutai Timur, Kaltim	- Pendampingan - Dana Stimulan	Bina Swadaya	Tahun 1998-1999	Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Timur)	Usaha mikro/kecil binaan Bina Swadaya	Selesai		
5.5	Food Security and Agribusiness Development for Indigenous and Agribusiness People in Buffer Zone of Baliem Valley in Sentani, Papua	- Pelatihan - Pendampingan - Dana Stimulan	Bina Swadaya	Tahun 1998-2003	Papua	Masyarakat Lembah Baliem	Masih berjalan	- Sulit untuk mengakumulasi modal karena faktor budaya - Pengelolaan ekonomi rumah tangga tidak baik.	
5.6	Pengembangan Masyarakat melalui KSM di Kel. Kamal Muara Jakarta Utara	- Pelatihan - Pendampingan - Dana bergulir	Bina Swadaya	Tahun 1998-2001	DKI Jakarta (Jakarta Utara: Kelurahan Kamal Muara)	Masyarakat Kamal Muara	Program ini sudah selesai namun ditingkat kelompok masih berjalan	Masyarakat yang terlayani kebanyakan bukan nelayan, karena nelayan yang berada di lokasi bukan penduduk setempat.	
5.7	Village Social Safety Net in Cope with Economic Crisis	- Penumbuhan KSM - Pelatihan - Pendampingan - Penyaluran kredit	Bina Swadaya	Tahun 1999-2001	9 provinsi, 14 kabupaten/kota	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Program sudah selesai, tapi kredit mikro di setiap wilayah masih berjalan	Dana operasional tinggi.	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
5.8	Development of Appropriate Waste Water Treatment for Small Scale Industry in Semanan, West Jakarta	- Pendampingan - Pelatihan - Monitoring dan evaluasi		Tahun 1998 - 1999	DKI Jakarta (Jakarta Barat)	Usaha kecil	Selesai		
5.9	Proyek ASA	- Sosialisasi - Pembentukan kelompok - Penggalangan tabungan - Penyaluran kredit	Bina Swadaya	Tahun 2003 - sekarang	Jabar (Bogor: Cileungsi), DKI Jakarta (Cakung, Johar Baru, Pademangan)	Kelompok Usaha Mikro (utama perempuan)	Masih berjalan	Kekurangan sumber dana yang murah	Berpotensi menjangkau usaha mikro dalam jumlah banyak karena beroperasi di wilayah padat penduduk yang banyak terdapat usaha mikro dan secara kelembagaan, cabang ASA diberi target tertentu
6. Forum Gerakan Pengembangan Koperasi Indonesia (Formasi Indonesia)									
6.1	Formasi Development Fund (FDF)	- Pemberian kredit - Penyertaan modal/investasi - Pelatihan - Konsultasi - Monitoring dan evaluasi	Formasi (Koordinator Program FDF)	Tahun: -1996-1999 -2000-2002	- DKI Jakarta - Jawa Barat - Jawa Tengah - Jawa Timur - NTB	Mitra dampingan anggota Formasi: - Koperasi/ pra koperasi - Kelompok Usaha Bersama (KUB) .	Selesai (dihentikan sejak awal tahun 2003)	- Periode 1996-1999, pengembalian dana tidak lancar akibat krisis moneter - Periode 2000-2002, hanya dapat menjangkau 3 pilot project usaha koperasi karena ketatnya persyaratan pinjaman	Program ini masih dianggap cukup strategis sebagai alternatif akses permodalan bagi koperasi/pra koperasi dengan persyaratan pengelolaan yang lebih profesional
6.2	Program Pengembangan "Kepemimpinan yang Transformatif" dalam Koperasi	- Pelatihan - Manual Assesment - TOT - Advokasi	LSM Anggota Formasi Indonesia	Februari 2002 - Januari 2005	- DKI Jakarta - Jawa Tengah - NTB	Kader fasilitator, pengurus/pelaksana koperasi pilot dan calon anggota Formasi	Masih berjalan	- Sulit menyesuaikan manual "Kepemimpinan yang Transformatif" - Koperasi dampingan belum seluruhnya menerapkan konsep gender yang tercantum dalam manual	Model kepemimpinan ini sangat tepat untuk mengembangkan koperasi yang berperspektif gender.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
7. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)									
7.1	Proyek Pembangunan Bengkulu (Bengkulu Regional Development Project/BRDP)	Mengkoordinir dan memberikan asistensi teknis kepada Fasilitator Lapangan yang mendampingi masyarakat dalam program kredit mikro pedesaan	LP3ES, PT. Budi Cakra Consultant	Tahun 2002 - 2003	Bengkulu (Kab. Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan)	Keluarga, individu atau kelompok masyarakat (Pokmas) miskin	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pengembalian pinjaman. - Adanya pemahaman dana BPRD hibah (tidak perlu dikembalikan) - Luasnya wilayah Fasilitator Kec. sehingga pembinaan dan kontrol kurang efektif - Sistem pencatatan di UPKD kurang terorganisir - Adanya internal konflik antara kepala desa dengan petugas UPKD. - Analisis Usaha yang disiapkan sangat kaku, formal dan sulit dijalankan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya fasilitas "Open Menu" dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.; - Dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi masyarakat.
7.2	Perluasan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) DKI Jakarta	- Pendampingan - Bantuan teknis	LP3ES, Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat ,	Tahun 2002	DKI Jakarta (Jakarta Pusat)	Masyarakat miskin di DKI	Selesai		Model ini bisa dikembangkan di propinsi lain
7.3	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Pengusaha Mikro dan Sektor Informal di Jakarta	Pelatihan	LP3ES dan BKPAI	Tahun 1997	DKI Jakarta	200 pengusaha mikro dan sektor informal yang sudah terdaftar di Pemda DKI	Selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Sulit mengakomodasi kebutuhan peserta yang beragam menjadi kebutuhan umum - Manfaat pelatihan tidak efektif, karena yang datang bukan pengambil keputusan - Durasi Pelatihan terlalu pendek -Tingkat pendidikan peserta beragam 	
7.4	Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Perempuan	- Pelatihan ketrampilan berbisnis - Pendampingan - Pemberian dana penyertaan modal	LP3ES	Tahun 1996-1998	Jawa Barat (Kabupaten Subang)	Buruh tani perempuan	Selesai, namun di tingkat masyarakat masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Buruh tani sangat sukar mengembangkan usaha - Kurangnya tenaga dampingan di lapangan 	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
8. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sosial Ekonomi (LPPSE)									
8.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kodya Jakarta Timur	- Pelatihan - Konsultasi - Pendampingan - Pemanfaatan Dana Bergulir	LPPSE beserta pendamping lapangan	Tahap I: Mei-Desember 2001 Tahap II: Maret - Desember 2002	Jakarta Timur (Tahap I: 5 kelurahan Tahap II: 60 kelurahan)	I. Pemilik usaha mikro/kecil/ menengah yang masih berjalan dan dapat menyerap tenaga kerja baru setempat II. Masyarakat miskin (KS/ Pra KS) dan korban banjir tahun 2002	Masih berjalan (rencananya akan dilanjutkan sampai tahun 2007)	- Lembaga pelaksana perlu pendamping - Fasilitas kerja kurang memadai - Organisasi dewan terikat Perda No 5/2000 - Aturan main belum jelas	- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perkotaan - Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kemandirian masyarakat - Menanggulangi permasalahan lokal - Menata lingkungan
8.2	Community Base development dealing with Economic Crisis (CBEC) tahun 1998-2000	- Pelatihan - Konsultasi - Pendampingan - Pemanfaatan Dana Bergulir	LPPSE beserta pendamping lapangan	Mei- Desember 1998	Jakarta Barat (3 Kelurahan)	- Masyarakat miskin (KS dan Pra KS) - Masyarakat di RW kumuh	Program sudah selesai tapi di tingkat masyarakat tidak diketahui	- Keterbatasan kemampuan SDM pelaksana - Fasilitas kerja kurang memadai - Aturan main belum jelas - Penanggung jawab pembinaan tidak jelas	Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perkotaan.
9. Pemulihan keberdayaan Masyarakat (PKM)									
9.1	Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM)	- Pemberian dana kepada LSM dan KSM - Monitoring	PKM bersama LSM dan KSM terpilih	Tahun 1998- sekarang	Seluruh Indonesia	Masyarakat miskin yang paling terkena dampak krisis (terutama perempuan dan anak-anak)	Masih berjalan	Kapasitas pelaksana proyek di tingkat KSM/LSM masih relatif rendah.	Berpotensi membantu usaha pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan karena menggunakan pendekatan yang partisipatif.
10. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)									
10.1	Baithul Maal Wat Tamwil (BMT)	- Pelatihan - Kredit - Pendampingan - Simpan pinjam	PINBUK, beserta BMT dampingan	Tahun 1995- sekarang	26 propinsi .	Usaha kecil (pedagang, pengrajin), petani dan peternak	Masih berjalan	- Adanya <i>rush</i> pada masa - masa tertentu terutama menjelang hari raya - Disharmoni antara pengurus dan pengelola.	BMT berpotensi menjadi koperasi karena asetnya banyak yang di atas 50 juta. Bahkan bisa menjadi BPR
11. Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)									
11.1	Program Kredit Mikro PPSW	- Simpan pinjam - Pelatihan - Pendampingan	PPSW, Koperasi Primer, Koperasi Sekunder	Tahun 1986 - sekarang	DKI Jakarta, Banten (Pandeglang), Jabar (Bogor, Bekasi, Karawang, Cianjur, Sukabumi) , Kalbar (Pontianak), Riau (Rokan Hilir)	- Masyarakat akar rumput khususnya perempuan miskin dan berada dalam usia produktif - Kelompok dampingan PPSW	Masih berjalan	- Terdapat kendala dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di PPSW maupun di masyarakat (kelompok dan koperasi) - Kurangnya kapasitas pendamping lapangan PPSW untuk mendampingi perempuan pengusaha - Masih perlunya optimalisasi pendamping dan kader dalam pengembangan kewirausahaan	- Membangun dan mengembangkan lembaga keuangan alternatif untuk perempuan - Lembaga tersebut dapat menjadi <i>pressure group</i> dalam menyuarakan kepentingan perempuan - Lembaga tersebut bisa berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayahnya

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
12. Yayasan Dharma Bakti Parasahabat (YDBP)									
12.1	Penyediaan modal kerja untuk usaha mikro	- Pemberian pinjaman modal kerja - Pembinaan kemandirian usaha	YDBP (Yayasan Dharma Bakti Parasahabat)	Tahun 1999 – sekarang	- Jawa Barat (5 kabupaten) - Jawa Tengah (6 kabupaten)	Wanita pedesaan yang tergolong keluarga pra sejahtera dan memiliki usaha mikro	Masih berjalan	Keterbatasan kapasitas petugas lapangan.	- Meningkatkan usaha anggota. - Meningkatkan kedudukan perempuan dalam keluarga. - Kaum perempuan lebih tegas dalam mengemukakan pendapatan, khususnya dalam kegiatan kelompok
13. Yayasan Mitra Usaha (YMU)									
13.1	Replikasi Grameen Bank (Mitra Usaha Mandiri)	- Pemberian kredit - Pendampingan - Pelatihan	YMU bersama dampingan (Mitra Usaha Mandiri)	Tahun 1998 - sekarang	- Jawa Barat (Bekasi, Indramayu, Subang, Karawang) - Jawa Tengah (Pati, Rembang, Klaten)	Perempuan termiskin di wilayah	Masih berjalan	- Tingkat bunga cukup tinggi, - Grace period dari lembaga keuangan sangat pendek - Masih sedikit lembaga dana yang khusus mensupport LKM - Bertambahnya saingan karena perbankan mulai tertarik kredit mikro	Berpotensi untuk berkembang dan mengembangkan usaha perempuan miskin dengan indikasi: - Banyaknya peminat di setiap lokasi. - Belum ada lembaga yang melayani perempuan miskin.
14. Yayasan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia (Yayasan Pekerti)									
14.1	Product Development (Pengembangan Produksi)	- Pelatihan - Pemberian pinjaman modal tanpa bunga	Pekerti dan pengrajin dampingan	Tahun 1997-1998	Jabar (Sukabumi, Cirebon), Jateng (Pati, Jepara)	Pengrajin kecil pengolah kayu (dakon, ukir, produk rumah tangga) dan rotan (mebel, pernik)	Selesai	-Pengrajin sulit menerima teknologi baru bidang produksi -Ketidakmampuan pengrajin untuk mengukur kebutuhan dan kemampuannya. - Keterbatasan dana.	
14.2	Koperasi Pekerti (Kredit Koperti)	- Simpan pinjam - Pemberian kredit	Pekerti (Koperti)	Tahun 1999-sekarang	- Jawa Barat - Yogyakarta - Jakarta - Jawa Tengah	- Pengrajin kecil binaan - Karyawan Pekerti - Pengrajin mitra (menjual produknya ke Pekerti)	Masih berjalan	Ada anggota yang keluar, padahal masih harus mencicil modal yang dipinjam dari Pekerti	- Dapat dikembangkan menjadi koperasi sekunder - Bertambahnya anggota
14.3	Pelatihan Marketing Plan	Pelatihan	Pekerti	Tahun 1999	Jawa Tengah (Kab Pati dan Jepara)	Pengrajin kecil anggota SIMPATI dan ASPERA	Selesai	- Daya tampung dan dana pelatihan terbatas - Terhentinya pembelian produk oleh Oxfam (tahun 2001) karena Oxfam mengalami kerugian	Pelatihan dapat dilakukan dengan skala yang lebih kecil dan dengan mitra yang lain (namun sampai saat ini Pekerti belum mengupayakannya)
14.4	Kredit Modal Kerja dan Investasi untuk Pengrajin Kecil	Pemberian kredit	Pekerti dan Koperti	Tahun 2000-sekarang	Jawa Barat (Kab Cirebon)	Pengrajin kecil di Cirebon	Masih berjalan	Policy funding yang berubah - ubah karena penggantian program officer	Bertambahnya modal dan bertambahnya nasabah

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
14.5	Pengembangan Masyarakat Pengrajin Marginal	- Pemberian kredit - Pelatihan - Penyusunan <i>strategic planning</i> - Peningkatan kultur bisnis - Pembuatan website	Pekerti	Tahun 2000 - 2001	Jabar (Sukabumi), Jateng (Solo, Jepara, Pati)	Pengrajin kecil yang menjadi mitra kerja Pekerti	Selesai	- Tampilan web site belum optimal; - Pemanfaatan web site untuk pemasaran belum optimal.	Tersedianya ajang promosi kerajinan kecil melalui media elektronik dengan biaya murah dan mudah diakses oleh pembeli mancanegara
14.6	Program Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Perempuan Usaha Kecil (PPEPUK)	- Survey lapangan - Workshop - Sosialisasi - Asistensi - Pemberian modal kerja - Membantu pemasaran melalui pameran lokal	Pekerti	Tahun 2002 - 2003	DKI Jakarta	Ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang belum menjadi pelaku usaha namun mempunyai minat, motivasi, dan potensi kuat menjadi pengrajin	Masih berjalan	- Kurangnya tenaga pendamping - Kesulitan bahan baku sehingga terjadi perubahan usaha dalam waktu yang cepat	- umbuhnya pengrajin - pengrajin baru yang mandiri, - Dapat menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar pengrajin sehingga mengurangi angka pengangguran
15. Yayasan Permata Hati									
15.1	Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pemberian modal	- Pelatihan - Bantuan ternak itik dan ayam buras	Yayasan Permata Hati	Tahun 1997-2003	Banten (Kab/kota Tangerang), Jabar (Cirebon), DKI Jakarta (Jakarta Utara)	Masyarakat kelurahan/desa yang memiliki kemauan untuk berusaha	Program sudah selesai, tetapi sebagian dana masih bergulir di masyarakat	- Pasar yang tidak jelas - Kemauan berusaha yang musiman - Adanya program JPS menyebabkan masyarakat enggan mengembalikan dana, karena mengira dana dari program JPS.	Berpotensi baik karena bantuan pemberdayaan diberikan dalam bentuk hewan/barang (bukan uang) sesuai dengan jenis usaha mikro yang akan dilakukan
15.2	Jasa keuangan simpan pinjam syariah	Simpan Pinjam	Yayasan Permata Hati	Tahun 1987 - sekarang	Banten (Kab/kota Tangerang)	Pedagang kecil /mikro	Masih berjalan	Pengembalian pinjaman tidak lancar karena: - dagangan tidak laku/ditipu, - Adanya program JPS menyebabkan masyarakat enggan mengembalikan dana, karena mengira dana dari program JPS.	Berpotensi dalam mengembangkan anggota binaan yang bukan pedagang sehingga bisa menjadi supplier/pemasok bagi para pedagang.
15.3	Realokasi Pedagang Kaki Lima Sektor Informal di Perkotaan	- Realokasi dan pengusahaan legalitas lokasi - Pengadaan tenda dan gerobak - Pemberian kredit - Pendampingan dan pembinaan	Yayasan Permata Hati bekerja sama dengan kelompok sasaran	Tahun 1998	Banten (Tangerang:Ci pondoh)	- Pedagang kecil sektor informal - kelompok masyarakat miskin - korban PHK	Program sudah selesai, namun masih terdapat kegiatan perguliran dana di masyarakat	- Sulit mendapatkan legalitas dari Pemda - Krisis moneter mengakibatkan lambatnya perguliran dana - Pedagang membutuhkan biaya yang besar untuk mempraktekan materi penyuluhan dan pelatihan	Berpotensi untuk diarahkan pada pedagang produk pokok (sayuran dan kebutuhan dapur) serta sektor peternakan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
16. YPM Kesuma Multi Guna									
16.1	Kredit Mikro	Pemberian pinjaman modal	YPM Kesuma Multi Guna	Mei 1999 - sekarang	DKI Jakarta (Kemanggisian, Kramat Senen, Kamal Muara, Pasar Minggu, dan Pasar Rebo)	Anggota kelompok YPM, memiliki usaha mikro, dengan target utama perempuan	Masih berjalan	- Keterbatasan dana - Kurangnya kemampuan administrasi pengurus - Adanya tunggakan pembayaran - terdapat anggota atau ketua kelompok yang kurang disiplin	- Mampu mengembangkan usaha dan ekonomi keluarga - Meningkatkan peran ibu/wanita dalam keluarga, - Berpotensi menjadi LKM mandiri
16.2	Pelatihan Dasar-dasar Koperasi dan Pembukuan Sederhana serta Managemen Usaha.	Pelatihan	YPM Kesuma Multi Guna	Oktober – Nopember 2001	DKI Jakarta (Kemanggisian, Kramat Senen, Kamal Muara, Pasar Minggu, dan Pasar Rebo)	Anggota kelompok YPM, memiliki usaha mikro, dengan target utama perempuan	Selesai	- Waktu pelatihan terlalu singkat - Kurangnya kemauan anggota menerapkan materi pelatihan dalam praktek usaha mereka	Usaha mikro/kecil dapat menguasai dan menerapkan pembukuan sederhana, serta dapat memisahkan manajemen usaha dengan manajemen rumah tangga.
ORNOP INTERNASIONAL									
1. Care International Indonesia									
1.1	Program Kredit Mikro	- Pemberian kredit - Pelatihan - Pendampingan	Care International Indonesia	Tahun 2003–2005 (Tahap I)	Jawa Barat (4 kabupaten), Banten, DKI Jakarta	Pengusaha mikro (nasabah dari LKM yang terpilih)	Masih berjalan	Tidak mudah mendapatkan LKM yang layak menjadi mitra	- Pengusaha mikro menjadi berpotensi berhubungan dengan bank lain - Program akan dikembangkan pada kelompok simpan pinjam yang tidak dapat mengakses kredit BPR
1.2	Samba Project (The Silk and Micro-Enterprises Development in Bandung Raya Project)	- Pelatihan - Pemberian Kredit	Care International Indonesia, Universitas Bandung Raya	Tahun 2002-2004	Jawa Barat (Kab Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Majalengka, Kuningan)	- Petani sutera dan pengusaha mikro/kecil sutera - LKM	Masih berjalan	Keterbatasan dana petani sutera	Propinsi lain berminat mendapatkan replikasi model (Lampung, Sulawesi Selatan)
2. Catholic Relief Serves (CRS) Indonesia									
2.1	Small Enterprise Development (SED) Sequel Matching Grant	- Menyediakan kredit - Pelatihan bagi Ketua kelompok simpan pinjam dan staf lokal LSM	CRS bersama mitra lokal	Tahun 1993 - 1998	6 propinsi, 15 kabupaten	Masyarakat miskin perempuan dan aktif secara ekonomi	Selesai	Sebagian besar LSM mitra menganggap dana bantuan modal sebagai hibah sehingga tidak dikelola dengan baik dan menyebabkan menurunnya port folio	Kelompok simpan pinjam berpotensi menjadi koperasi

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
2.2	Proyek Village Banking/Kelompok Swadaya Wanita (KSW)	- Penyediaan dana bantuan modal - Bantuan dana pelatihan	CRS, YSBS dan YCS	Januari 1999-September 2000	Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Banyumas, Purbalingga) dan NTT (Kab. Sikka)	Perempuan miskin yang mempunyai usaha mikro	Selesai	- Terdapat kesulitan pengembalian pinjaman kelompok pada putaran ketiga. - Masih lemahnya kemampuan LSM mitra - Terbatasnya kesempatan usaha di Kab. Sikka.	- Membangun koperasi simpan pinjam. - Ketika proyek ini berhenti, satu LSM mitra (YSBS) mampu membiayai kegiatan secara swadaya
2.3	Institutional Transformation for Scale and Self-Sufficiency	Menyediakan dana pinjaman	CRS dan PT. Ukabima	Tahun 1995-2000	Jawa, Bali, NTB	- BPR di wilayah pelaksanaan proyek - masyarakat miskin pemilik usaha mikro di pedesaan, terutama perempuan	Selesai	- PT Ukabima baru beroperasi dan belum mampu berekspansi ke luar Jawa. - Peraturan Bank Indonesia (kenaikan kapitalisasi) menghambat pembentukan BPR. - Pendaftaran BPR memerlukan proses yang sangat lama	- Membentuk BPR-BPR ditempat lain yang mempunyai visi mempromosikan keuangan mikro untuk masyarakat miskin. - PT Ukabima dapat melayani lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan untuk masyarakat miskin
2.4	Program Bantuan Koperasi (Cooperative Assistance Program)	- Bantuan modal berbentuk komoditi - Pelatihan dan bantuan teknik	CRS, ACDI-VOCA Indonesia	Oktober 2000-2001	Jabotabek, Kota Surabaya dan Kota Makassar	Pengusaha mikro yang menggunakan tepung gandum sebagai bahan dasar usahanya	Selesai	- Pelaksanaannya terlambat karena sulit mendapatkan kesepakatan dan penentuan perencanaan akhir dari para pelaku proyek. - <i>Mismanagement</i> menyebabkan kerugian dana yang cukup besar	
2.5	Program Penguatan BPR (Monetization)	- Dana bantuan penyertaan modal untuk Ukabima yang akan dipinjamkan kepada BPR. - Pelatihan dan bantuan teknis bagi Ukabima dan PBR mitra	CRS dan PT. Ukabima	Oktober 2000 - September 2003	Jawa, Bali, Sumatera, dan NTB	BPR mitra Ukabima	Masih berjalan	- Proses pembentukan BPR memerlukan waktu yang panjang. - Banyak program keuangan mikro dari pemerintah yang menetapkan bunga pinjaman lebih rendah - Peraturan BI tentang kenaikan kapitalisasi menghambat	BPR-BPR di bawah binaan Ukabima cukup mendapat bantuan tehnik. Hal ini membuat BPR tersebut mempunyai ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis finansial.
2.6	Program Kredit Khusus untuk Masyarakat Miskin tanpa Agunan (Kusuma)	- Penyertaan modal - Pelatihan - Bantuan Teknik	CRS dan PT. Ukabima	Oktober 1999-September 2003	Jawa	Perempuan yang mempunyai usaha produktif yang menjadi nasabah BPR mitra Ukabima.	Masih berjalan	Program Kusuma sulit berkembang karena di lapangan banyak program yang memberikan pelayanan kredit tanpa agunan dengan jumlah yang besar, lebih fleksibel dan biaya yang lebih murah.	- Program ini mempunyai metode yang baik karena bisa mencapai orang miskin sekaligus memberi keuntungan. - Memiliki upaya pengembangan masyarakat seperti pemberdayaan perempuan dan partisipasi masyarakat.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
2.7	Proyek Ulat Sutera	Pelatihan	CRS dan YSBS Banyumas Sutera Alam	Juni 1999-September 2001	Jawa Tengah (Banyumas)	Petani ulat sutera	Selesai	Petani tidak mengikuti metode yang diberikan pada saat pelatihan sehingga usaha budidaya ulat sutera mengalami kegagalan.	
3. Christian Children Fund Indonesia (CCF)									
3.1	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan (PPKD)	- Pelatihan bagi pendamping/pekerja sosial - Bantuan biaya pelatihan teknis - Bantuan modal usaha - Supervisi dan evaluasi	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2003	8 propinsi	- Keluarga dampingan Ornop mitra yang dinilai siap mengembangkan usaha - Pengurus kelompok dampingan	Masih berjalan	- CCF tidak memiliki tenaga khusus ahli R&D pengembangan usaha kecil - Usaha masih dipandang sebagai kegiatan sosial dan pembelajaran sehingga pengelolaannya seringkali kurang profesional atau kurang ekonomis.	- Ornop mitra memiliki pekerja sosial yang mendampingi kelompok dalam membuat pembukuan/ administrasi usaha. - CCF memiliki sumber dana yang stabil sebagai bantuan modal usaha keluarga dampingan Ornop mitra
3.1.1	PPKD Proyek Belitang Buay Madang	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2000 Tahun 2002-2003	Sumatera Selatan (Kab Ogan Komering Ulu)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.2	PPKD Proyek Rahayu Kasih	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998, 2000, 2001	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang)	Idem	Masih berjalan	Idem	- Idem + - CCF berkesempatan mengembangkan jaringan Ornop mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha keluarga/masyarakat dampingan
3.1.3	PPKD Proyek Tunas Kasih	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-1999 Tahun 2002-2003	DKI Jakarta (Jakarta Barat)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.4	PPKD Proyek Warga Upadaya	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2000	Jawa Barat (Kota Bogor)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.5	PPKD Proyek Lembaga Dana Atmaja	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2002	Lampung (Kab Lampung Tengah dan Lampung Selatan)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.1.6	PPKD Proyek Santa Elizabeth	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1999-2001	Nusa Tenggara Timur (Kab Flores Timur)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.7	PPKD Proyek Kusa Bakti	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.8	PPKD Proyek Mambait Jaya	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang)	Idem	Masih berjalan	Idem	- Idem + - CCF berkesempatan mengembangkan jaringan Ornop mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha keluarga/masyarakat dampingan
3.1.9	PPKD Proyek Megu Wiit	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997 Tahun 2000-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Sikka)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.10	PPKD Proyek Temu Kasih	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Sumba Timur)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Sebagian besar masyarakat memprioritaskan kepentingan adat dari pada kegiatan peningkatan pendapatan	Idem
3.1.11	PPKD Proyek Kawangu Sejahtera	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Sumba Timur)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Adanya <i>mismanagement</i> di tingkat Ornop - Adanya bencana alam (hama belalang) yang sangat merugikan usaha peternakan dan pertanian - Ornop mitra tidak memiliki jaringan pasar yang luas sehingga perkembangan usaha sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan daya beli masyarakat setempat	Idem

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.1.12	PPKD Proyek Siwi Waluyo Jaya	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2003	Lampung (Kab Lampung Tengah)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Kelompok tidak terbiasa dengan pembukuan dan administrasi	- Idem + - CCF berkesempatan mengembangkan jaringan Ornop mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha keluarga/masyarakat dampingan
3.1.13	PPKD Proyek Muri Mada	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998-2002	Nusa Tenggara Timur (Kab Sumba Timur)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Usaha pertanian banyak yang gagal karena hama belalang	- Idem + - Keluarga dampingan memiliki lahan yang cukup yang dapat dimanfaatkan untuk usaha
3.1.14	PPKD Proyek Ruku Ramba	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Ende)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Lokasi warga dampingan terpencar di dusun-dusun terpencil sehingga menyulitkan pendampingan	idem
3.1.15	PPKD Proyek Talaitan Anah	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998 Tahun 2001-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang)	Idem	Masih berjalan	Idem	- Idem + - CCF berkesempatan mengembangkan jaringan Ornop mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha dari keluarga/masyarakat dampingan
3.1.16	PPKD Proyek Dula Luri	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2002	Nusa Tenggara Timur (Kab Sumba Timur)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Usaha pertanian dan peternakan banyak mengalami kegagalan karena serangan hama belalang dan kemarau panjang	Idem
3.1.17	PPKD Proyek Bina Lestari	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1999-2001	Lampung (Kab Tanggamus)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.18	PPKD Proyek Kinasih	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1999, 2000, 2003	Lampung (Kab Tanggamus)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.19	PPKD Proyek Marsudi Siwi	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998-2002	Jawa Tengah (Kab Boyolali)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.1.20	PPKD Proyek Gelekat Lewo	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998-2001	Nusa Tenggara Timur (Kab Flores Timur)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.21	PPKD Proyek Masyarakat Sangup	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997, 1998, 2000, 2002	Jawa Tengah (Kab Boyolali)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.22	PPKD Proyek Tunas Harapan Mandiri	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1999-2003	Jawa Tengah (Kab Cilacap)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.23	PPKD Proyek Bina Mitra Tulakadi	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2002	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Kesadaran masyarakat bekerja sama dalam kelompok masih rendah. - Solidaritas warga/ kelompok masih rendah sehingga mereka tidak merasa perlu untuk menggulirkan dana kepada warga/kelompok lain	- Idem + - Sebagian besar warga dampingan memiliki lahan yang cukup untuk usaha pertanian atau peternakan
3.1.24	PPKD Proyek Tetus Manekat	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Kupang)	Idem	Masih berjalan	Idem	- Idem + - CCF berkesempatan mengembangkan jaringan Ornop mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha keluarga/masyarakat dampingan
3.1.25	PPKD Wesak Welan	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2000-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Ngada)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.26	Peningkatan Pendapatan Keluarga Dampingan Proyek Bhakti Kasih	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2003	Jawa Tengah (Kabupaten Klaten)	Idem	Masih berjalan	idem	Idem
3.1.27	PPKD Proyek Citra Kasih	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-1998 Tahun 2000-2003	Jawa Tengah (Kabupaten Magelang)	Idem	Masih berjalan	idem	Idem
3.1.28	PPKD Proyek K.K. Soegijapranata	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2003	Jawa Tengah (Kota Semarang)	Idem	Masih berjalan	idem	Idem

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.1.29	PPKD Proyek Bina Kasih	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2003	Banten (Kota Tangerang)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Keluarga dampingan sangat individualistis sehingga sulit diorganisir dalam kelompok usaha	Idem
3.1.30	PPKD Proyek Marga Sejahtera	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998 Tahun 2000-2003	DKI Jakarta (Jakarta Selatan)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.31	PPKD Proyek Warga Bahagia	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998-2002	Jawa Barat (Kab Bogor)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.32	PPKD Proyek Vincentius	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1998-2003	Lampung (Kab Tanggamus)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.33	PPKD Proyek Bina Pendidikan	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2000	Jawa Tengah (Kab Cilacap)	Idem	Selesai	Idem	- Idem - Ornop mitra/Proyek memiliki jaringan kerja yang kuat dengan Puskopdit Jawa Tengah
3.1.34	PPKD Proyek Kincir	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-1999 Tahun 2001-2003	DKI Jakarta (Kota Jakarta Barat)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.35	PPKD Proyek Suko Siwi Yakkum	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-2002	Jawa Tengah (Kab Wonogiri dan Sukoharjo)	Idem	Masih berjalan	- Idem - Kepengurusan di tingkat kelompok kurang kuat sehingga pada saat Ornop mitra tidak mendampingi, beberapa usaha menjadi macet/tidak berkembang	Idem
3.1.36	PPKD Proyek Panti Nugeraha	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2003	DKI Jakarta (Kota Jakarta Selatan)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.37	PPKD Proyek Mino Martani	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 1997-1998 Tahun 2000-2003	Jawa Tengah (Kab Banyumas)	Idem	Masih berjalan	Idem	- Idem - CCF berkesempatan mengembangkan jaringan Ornop mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha keluarga/masyarakat dampingan proyek
3.1.38	PPKD Proyek Nak Suko Nian	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2003	Sumatera Selatan (Kota Palembang)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.39	PPKD Proyek Cai Kahirupan	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2002	Jawa Tengah (Kab Cilacap)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.1.40	PPKD Proyek Moris Diak	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Ornop mitra dan warga dampingan belum memiliki keahlian dalam pemasaran hasil usaha.	Idem
3.1.41	PPKD Proyek Karunia	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu)	Keluarga dampingan Ornop mitra/Proyek Karunia, diprioritaskan pengungsi Timor Timur	Masih berjalan	- Idem + - Temperamen para pengungsi yang tidak stabil dan mudah diprovokasi	Idem
3.1.42	PPKD Proyek Laran Luan	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2002	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.43	PPKD Proyek Fajar Kasih	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2000-2002	Nusa Tenggara Barat (Kab Kupang)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - Adanya <i>mismanagement</i>	- Idem - CCF berkesempatan mengembangkan jaringan Ornop mitra sehingga mereka dapat bekerja sama dalam distribusi dan pemasaran hasil usaha keluarga/masyarakat dampingan proyek
3.1.44	PPKD Proyek Nek Matulun	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2002	Nusa Tenggara Timur (Kab Timor Tengah Utara)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.1.45	PPKD Proyek Sinar Harapan	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2003	Nusa Tenggara Timur (Kab Belu)	Idem	Masih berjalan	Idem	- Idem + - Sebagian besar warga dampingan memiliki halaman yang cukup untuk usaha
3.1.46	PPKD Proyek Sidomulyo	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2003	Jawa Tengah (Kab Semarang)	Idem	Masih berjalan	- Idem + - NGO mitra belum memiliki jaringan distribusi/pemasaran produk usaha kelompok (batako/paving)	Idem
3.1.47	PPKD Proyek Anak Musi	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2003	Sumatera Selatan (Kota Palembang)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.48	PPKD Proyek Sriwijaya	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2003	Sumatera Selatan (Kota Palembang)	Idem	Masih berjalan	Idem	Idem
3.1.49	PPKD Proyek Ngudi Makmur	Bantuan modal usaha	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2003	Jawa Tengah (Kab Jepara)	75 orang pengurus kelompok dampingan Ornop mitra	Selesai	Idem	Idem
3.1.50	PPKD Proyek Pansos Bodronoyo	Idem	CCF Indonesia dan Ornop Lokal	Tahun 2001-2002	Sumatera Selatan (Kota Palembang dan Kab Ogan Komering Ilir)	Idem	Selesai	- Idem + - Usaha pertanian mengalami kegagalan sehingga petani sulit mengembalikan pinjaman - Mekanisme dana bergulir tidak sesuai dengan kebijakan CCF Pusat sehingga CCF Indonesia harus mencari sumber dana lain	Idem
4. Mercy Corps									
4.1	Program Pengembangan Institusi Keuangan Mikro (MFIDP)	- Memberi dukungan dana kepada penyedia jasa MFI - Merumuskan kebijakan yang kondusif - Pemberian kredit mikro kepada usaha kecil	Mercy Corps bersama dengan Ornop lokal	Tahun 1999 - sekarang	8 Propinsi (Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Banten, DIY)	Koperasi, LSM, BMT, credit union, institusi Apex, LKM, Penyedia jasa LKM, usaha kecil/mikro	Masih berjalan	- Sifat pendanaan (hibah) kurang efisien - Sulit untuk memenuhi kriteria sasaran - Perlu UU LKM untuk pengakuan keberadaan LKM - Perlu kebebasan untuk menetapkan kebijakan dan fleksibilitas dalam menjalin kerjasama dengan Bank.	
			Yayasan Paluma	Maret 2000-September 2000	DKI Jakarta				

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
			Women in Social Solidarity of Indonesia (WISS)	Maret 2000-Juli 2002	DKI Jakarta				
			Youth Ending Hunger (YEH)	Mei 2000-Desember 2000	DKI Jakarta				
			Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM)	Juni 2000-Januari 2001	Jawa Barat				
			Yayasan Bina Swadaya Bogor-Bekasi	Mei 2000-November 2002	Jawa Barat (Kab Bogor-Bekasi)				
			Koperasi Pokmas Teratai	Mei 2000 - Agustus 2002	Jawa Barat				
			Yayasan Srikandi Sejati	Oktober 2000-Juni 2001	DKI Jakarta				
			YPM Kesuma Multiguna	April 2000-April 2002	DKI Jakarta				
			Lembaga Pengembangan Masyarakat Indonesia	Mei November 2000	DKI Jakarta				
			Yayasan Ridho Mukti Farm	Februari 2002-Februari 2003	Jawa Tengah				
			BMT Mardlotillah	Maret 2002-Juni 2003	Jawa Barat				
			Yayasan Pumma Indonesia	Agustus 2001-Agustus 2002	Sumatera Selatan				
			KSU BMT Muamalah Pacitan	November 2001-Februari 2003	Jawa Timur				
			Kiat Bumi Mandiri Ponorogo	November 2001-November 2002	Jawa Timur (Kab Ponorogo)				
			Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Cilacap	Agustus 2001-Agustus 2002	Jawa Tengah (Kab Cilacap)				
			Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Februari 2002-Februari 2003	DKI Jakarta				
			Yayasan Islam Miftahul Huda (YASMIDA)	September 2001-Desember 2002	Lampung				
			Yayasan Bina Potensi Masyarakat (YAPIM)	Agustus 2001-Agustus 2002	Jawa Timur				

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
			Yayasan Citra Ummat	Agustus 2002- Agustus 2003	Jawa Timur				
			Koperasi BMT "Binna Ummat"	Oktober 2001- Mei 2002	Jawa Timur				
			PUSKOPDIT "Bekatigade"	Juli 2001-Juli 2002	DIY				
			PUSKOPDIT "Bekatigade"		Jawa Tengah				
			Social Analysis and Research Institute (SAR)	Juli 2001-Juli 2002	Jawa Tengah				
			Lembaga Pengembangan Usaha Kecil	September 2001-Juni 2002	Jawa Tengah				
			Yayasan Mitra Usaha	Mei 2001-Juli 2002	Jawa Tengah				
			BMT Assalam	Agustus 2001- November 2002	Jawa Barat				
			Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia (YPSI)	Maret 2000- Juli 2002	DKI Jakarta				
			Suara Ibu Peduli	Desember 2000- November 2001	DKI Jakarta				
			Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSW)	Desember 2000- Desember 2001	Jawa Barat				
			Alisa Khadijah / Sahabat Usaha Alisa (SUA)	Oktober 2000- Agustus 2002	Jawa Barat				
			Yayasan Bina Sumber Daya Mitra (BISMI)	Desember 2000- Desember 2001	DKI Jakarta				
			Yayasan Tirta Guna	Agustus 2001- April 2002	Banten				
			Yayasan Setia Kawan Mandiri (SEKAM)	Agustus 2001- Agustus 2002	DKI Jakarta				
			Yayasan Iqbal Abieza Mahardhika	Oktober 2001- Agustus 2002	Jawa Barat				
			LSM Airmas	Mei 2001-Maret 2003	DKI Jakarta				

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
			Tiasa-Sumbangsih Nuansa Tasikmalaya (SNT)	Desember 2000-Juni 2002	Jawa Barat (Kab Tasikmalaya)				
			Wanita Islam	Desember 2000-Juni 2001	DKI Jakarta				
			Yayasan Ar-Rufi	Desember 2000-Desember 2001	Jawa Barat				
			Yayasan PUKAS	Desember 2000-Mei 2003	Jawa Barat				
			BMT Imarotul Muslimin-YGAS	Desember 2000-Desember 2001	DKI Jakarta				
			Yayasan Pembinaan Pengembangan SDM & Lingkungan (DIALOG)	Agustus 2001-November 2002	Jawa Timur				
			LPSP	Juli 2001-Juli 2002	Jawa Timur				
			Yayasan Karya Mandiri Indonesia (YKMI)	September 2001-Desember 2002	Jawa Timur				
			Lembaga Penelitian UNDIP	Januari 2002-Januari 2003	Jawa Tengah				
			Kelompok Tani Hutan Agrowilis	Juli 2001-Juli 2002	Jawa Tengah				
			Yayasan Bina Vitalis Cabang Bengkulu	September 2001-September 2002	Bengkulu				
			Yayasan Cakrawala Timur	November 2000-Agustus 2002	Jawa Timur				
			Koperasi Ngesti Rahayu	Maret 2002-Maret 2003	Jawa Timur				
			Yayasan PERAMU	April 2002-April 2003	Jawa Barat				
			BMT Ibadurrahman	Maret 2002-Maret2003	Jawa Barat				
			Yayasan SkeMa	Agustus 2002-Agustus 2003	Jawa Barat				

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
			KBMT Dana Ukhuwah	Februari 2002- Agustus 2004	Jawa Barat				
			Yayasan Setia Kawan Raharja (SEKAR)	Maret 2002- Maret 2003	DKI Jakarta				
			Yayasan Pekerti	April 2003-April 2004	DKI Jakarta				
			Koperasi Serba Usaha BMT Ar-Ridwan	Mei 2003-Juli 2004	Jawa Barat				
			KSM Yekti Insan Sejahtera		Jawa Tengah				
			Koperasi BMT Fajar		Lampung				
			BMT Baskara		Lampung				
			Mercy Corps bersama ORNOP lokal	Dimulai Tahun 2003	Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten				
			Yayasan Kalpataru Nusa Lestari		Jawa Barat				
			Yayasan Gamping Sumber Rejeki		Jawa Barat				
			Yayasan Genta Lingkungan	Desember 2000- Desember 2001	Jawa Barat				
			Koperasi Agromadani PUPUK		Jawa Barat				
			PINBUK JATIM	Maret 2001- Juni 2001	Jawa Timur				
			Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)	Mei 2003-Juni 2003	DKI Jakarta				
			Asosiasi Keuangan Mikro (AKM)	Januari 2003- Januari 2004	DKI Jakarta				
			BMT Al Husna	Oktober 2000- April 2001	Banten				
			Koperasi BMT Fajar		Lampung				
			BMT Baskara		Lampung				
4.2	Jasa Pengembangan Usaha (Business Development Services- BDS)	Jasa pengembangan usaha	Mercy Corps bersama LSM lokal	Dimulai Tahun 2003	4 provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten)	UKM dan penyedia jasa pengembangan usaha	Pelatihan masih berlanjut, tetapi subsidi dikurangi	- Sulit untuk mengembangkan BDS bagi usaha mikro - Pelatihan lebih mudah diberikan kepada usaha kecil daripada mikro	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
			Yayasan Kalpataru Nusa Lestari		Jawa Barat				
			Yayasan Gamping Sumber Rejeki		Jawa Barat				
			Yayasan Genta Lingkungan	Desember 2000- Desember 2001	Jawa Barat				
			Koperasi Agromadani		Jawa Barat				
			PUPUK		Jawa Barat				
			PINBUK JATIM	Maret 2001- Juni 2001	Jawa Timur				
			Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal	Mei 2003-Juni 2003	DKI Jakarta				
			Asosiasi Keuangan Mikro (AKM)	Januari 2003- Januari 2004	DKI Jakarta				
			BMT Al Husna	Oktober 2000- April 2001	Banten				

**Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997 - 2003
Kelompok Perusahaan/Koperasi**

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
1. PT Astra International Tbk									
1.1	Modal Ventura	- Penyertaan modal untuk modal kerja dan investasi - Pembinaan sumber daya manusia (SDM), teknologi, pasar, dan manajemen	PT Astra Mitra Ventura - PT Astra International Tbk	Tahun 1992 – sekarang	8 propinsi di Jawa dan Sumatera	Usaha kecil dan menengah yang berbadan hukum	Masih berjalan	Karakter usaha kecil dan menengah yang kurang transparan	Perkembangan usaha dari UKM yang dibina relatif berhasil.
1.2	Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah	- Penyediaan program pelatihan, pendampingan, pameran, dan temu usaha - Bantuan akses pada pembiayaan	Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) - PT Astra International Tbk	Tahun 1980 sekarang	Seluruh Indonesia, prioritas 7 wilayah kerja Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)- Astra: Jakarta, Bandung, Tegal, Yogyakarta, Sidoarjo, Mataram, dan Batam	Usaha kecil (termasuk usaha mikro) dan menengah yang memiliki perijinan dan mempunyai produk berpotensi pasar	Masih berjalan	- Karakter SDM UKM (bermental pedagang bukan usahawan); - Lingkungan ekonomi makro yang cepat berubah;	Pemberdayaan UKM semakin meningkat karena meningkatnya alokasi pendanaan untuk kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran berbagai pihak terkait terhadap pengembangan UKM
2. PT Bahana Artha Ventura									
2.1	Pembiayaan Mikro (<i>Micro Investment</i>)	Pembiayaan modal ventura dengan pola bagi hasil	PT Bahana Artha Ventura	Tahun 1994- sekarang	26 provinsi yang terdapat Kantor cabang PT Bahana Artha Ventura	Usaha mikro	Masih berjalan	- Secara umum tidak ada masalah. - Ada kesenjangan antara peminjam yang terdidik dengan yang kurang terdidik.	Potensi sangat besar, karena bank belum mampu melayani semua usaha kecil
3. Koperasi Bina Masyarakat Mandiri									
3.1	Pelayanan Pinjaman untuk Usaha Mikro	Pemberian pinjaman modal kerja	Koperasi Bina Masyarakat Mandiri	Oktober 1998 – sekarang	10 provinsi (24 wilayah)	Usaha mikro anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang telah dibina LPUM	Masih berjalan	- Tingkat pengembalian yang tertunda - Jumlah dana belum memenuhi semua permintaan	Terjadi peningkatan ekonomi usaha mikro

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
4. PT Caltex Pacific Indonesia (CPI)									
4.1	Program Pengembangan Masyarakat (PPM)	- Pemberian pelatihan dan pembinaan - Bantuan sarana produksi	PT Caltex Pacific Indonesia (CPI)	PPM secara umum dimulai tahun 1950an – sekarang	Provinsi Riau, khususnya di sekitar empat distrik utama operasi PT CPI	Masyarakat sekitar, baik yang sudah memiliki usaha (usaha kecil/ mikro) maupun tidak dan tidak dibedakan laki-laki dan perempuan	Masih berjalan		Meningkatkan pengetahuan dan pendapatan masyarakat yang menjadi sasaran, sekaligus menjadikan sasaran sebagai teladan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat lainnya.
4.2	<i>Local Business Development</i> (LBD)	Pemberian paket kontrak usaha maksimal Rp 200 juta	PT Caltex Pacific Indonesia (CPI)	Tahun 2001 – sekarang	Provinsi Riau, khususnya sekitar empat distrik utama operasi PT CPI	Usaha kecil dan menengah setempat yang memiliki kegiatan usaha (<i>output</i>) yang sesuai dengan kebutuhan PT CPI	Masih berjalan	Masih kurangnya informasi tentang kondisi dan potensi masyarakat	Memberi kesempatan UKM setempat untuk bersaing dalam bisnis sekaligus mendorong keberlanjutan usahanya
5. PT ISM Bogasari Flour Mills									
5.1	Program Kemitraan Usaha dengan Usaha Kecil dan Menengah	- Pelatihan - Penyediaan informasi - Dukungan keuangan - Pemberian motivasi usaha - Dukungan pemasaran - Penyediaan konsultasi - Pembentukan jaringan pasokan bahan baku - Pembentukan koperasi dan paguyuban - Penyediaan alat	PT ISM Bogasari Flour Mills	Tahun 1981 – sekarang	Di sembilan propinsi (seluruh Jawa, Lampung, Sumatera Selatan Kalimantan Selatan)	Usaha kecil (termasuk mikro), menengah dan koperasi yang mempunyai kaitan bisnis dengan PT ISM Bogasari Flour Mills	Masih berjalan	- Terbatasnya sumberdaya PT ISM Bogasari dibandingkan dengan jumlah mitra yang banyak dan tersebar - Masih kurangnya wawasan bisnis dari perusahaan mitra	Berpotensi utk mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi yang bermitra karena pemberdayaannya dilakukan pada seluruh aspek usaha.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
6. Pertamina									
6.1	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman modal kerja dan investasi - Pendidikan/pelatihan, pengkajian/penelitian dan pemagangan - Pemasaran dan promosi hasil produksi 	Pertamina, PUKK	Tahun 1993 - sekarang	Seluruh Indonesia, dengan prioritas daerah sekitar operasi pertamina (23 lokasi)	Usaha kecil (termasuk usaha mikro) dan koperasi yang memenuhi persyaratan	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran pinjaman tidak lancar - Dana yang tersedia tidak dapat memenuhi semua permintaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki kegiatan usaha pengusaha kecil dan koperasi menjadi tangguh dan mandiri (dalam realisasi masih di bawah target Pertamina)
7. PT Pos Indonesia (Persero)									
7.1	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman modal - Pemantauan perkembangan usaha - Penyertaan mitra dalam pameran - Penyediaan studi banding - Pemberian pelatihan 	PT Pos Indonesia (Persero), PUKK	Tahun 1993 sekarang	Seluruh provinsi di Indonesia	Usaha kecil yang berbadan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) atau perorangan (pengrajin atau industri rumah tangga).	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM PUKK PT Pos - Keterbatasan dana - Alamat mitra tidak jelas atau pindah alamat tanpa pemberitahuan - Adanya tunggakan - Persepsi keliru dari masyarakat bahwa dana bersifat hibah dari pemerintah, sehingga tidak perlu dikembalikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memajukan usaha kecil (termasuk mikro) dan koperasi. - Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
8. PT Pupuk Kaltim Tbk									
8.1	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	- Pemberian pinjaman modal - Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan, - Bantuan pemasaran produk dan pengembangan teknik produksi	PT Pupuk Kaltim Tbk Biro PKBL (sebelumnya bernama Biro PUKK)	Tahun 1989 sekarang	Seluruh provinsi di Kalimantan	Usaha kecil (termasuk usaha mikro) dan koperasi.	Masih berjalan.	- Tumpang tindih program untuk mitra binaan yang sama. - Tunggakan cenderung meningkat - Biaya penagihan, evaluasi dan pembinaan sangat tinggi karena binaan tersebar dan minimnya sarana prasarana transportasi.	- Komoditi mitra binaan berorientasi ekspor - Terdapat produk baru yang berprospek dikembangkan - Terbentuknya sentra kerajinan - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan jiwa entrepreneurship

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
9. PT Sucofindo									
9.1	Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pinjaman dana untuk modal kerja dan investasi - Pemberian bantuan konsultasi manajemen melalui pelatihan dan pendampingan serta bantuan pemasaran dan promosi 	PT Sucofindo Unit PUKK	Tahun 1991 sekarang	19 provinsi	Usaha kecil (termasuk mikro), dan koperasi	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya operasional cukup tinggi dan sangat menyita waktu - Karakter pengusaha yang tidak disiplin dalam penggunaan dana. - Penarikan pajak papan nama usaha mitra binaan yang ditujukan untuk menghindari tumpang tindih program dengan BUMN lain. 	Berpotensi mengangkat pengusaha kecil menjadi pengusaha besar.
10. PT Unilever Indonesia									
10.1	Sustainable SME Development	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kesempatan berusaha - Pelatihan - Pinjaman modal kerja dan investasi serta bantuan akses pada lembaga keuangan lain - Pemberian bantuan akses pasar 	PT Unilever Indonesia	1980 – sekarang	Seluruh Indonesia dengan pengembangan saat ini di 3 provinsi	Usaha kecil (termasuk mikro) dan menengah yang mempunyai kaitan bisnis dengan PT Unilever	Masih berjalan	Lemahnya kemauan mitra dalam mengembangkan bisnis	Semakin banyak usaha kecil dan menengah yang terlibat dan tumbuh bersama dengan Unilever.

Peta Penguatan Usaha Mikro dan Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997 - 2003
Kelompok Lembaga Perbankan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
1. Bank Indonesia (BI)									
1.1	Kredit Program	Penyediaan kredit melalui 17 Skim Kredit Program, antara lain: KUT, KKPA, KKop, KPR-S, KPR-SS.	BI, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Tahun 1983-1999	Seluruh Indonesia	Golongan ekonomi lemah dan koperasi	Dihentikan sejak tahun 1999	Dengan adanya UU No. 23 Tahun 1999, BI tidak boleh lagi menyalurkan kredit, yang berarti kredit program sudah tidak ada lagi.	Potensinya tidak ada lagi, Pengelolaan kredit eks KLBI yang masih ada diserahkan kepada BRI, BTN dan PNM, dan akan ditarik secara bertahap dalam jangka waktu 5 tahun sampai akhir tahun 2004.
1.2	Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas jangkauan pelayanan bank kepada pengusaha mikro - Meningkatkan efisiensi KSM - Pengikatan kerjasama dengan bank umum - Meningkatkan kerjasama dengan BPR melalui pelatihan - Mendorong fungsi LPSM pada pembinaan dan pelatihan - Membentuk forum LPSM partisipan PHBK: ALTRABAKU - Meningkatkan kerjasama dengan program lain - Membentuk satuan tugas National Task Force (NTF) - Melakukan pengkajian terhadap Pokmas 	BI, bank umum, BPR dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)	Tahun 1989-sekarang	14 provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) - Kelompok Simpan Pinjam - Kelompok Pengusaha Mikro (KPM). 	Masih berjalan tetapi tanpa pembinaan dan bantuan teknis dari BI	- Krisis ekonomi menyebabkan banyak bank mengalami collaps dan tidak mampu lagi menyalurkan kredit sehingga program PHBK mengalami penurunan - tidak ada lagi dana pendukung dari donor sehingga masing-masing bank Pelaksana melakukan kegiatan PHBK sendiri sendiri	Potensi PHBK menurun setelah krisis. Sekarang BI mengarahkan bank pada kegiatan PHBL, yaitu menjalin kemitraan dengan LKM. BI hanya memberi pembinaan tanpa ikut terjun secara langsung sehingga potensinya juga sangat relatif.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
1.3	Program Pengembangan Usaha Kecil (PPUK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan staf perbankan/<i>counterpart</i> - Survei peluang usaha pada sub sektor tertentu (SPID) - Membentuk Tim Proyek Pengembangan Pengusaha Kecil (P3K) - Memperluas jaringan kepada Unit Pengembangan Usaha Kecil (UPUK) - Melakukan Proyek Kemitraan Usaha Kecil Terpadu (PKUKT) - Melakukan <i>Counterpart Training</i> kepada pejabat pemberi kredit - Membuat pola pinjaman untuk PKUKT - Identifikasi dan pembinaan Program Kemitraan Terpadu 	BI dan bank umum	Tahun 1978-1999	10 provinsi	Usaha kecil dan usaha besar yang memiliki hubungan kemitraan, serta bank sebagai pemberi kredit	Selesai	Setelah keluarnya UU No. 23 Tahun 1999, peran BI dibatasi hanya pada kebijakan kredit perbankan, pengembangan kelembagaan, dan pemberian bantuan teknis perbankan, sementara pembinaan yang bersifat non perbankan dan pemberian kredit program tidak ada lagi sehingga peran BI dalam PPUK tidak dapat lagi dilakukan secara penuh	Potensinya kecil, karena setelah tahun 1999 PPUK dilebur kedalam PUKM, yang ternyata peranannya justru semakin menurun. Hal ini akibat dibatasinya kewenangan BI.
1.4	Proyek Kredit Mikro (PKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Pendampingan - Konsultasi - Penyediaan materi pembinaan - Pemberian kredit 	BI: Unit Pelaksana Proyek (UPP), BPR dan LPSM	Tahun 1995-2001	15 provinsi	Rakyat miskin dan mendekati miskin di pedesaan, khususnya tuna wisma, pengangguran, buruh tani dan kaum wanita	Selesai	Proyek berakhir dan dana harus dikembalikan ke BI	Potensi terhadap upaya peningkatan ekonomi perempuan cukup besar karena sekitar setengah (49%) dari jumlah nasabah merupakan nasabah perempuan
1.5	Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SI-PUK)	Penyediaan jaringan informasi dan <i>database</i> berbasis internet	BI	Tahun 1999-sekarang	Seluruh Indonesia (dapat diakses melalui internet)	Usaha kecil dan masyarakat umum yang ingin melakukan usaha mikro	Masih berjalan	Banyak usaha kecil/mikro tidak memiliki pengetahuan tentang komputer dan mampu mengakses informasi melalui internet	Memberi kemudahan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi dalam upaya mengakses kredit dan mengembangkan usaha

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
1.6	Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (PUKM)	Memberikan bantuan teknis pengembangan usaha kecil dan mikro kepada lembaga perbankan melalui pelatihan, penelitian dan penyediaan sistem informasi	BI	Tahun 1999-sekarang	Seluruh Indonesia	Lembaga perbankan	Masih berjalan	Keterbatasan dana untuk kegiatan pelatihan dan penelitian	Potensi baik karena banyak bank yang sekarang mulai tertarik memberikan pelayanan kredit mikro dan kecil
2. Bank Bukopin									
2.1	Swamitra	- Membentuk Swamitra yang merupakan kerjasama dengan koperasi untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada usaha kecil dan mikro berupa - Memberi bimbingan teknis dan sistem manajemen kepada Swamitra - Menyediakan modal	Bank Bukopin	Tahun 1998-sekarang	19 provinsi, 71 kabupaten	Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Masih berjalan	- Modal dari pihak ketiga yang dapat disalurkan kepada Swamitra masih terbatas - Monitoring belum mampu menjangkau semua nasabah - Infrastruktur yang tidak selalu tersedia di Swamitra	- Potensi sangat baik karena jaringan Swamitra semakin berkembang - Menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti Pemda dan Kementerian Kelautan dan Perikanan - Mendapat award dalam Asian Banking Award 1999
2.2	Kredit Sudara	Penyediaan kredit modal kerja	Bank Bukopin (Kantor Cabang atau melalui Swamitra, LKM, BPR dan Koperasi)	Tahun 2001-sekarang	Jawa Tengah (Semarang)	Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera 1, keluarga miskin dan atau yang semula miskin, khususnya perempuan, yang memiliki usaha eceran kios/warung/ kedai yang menetap	Masih berjalan	- Keterbatasan dana - Monitoring belum mampu menjangkau semua nasabah - Ketersediaan infrastruktur yang tidak selalu ada	- Berpotensi tetapi dibatasi ketersediaan dana - Berpotensi memberdayakan perempuan karena program ditujukan pada kaum perempuan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
2.3	Kredit Sudara Perluasan	Penyediaan kredit modal kerja	Bank Bukopin (Kantor Cabang atau melalui Swamitra, LKM, BPR dan Koperasi)	Tahun 2001-sekarang	5 provinsi (Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Banten), 7 kota/kabupaten	Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, keluarga miskin dan atau yang semula miskin, khususnya perempuan, yang memiliki usaha eceran kios/warung/ kedai yang menetap	Masih berjalan	- Keterbatasan dana - Monitoring belum mampu menjangkau semua nasabah - Ketersediaan infrastruktur yang tidak selalu ada	- Berpotensi tetapi dibatasi ketersediaan dana - Berpotensi memberdayakan perempuan karena program ditujukan pada kaum perempuan
2.4	Kredit Pundi	Penyediaan kredit modal kerja dan investasi	Bank Bukopin	Tahun 2001-sekarang	Seluruh Indonesia	Keluarga Pra Sejahtera, KS-I, keluarga yang semula miskin, TKI, dan pemilik usaha kecil yang mempekerjakan keluarga miskin yang memiliki usaha produktif yang telah tumbuh dan sedang berkembang	Masih berjalan	- Keterbatasan dana - Monitoring belum mampu menjangkau semua nasabah - Ketersediaan infrastruktur yang tidak selalu ada	- Berpotensi tetapi dibatasi ketersediaan dana - Berpotensi memberdayakan perempuan karena program ditujukan pada kaum perempuan
2.5	Kukesra Mandiri	Penyediaan kredit modal kerja	Bank Bukopin	Tahun 2001-2002	11 provinsi, 16 kota/kabupaten	Kelompok UPPKS yang telah dibina dan direkomendasi oleh BKKBN untuk mendapatkan fasilitas Kukesra Mandiri	Selesai	- Keterbatasan dana - Monitoring belum mampu menjangkau semua nasabah - Ketersediaan infrastruktur yang tidak selalu ada	- Berpotensi tetapi dibatasi ketersediaan dana - Berpotensi memberdayakan perempuan karena program ditujukan pada kaum perempuan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3. Bank Central Asia (BCA)									
3.1	Program Kredit Peduli Usaha Mikro BCA	Penyediaan kredit modal kerja	BCA dan BPR	Maret 2002 - sekarang	12 provinsi	Pengusaha mikro dan kecil yang membutuhkan kredit modal kerja maksimal Rp 10 juta	Masih berjalan	Masalah umum yang biasa dihadapi nasabah yaitu dalam pemenuhan persyaratan perbankan, meskipun kredit ini tidak mensyaratkan jaminan	Potensi sangat baik dan upaya ini akan diperluas ke Indonesia bagian Timur
3.2	Program Kemitraan dengan Perum Pegadaian	Gadai	BCA dan Perum Pegadaian	Maret 2002 - sekarang	DKI Jakarta	Nasabah Perum Pegadaian yang membutuhkan dana maksimal Rp 50 juta	Masih berjalan	Hampir tidak ada masalah karena gadai dilakukan dengan jaminan barang bergerak yang nilainya lebih besar	Potensi sangat baik dan upaya ini akan diperluas ke Indonesia bagian Timur
4. Bank Mandiri									
4.1	Kredit Usaha Kecil (KUK)	Penyediaan kredit investasi dan modal kerja melalui: - Kredit Investasi - Kredit Modal Kerja - Kredit Modal Kerja Kontraktor - Kredit <i>Channeling</i>	Bank Mandiri	Tahun 1998 - sekarang	Seluruh Indonesia	Usaha kecil (dan mikro)	Masih berjalan	- Masalah jaminan dan penjaminan - BUMN dibatasi untuk menjadi penjamin - Monitoring kurang - Persyaratan minimal untuk usaha kecil (misal KTP) tidak selalu bisa dipenuhi+I20 - Menganggap sumber dana dari pemerintah sebagai hibah	- Potensi sangat besar, karena bank belum mampu melayani semua usaha kecil - Pemerintah telah meng- <i>'create demand'</i> untuk usaha kecil agar bisa berhubungan dengan bank
4.2	Kredit Program: Kredit Ketahanan Pangan (KKP)	Penyediaan kredit investasi dan modal kerja	Bank Mandiri	Tahun 2001 - sekarang	Seluruh Indonesia	Petani, peternak, dan koperasi dalam rangka pengadaan pangan	Masih berjalan	- Banyak koperasi atau kelompok tani yang menunggak kredit program sebelumnya - Masalah monitoring - Karakter masyarakat yang menganggap kredit program dari pemerintah tidak perlu dikembalikan.	Kurang berpotensi karena kredit program berbunga lunak (bersubsidi) tidak mendidik dan penerima program seringkali bukan orang yang berhak

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
4.3	Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)	Penyediaan kredit investasi dan modal kerja	Bank Mandiri	Tahun 1998-sekarang	Seluruh Indonesia	Anggota koperasi primer yang membutuhkan dana maksimal Rp 50 juta.	Sejak 1999 dana eks KLBI ditarik dan pengelolaannya dialihkan ke PNM	<ul style="list-style-type: none"> - Dana terbatas sedangkan permintaan tinggi. - Pergantian pengurus/masalah intern koperasi - Masalah pemenuhan persyaratan dan jaminan - Nasabah sering tidak menerima perbedaan tingkat suku bunga. 	Kurang berpotensi karena kredit program bunga lunak (bersubsidi) tidak mendidik dan penerima program seringkali bukan orang yang berhak
4.4	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)	Penyediaan kredit investasi dan modal kerja	Bank Mandiri	Tahun 1989-sekarang	Seluruh Indonesia	Usaha kecil dan mikro yang masih lemah dan perlu pembinaan	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana terbatas karena tergantung pada penyisihan laba bank - Kredit murah, sehingga banyak yang memanfaatkan untuk keperluan di luar target program 	Potensi kurang karena jumlah dana terbatas dan kredit bunga lunak tidak mendidik

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
5. Bank Negara Indonesia (BNI)									
5.1	Kredit Mikro	Penyediaan kredit investasi dan modal kerja	BNI (Unit Layanan Mikro-ULM di BNI Cabang)	Tahun 2001-sekarang	Seluruh Indonesia (melalui 151 ULM di Kantor Cabang BNI)	Masyarakat kecil yang memiliki usaha	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas pembukaan ULM yang terbentur kebijakan BI, yaitu ULM dianggap sebagai Kantor Cabang/Capem - Masalah kelayakan usaha dari usaha mikro (lemahnya permodalan, administrasi, jangkauan pasar, dan legalitas usaha) - Masalah pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit, seperti KTP dan agunan 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi besar karena - Jumlah usaha mikro lebih besar dibanding usaha menengah dan besar - Pengembangan pendekatan kepada nasabah dengan konsep mikro - Menetapkan batas rayon pembinaan usaha mikro, dengan menggunakan orang setempat
5.2	Kredit kepada Koperasi (Kkop)	Penyediaan kredit	BNI (sistem <i>channeling</i>)	Tahun 1998-sekarang	Seluruh Indonesia	Koperasi dan LSM yang memiliki usaha	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah kelayakan usaha koperasi (lemahnya permodalan, administrasi, jangkauan pasar, legalitas dan agunan) - Masih besarnya tunggakan kredit sebelumnya 	Skim kredit program dinilai sudah tidak tepat lagi, tidak mendidik dan terlalu birokratis, sebaiknya diarahkan kepada kredit mikro atau KUK
5.3	Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)	Penyediaan kredit investasi dan modal kerja	BNI	Tahun 1998-sekarang	Seluruh Indonesia	Anggota koperasi primer	Sejak 1999 dana eks KLBI ditarik dan pengelolaannya dialihkan ke PNM	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan akses memperoleh kredit bank - Lemahnya permodalan, administrasi, jangkauan pasar, legalitas dan agunan dari koperasi 	Program kredit bunga lunak tidak mendidik dan sering tidak tepat sasaran, sebaiknya tidak dilanjutkan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
5.4	Kukesra Mandiri	Penyediaan kredit	BNI (sistem <i>channeling</i>)	Tahun 2001-sekarang	Jawa dan Sulawesi Selatan (di Cabang tertentu)	Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	Masih berjalan	- Terlalu birokratis - Pembinaan dari BKKBN terhadap kelompok UPPKS kurang	- Program kredit berbunga lunak tidak mendidik dan sering tidak tepat sasaran, sebaiknya tidak dilanjutkan - Memberdayakan ekonomi perempuan karena peserta program ini umumnya perempuan
6. Bank Niaga									
6.1	Kredit Program : - Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA-Umum) - Kredit Ketahanan Pangan (KKP) - KKPA TKI	Penyediaan kredit investasi dan modal kerja	Bank Niaga (Desk UKM)	Tahun 2000-sekarang	Seluruh Indonesia	Anggota koperasi dengan kegiatan usaha produktif, bersifat massal dan seragam; kebanyakan bergerak di sektor agrobisnis	Masih berjalan	Mayoritas <i>End user</i> terdiri dari petani dan peternak yang: - Sulit menerima perubahan (misal, tingkat bunga atau biaya administrasi) - Tanda tangan sering berubah atau tidak sesuai dengan kartu identitas (KTP)	More promising than corporate banking
6.2	Kerjasama dengan Lembaga Keuangan : - BPR - Multifinance	Penyediaan kredit investasi dan modal kerja	Bank Niaga (Desk UKM)	Tahun 2000-sekarang	Seluruh Indonesia	Nasabah BPR dengan kegiatan usaha produktif, bersifat massal dan seragam, bergerak di sektor perdagangan	Masih berjalan	Relatif tidak ada masalah	Sangat berpotensi untuk dikembangkan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
6.3	Program Kemitraan dengan cara : -Commercial Forward Linkage -Commercial Backward Linkage	Penyediaan kredit modal kerja untuk usaha komersial / perdagangan	Bank Niaga (Desk UKM)	Tahun 2000-sekarang	Seluruh Indonesia	Pengusaha kecil dengan kegiatan usaha produktif, bersifat massal dan seragam, bergerak di sektor perdagangan	Masih berjalan	Relatif tidak ada masalah	Sangat berpotensi untuk dikembangkan
7. Bank Rakyat Indonesia (BRI)									
7.1	Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)	Penyediaan kredit melalui: - Kupedes Investasi - Kupedes Modal Kerja - Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap)	BRI (BRI Unit)	Tahun 1984-sekarang	Seluruh Indonesia	Masyarakat pedesaan, meliputi: pengusaha kecil, usaha rumah tangga dan golbertap yang memerlukan tambahan pembiayaan sampai dengan Rp 50 juta.	Masih berjalan	- Tergantung pada ketersediaan infrastruktur wilayah, seperti jalan, pasar, sarana kendaraan umum - Karakter sebagian anggota masyarakat kurang baik	- Potensinya sangat baik. BRI merencanakan membuka 100 unit baru per tahun - Berpotensi menguatkan usaha mikro karena 80% nasabah adalah usaha mikro - Berpotensi meningkatkan ekonomi perempuan karena 30-45% nasabah adalah perempuan.
7.2	Simpanan Pedesaan (Simpedes)	Memobilisasi dana masyarakat lewat Simpedes	BRI (BRI Unit)	Tahun 1984-sekarang	Seluruh Indonesia	Seluruh anggota masyarakat pedesaan	Masih berjalan	Tergantung dari tersedianya infrastruktur wilayah, seperti jalan, pasar, sarana kendaraan umum	Potensi terhadap penguatan usaha mikro sangat besar karena hampir semua dana yang disalurkan Kupedes berasal dari Simpedes

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
7.3	Kredit Mitra	Penyediaan kredit modal kerja	BRI	Tahun 2002-sekarang	Seluruh Indonesia	UKM yang mempunyai hubungan bisnis dengan mitra BRI (pengusaha besar) yang memerlukan tambahan modal kerja s/d Rp 500 juta.	Masih berjalan	Kelayakan usaha dari usaha kecil maupun perusahaan yang menjadi mitra	-Adanya dukungan pemerintah untuk lebih mengembangkan UKM. -Jumlah UKM di Indonesia yang semakin bertambah banyak.
7.4	Kredit CandaKulak	- Mnyediakan kredit untuk usaha produktif - Menerima simpanan berupa simpanan wajib dan simpanan sukarela/ tabanas Bank Kredit Desa (BKD.)	BRI dan Bank Kredit Desa (BKD)	Tahun 1897-sekarang	Jawa dan Madura	Masyarakat kecil di pedesaan yang memiliki usaha	Masih berjalan	- Kurangnya modal - Legalitas usaha dari lembaga belum jelas - Kredit macet karena pengaruh program pemerintah yang bersifat hibah - Pemberian bantuan permodalan terbentur aturan tentang kehati-hatian bank.	Potensi sangat baik: - Banyak daerah meminta didirikan BKD, tetapi terbentuk masalah legalitas - Diperkirakan sekitar 60-70% peminjam adalah kaum perempuan
7.5	Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K)	- Identifikasi penduduk di bawah garis kemiskinan - Membantu pembentukan kelompok swadaya (KPK) - Mengembangkan ketrampilan untuk meningkatkan pendapatan serta identifikasi peluang usaha, khususnya bagi kaum perempuan - Membantu kelompok swadaya menyusun rencana usaha - Menyediakan akses pada fasilitas tabungan dan kredit - Menyediakan bimbingan, pelatihan dan dukungan sesuai perkembangan kelompok	BRI	Fase I : 1979-1985 Fase II: 1989-1998 Fase III: 1998-2005	12 provinsi, 122 kabupaten	Keluarga miskin di pedesaan	Masih berjalan (P4K Tahap III, 1998-2005)		- Tingkat pengembalian kredit sangat baik dan memenuhi kelayakan bank - Mendorong keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dengan kekuatan sendiri - Memberi contoh empirik bagaimana membangun sistem dan mekanisme partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan di pedesaan

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
7.6	Kredit Program: Kredit Ketahanan Pangan (KKP)	Penyediaan kredit modal kerja dan investasi	BRI	Tahun 2001-sekarang	Seluruh Indonesia	Petani, peternak, dan koperasi dalam rangka pengadaan pangan	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak kelompok tani dan koperasi masih menunggak kredit program sebelumnya - Masalah monitoring. - Karakter masyarakat yang menganggap kredit program dari pemerintah tidak perlu dikembalikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi besar karena sebagian besar penduduk adalah petani. - Pengembangan melalui pola kemitraan dan konvensional kepada nasabah potensial.
7.7	Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan kredit modal kerja. - Pembinaan usaha (manajerial, produksi, pemasaran). - Pelatihan, pemasaran kepada UKMK 	BRI	Tahun 1996-sekarang	Seluruh Indonesia	Golongan ekonomi lemah khususnya usaha mikro yang belum mampu mengakses kredit perbankan	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Prospek usaha dari mitra binaan (kelayakan usaha) - BUMN yang membina terkonsentrasi di wilayah binaan yang sama 	Potensi terbatas karena tergantung alokasi keuntungan yang diperoleh

**Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat tahun 1997-2003
Kelompok Lembaga Internasional**

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
1. Asian Development Bank (ADB)									
1.1	Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) / Rural Income Generating Project (RIGP) Phase III	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kelompok target - Membantu pembentukan <i>self-help group</i> (SHG) - Penyediaan pendidikan dan pelatihan - Membantu SHG memformulasikan dan mempresentasikan rencana usaha - Menyediakan akses ke fasilitas tabungan dan kredit - Menyediakan <i>ongoing advice</i>, pelatihan dan dukungan sejalan 	ADB dan BRI	Tahap III: Juli 1998-September 2005 (Tahap I: 1979 - 1985; Tahap II: 1989-1998)	12 provinsi, 122 kabupaten	Masyarakat yang tinggal di bawah garis kemiskinan.	Masih berjalan		
1.2	Technical Assistance for the Rural Income Generation Project Phase III / TA 2634	<ul style="list-style-type: none"> - Memobilisasi pembentukan dan perkuatan SHG - Mendorong mobilisasi tabungan anggota SHG. - Menyediakan dukungan keuangan dan kelembagaan untuk kegiatan penciptaan pendapatan. - Memperkuat perantara informal untuk melengkapi lembaga keuangan formal dalam memenuhi kebutuhan kredit masyarakat berpenghasilan rendah dan peminjam tanpa agunan di daerah terpencil. 	ADB dan Departemen Pertanian	Tahun 1997/1998 (selama 4.5 bulan, sebelum pelaksanaan P4K tahap III)	15 propinsi	Kelompok miskin, dengan prioritas di desa IDT.	Selesai		
1.3	Micro Credit Program (MCP) –Program Kredit Mikro (PKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kredit - Memperkuat lembaga keuangan - Memperkuat NGO - Memperkuat kemampuan BI dalam implementasi dan monitoring - Pelatihan - Konsultasi 	ADB, Bank Indonesia, BPD, BPR, NGO dan LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan)	21 Juli 1995-Desember 2001	15 propinsi	Penduduk miskin terutama perempuan, di desa non-IDT dan tidak memiliki akses pada lembaga kredit	Di tingkat pusat program sudah selesai, tetapi di daerah masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> -Tingkat suku bunga yang tinggi menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi BPR untuk mengambil kredit - Kriteria peserta LKM terlalu sederhana sehingga memperbesar resiko dalam penyaluran dana 	

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
1.4	Community Empowerment for Rural Development Project (CERD)	- Pemberian modal - Pelatihan - Pemasaran - Mengembangkan institusi keuangan pedesaan - Monitoring program	ADB dan Depdagri , Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	Tahun 1999 -	6 provinsi	- Keluarga miskin (khususnya perempuan) - Usaha mikro - Usaha kecil	Masih berjalan		
1.5	Technical Assistance to The Republic of Indonesia for Preparing The Development of Rural Urban Linkage Project / TA 3088 INO	- Pemberian modal (kredit mikro) - Pembangunan infrastruktur pedesaan - Kajian kebijakan	ADB dan Depdagri , Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	Mei 1999- November 1999	6 provinsi di Indonesia Timur	750 desa miskin	Selesai		
1.6	ADB SME Development Technical Assistance No. 3417 – INO	- Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator usaha - Peningkatan efisiensi pasar <i>Business Development Service</i> (BDS) - Peningkatan akses usaha kecil ke kredit komersial	ADB-TA, Consortium of GFA Management dan Swisscontact Services for Asian Development Bank	Februari 2001- 2004	Sulsel (Parepare, Bulukumba), Jateng (Pati, Sragen)	- Pemerintah - Penyedia BDS - UKM	Sebagian kegiatan masih berjalan		
2. The Asia Foundation									
2.1	Konferensi Nasional (KONAS) III	- Konferensi/rapat bidang - Pameran - Temu bisnis	The Asia Foundation , Forum Daerah (Forda) UKM Yogyakarta, Swisscontact, Mitra Ventura Indonesia	29-30 Agustus 2000	Yogyakarta	- LSM yang tertarik pada advokasi usaha; - UKM anggota Forum Daerah	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
2.2	Surveys of Barriers on Trade / Investment in Central Java	- Survey - Seminar - Workshop Regional - Kebijakan advokasi	The Asia Foundation, Center for Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED)	2000-2001	Jawa Tengah (Kota Semarang, Kabupaten Salatiga)		Selesai		
2.3	Surveys of Barriers on Trade / Investment in West Kalimantan and Border near Serawak	- Survey - Seminar - Workshop Regional - Kebijakan advokasi	The Asia Foundation, Center for Agricultural Policy Studies (CAPS), CESS, Forum Daerah Kalbar	2000-2001	Kalimantan Barat, Perbatasan Serawak		Selesai		
3. Australian Agency for International Development (AusAID)									
3.1	Community Development Program through Bee-Raising Activities	- Pelatihan dan alih pengetahuan - Pembentukan kelompok petani - Penyediaan dana bergulir dalam bentuk koloni lebah	AusAID dan Yayasan Pengembangan Usaha Mandiri	-Juli 1997-Juni 1998 - Juli 1999-Juni 2000	NTB (Kab Dompu)	- LSM - Masyarakat setempat	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan		
3.2	Empowerment for Small Trader and Home Industry Activities	-Pelatihan pengelolaan usaha - Penyediaan dana bergulir	AusAID dan Fatayat NU	Juli 1997-Juni 1998	NTB	- Pedagang kecil - Industri rumah tangga	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan		
3.3	Women Income Generation through Duck Breeding	-Pendirian pusat pengembangbiakan bebek - Penyediaan dana bergulir dalam bentuk paket bebek.	AusAID dan Yayasan Bina Mandiri	Juli 1997-Juni 1998	NTT, Kupang (Kab Oenesu)	Kelompok perempuan	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan		
3.4	Local Resources Management for Income Generation	- Penyediaan modal	AusAID dan Lembaga Bina Sakti Masyarakat (LEBBMAS)	Juli 1997-Juni 1998	Sulawesi Tenggara (Kab Kendari)	- Kelompok nelayan - Kelompok perempuan peternak bebek	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.5	Income Generation for Women and Family in Kendari	-Pelatihan pengelolaan dana bergulir -Penyediaan modal	AusAID dan- Yayasan Pendidikan Muslimat NU, - Bina Bakti Perempuan Pusat	Juli 1997-Juni 1998	Sulawesi Tenggara (Kab Kendari)	Kader kelompok	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan		
3.6	Home Industry Development for Production of Coconut Oil	- Pelatihan - Penyediaan modal - Bantuan peralatan	AusAID dan Yayasan Hijau Sejahtera	Juli 1997-Juni 1998	Sulawesi Tenggara (Kab Kendari)	Kelompok perempuan	Selesai		
3.7	Women Empowerment through Productive Economy in Rinti Village	Pengembangbiakan kambing dan bebek	AusAID dan Yayasan Citra Desa	Juli 1998-Juni 1999	Aceh (Desa Rinti)	Perempuan korban operasi DOM	Selesai		
3.8	Income Generation and Productive Employment Creation	Pelatihan pemanfaatan kepompong liar dan sisa kulit ikan	AusAID dan Yayasan Dian Desa, Yogyakarta	Juli 1998-Juni 1999	Jawa	1100 rumah tangga	Selesai		
3.9	Silk Worm Farming in Banyumas	Pelatihan bagi peternak ulat sutera	AusAID dan Yayasan Sosial Bina Sejahtera	Juli 1998-Juni 1999	Jawa Tengah (Kab Banyumas)	Peternak ulat sutera	Selesai		
3.1	Women Capability Strengthening through Small Scale Economic Activity		AusAID dan Yayasan Karya Mandiri	Juli 1998-Juni 1999	Jawa Timur (Kab Pacitan)	Perempuan			
3.11	Community-Based Agribusiness Development	Pelatihan dalam mengembangkan kegiatan agribisnis	AusAID dan Yayasan Pakta	Juli 1999-Juni 2000	NTT (Kab Sumba Barat)	- LSM - Masyarakat	Selesai		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
3.12	Improvement of Hand Woven Production	- Pelatihan - Pembentukan skema simpan pinjam bagi industri tenunan tangan	AusAID dan Yayasan Tunas Jaya	Juli 1999-Juni 2000	NTT (Kab Ruteng)	Pengrajin tenunan tangan	Selesai		
3.13	Strengthening Basic Economic Structure to Alleviate Poverty	Penyediaan modal awal bagi usaha kecil	AusAID dan Yayasan Duta Bina Bhuna	Juli 1999-Juni 2000	Kupang, Sumba Barat, Ujung Pandang	LSM lokal	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan		
3.14	Integrated Agriculture	- Pelatihan teknik pertanian - Pengembangbiakan ternak dengan sistem bergulir	AusAID dan Yayasan Ayo Indonesia	Juli 1999-Juni 2000	NTT	Petani	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan		
3.15	Income Generating	Penyediaan kredit mikro secara bergulir.	AusAID dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Kesuma	Juli 1999-Juni 2000	Jakarta Barat	Masyarakat miskin kota Jakarta Barat	Selesai, tetapi di tingkat masyarakat mungkin masih berjalan		
3.16	Sustainable Income Generating	Budidaya tanaman murbai dan pengembangbiakan ulat sutra	AusAID dan Yayasan Dian Desa	Juli 2001-Juni 2002	Maumere, NTT	- Petani - Peternak	Selesai		
3.17	Development of Wamena Office as Micro Credit Institution	Bantuan sarana	AusAID dan Bina Swadaya	Juli 2001-Juni 2002	- Jayapura, - Jayawijaya - Papua	LKM	Selesai		
3.18	Economic Improvement for Traditional Fishermen	-Penyediaan peralatan - Penyediaan bantuan teknis termasuk pemasaran	AusAID dan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP)	Juli 2001-Juni 2002	Sulawesi Utara (Kota Manado)	Nelayan tradisional	Selesai		
3.19	Goat Breeding	Perbaikan pengembangbiakan ternak kambing	AusAID dan Yayasan Sambangdiri	Juli 2001-Juni 2002	Jawa Timur	Peternak kambing	Selesai		

4. Bank Dunia

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
4.1	Kecamatan Development Project (KDP) / Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	- Penyediaan modal usaha produktif - Pembangunan sarana penunjang perekonomian desa	Bank Dunia dan Depdagri , Ditjen PMD, Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.	Tahun 1998-2006	22 propinsi	Penduduk miskin di kecamatan dengan jumlah desa tertinggal serta jumlah penduduk miskin yang relatif banyak	Masih berjalan	- Pengembalian pinjaman kurang lancar - Mekanisme kurang transparan - Terjadi penyalahgunaan uang pinjaman - Kurangnya komitmen Pemda dalam memberdayakan masyarakat	
4.2	Sulawesi Agriculture Area Development Project (SAADP)	- pengembangan sistem usaha tani - pengaduan ternak - pengembangan usaha ekonomi produktif - pembangunan prasarana	Bank Dunia dan Depdagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Tahun 1999-2003	2 provinsi: Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara (seluruh kabupaten)	- petani - peternak - pelaku ekonomi produktif lainnya: pedagang kecil, pengrajin, dll	Selesai	- Pengembalian pinjaman tersendat, terutama dari petani	Potensi program ini cukup besar dalam membantu kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.
4.3	Nusa Tenggara Agriculture Area Development Project (NTAADP)	- pemberian pinjaman modal kerja - analisa kemiskinan - pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat miskin - pemberian akses informasi - pemberian bantuan teknis dan strategi pemasaran	Bank Dunia dan Depdagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Tahun 1996-September 2003	2 provinsi: NTT dan NTB (seluruh kabupaten)	- petani - peternak - pelaku ekonomi produktif lainnya: pedagang kecil, pengrajin, dll - anggota kelompok IDT (Pokmas): masyarakat miskin dan termiskin	Selesai	- Pembinaan di tingkat pokmas belum optimal - Kondisi UPKD di lapangan masih rapuh - Pengembalian pinjaman tersendat, terutama dari petani - Rendahnya serapan dana karena sering terjadi pergantian LSM pendamping	Program ini cukup diminati masyarakat setempat karena suku bunga yang dianggap ringan, yaitu 15% per tahun, serta tidak mensyaratkan agunan.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
4.4	Bengkulu Regional Development Project	- pemberian pinjaman modal kerja - analisa kemiskinan - pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat miskin - pemberian akses informasi - pemberian bantuan teknis dan strategi pemasaran -pembangunan infrastruktur pedesaan	Bank Dunia dan Depdagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Tahun 1998-2004	Bengkulu (Seluruh kabupaten kecuali Kota Bengkulu)	- petani - peternak - pelaku ekonomi produktif lainnya: pedagang kecil, pengrajin, dll	Masih berjalan		
5. The European Union									
5.1	Small and Micro Scale Enterprise Development in West Java	- bantuan teknis - pelatihan - membuat model usaha kecil - seminar, penelitian - Fasilitasi pertemuan antar pengusaha kecil - pelayanan informasi - konsultasi	European Union , FNS dan PUPUK	Desember 1998- Juni 2004	Jawa Barat (3 kecamatan)	Pengusaha mikro dan kecil khususnya yang bergerak di 4 sektor yaitu: agrobisnis, tekstil, kertas dan logam	Masih berjalan		
5.2	Community Based Economic Development	- Pelatihan - Penyediaan dukungan pasar - Penelitian - Penyaluran dana bergulir - Monitoring - Bantuan sarana - Analisa keuangan - Menghubungkan pengusaha kecil, menengah dan besar - Seminar	European Union , Evangelische Zentralstelle fuer Entwicklungshilfe E.V dan Yayasan Daya Pertiwi	2002-2005	Timor Barat dan Bali	Usaha kecil dan menengah	Masih berjalan		
5.3	Small Scale Enterprise Development	- pelatihan manajemen dan tehnik produksi - konsultasi - menghubungkan pengusaha mikro-kecil dengan bank - mendirikan pusat pengembangan dan kegiatan pendukung UKM di Indonesia Timur	European Union , NCOS (Belgium)- Yayasan Daya Pertiwi (Jawa Timur)	1998- Oktober 2001	- Jawa Timur (2 kabupaten) - Bali (6 kabupaten)	Usaha mikro, kecil dan menengah	Selesai		
6. ILO									

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
6.1	Expansion of Employment Opportunities for Women (Proyek Perluasan Kesempatan Kerja untuk Perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan lapangan pekerjaan - Penyaluran dana bergulir - Pembentukan koperasi - Pelatihan <i>capacity building</i> - advokasi 	ILO bekerjasama dengan NGO lokal	1998-2001	5 provinsi: Sumatra Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan miskin kepala rumah tangga - Perempuan pekerja sektor informal di desa/kota - Perempuan pekerja sektor formal di kota 	Selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlangsungan proyek kurang terjamin karena keterbatasan pengetahuan NGO mitra dan kemampuan penerima manfaat - Terjadi kesalahan targeting 	
6.2	Children in Jermal Fishing Platform (Pekerja Anak di Jermal)	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan dokumentasi - Pemantauan pekerja anak - Pengembangan kapasitas - Peningkatan wawasan - Penciptaan pendapatan 	ILO bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Sumatra Utara	Mulai Desember 1999	Sumatra Utara, (Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu dan Simalungun)	Para pekerja anak di jermal	Masih berjalan		Melalui program ini diharapkan jermal akan terbebas dari pekerja anak pada akhir fase kedua tahun 2004
7. Swisscontact									
7.1	Business Development Centre (BDC)	Mendirikan pusat pengembangan usaha (BDC) bekerjasama dengan penyedia jasa pengembangan usaha (BDS) di tingkat lokal	Swisscontact- Penyedia BDS di tingkat lokal	1997-2002	5 provinsi: Jakarta, Jabar, Jateng (Semarang, Jepara), Jatim, Sulawesi Selatan	Penyedia BDS di tingkat lokal	Selesai		
7.2	SHARE Program	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Forum Daerah - Memfasilitasi dialog kebijakan - Penelitian - Mempersiapkan Dewan Usaha Kecil di Yogyakarta dan Salatiga sejak 2002 	Swisscontact bekerja sama dengan berbagai institusi	1997-2002	Beberapa daerah di Indonesia	Para stakeholder yang terkait dengan UKM	Program ini sebenarnya telah selesai pada tahun 2002, tetapi dilanjutkan kembali tahun 2003		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
7.3	Voucher Program	Memberikan voucher - potongan harga- pada UKM untuk memanfaatkan jasa yang disediakan oleh penyedia BDS (penyediaan kartu diskon untuk mengikuti pelatihan)	Swisscontact	1999-2001	Tahun 1999: Jawa Timur, tahun 2001: Jabotabek	Para penyedia BDS dan UKM	Selesai (karena hanya dimaksudnya sebagai pilot program)	Secara kuantitatif daya serap program ini kecil	Menambah pengetahuan pengusaha kecil tentang keberadaan BDS, jenis layanan dan pihak-pihak penyelenggaranya.
7.4	Quality Improvement (Peningkatan Kualitas Penyedia BDS)	- Pelatihan - Lokakarya - Fasilitas pembentukan jaringan kerja - Jasa konsultasi	Swisscontact	Mulai tahun 2002	Jabotabek; Jawa Timur; Jawa Tengah; Sumatra dan Sulawesi	Para penyedia BDS	Masih berjalan		
7.5	The Information Platform (Sarana Pertukaran Informasi)	- Melakukan disseminasi informasi melalui berbagai media - Merancang situs www.jasakami.com	Swisscontact	Mulai tahun 2003		Para penyedia BDS dan UKM	Masih berjalan	Terbatasnya akses para pengusaha kecil dan menengah pada layanan internet, menyebabkan upaya ini tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh mereka.	
8. USAID									
8.1	Pengembangan Kelembagaan BRI Unit Desa	- Pelatihan - Penelitian	USAID dan BRI	Juli 2002-Juli 2003		Personil BRI Unit Desa	Selesai		
8.2	Dukungan pada UKM dalam mengakses kredit dan layanan berusaha	- Penelitian - Membentuk forum regional UKM - Advokasi kebijakan	USAID dan The Asia Foundation	Juli 1997-Juli 2004		- UKM - BPR	Masih berjalan		

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
8.3	SAMBA (Silk and Micro-enterprise Development in Bandung Raya)	Mengembangkan pasar jasa keuangan dan non-keuangan	USAID dan Universitas Bandung Raya	Januari 2002- Januari 2004.	- Bandung - Sumedang - Cianjur - Sukabumi - Garut - Tasikmalaya - Kuningan - Majalengka	Pengusaha mikro dan menengah sektor industri sutera	Masih berjalan		
8.4	The Maluku Economic Opportunity	- Pembangunan kapasitas LSM mitra lokal - Penyaluran kredit mikro - Pengumpulan informasi tentang efektifitas bantuan	USAID dan Mercy Corps International	April 2003- Maret 2004	Maluku	Masyarakat korban konflik Maluku	Masih berjalan		

**Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro/Kecil di Tingkat Pusat Tahun 1997 - 2003
Kelompok Lembaga Lain**

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
1. GEMA PKM Indonesia									
1.1	Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (Gema PKM Indonesia)	Mendorong dan berpartisipasi aktif dalam: - perumusan kebijakan nasional keuangan mikro (KM) - pembentukan sistem pendukung KM - kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan KM - peningkatan kapasitas pengembangan KM - Pengumpulan data dan monitoring perkembangan KM	Sekretariat Gema PKM Indonesia	Tahun 2000 – sekarang	Seluruh Indonesia	Keluarga miskin yang mempunyai usaha mikro terutama wanita	Masih berjalan	- Minimnya dana operasional - Minimnya tenaga tetap untuk mengelola pelaksanaan program - Belum adanya kebijakan nasional di bidang KM. - Belum adanya pemahaman bersama tentang kredit mikro. - Belum adanya regulatory framework untuk KM	- Memotivasi stakeholders untuk menyediakan kredit mikro yang mudah diakses usaha mikro/ kecil sehingga mereka dapat berkembang dan menjadi instrumen yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. - Sebagai forum belajar bersama di antara para stakeholders tentang keuangan mikro dan problematikanya
2. IWAPI									
2.1	Pemberdayaan dan penguatan perempuan pengusaha kecil dan menengah	- Advokasi - Pelatihan - Membangun jaringan kerja	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Tahun 1975 – sekarang	Seluruh provinsi di Indonesia	Seluruh wanita pengusaha kecil (termasuk mikro) dan menengah. Khusus kursus dapat diikuti oleh anggota, masyarakat luas, laki-laki dan perempuan, baik yang memiliki usaha maupun belum.	Masih berjalan	Minimnya sumberdaya manusia yang tersedia	- Memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan pengusaha UKM, - Pusat Pendidikan mampu mendorong orang untuk mengembangkan usaha dan mendirikan usaha baru yang menyerap tenaga kerja

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
2.2	Proyek Pelaksanaan <i>Private Enterprise Participation (PEP)</i>	- Memprakarsai dan melakukan desentralisasi (<i>franchising</i>) Pusat Pendidikan IWAPI ke cabang IWAPI tingkat provinsi - Lokakarya - Bantuan teknis (pelatihan, pembinaan, monitoring, peningkatan akses terhadap dana) - Memprakarsai <i>credit circle</i>	CIDA, IWAPI dan Kadinda	Tahun 1997 - sekarang	5 provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Bali)	Usaha kecil atau perorangan perempuan (termasuk mikro) yang dikelompokkan atas dasar lokasi atau spesialisasi usaha	Masih berjalan	- Fasilitator IWAPI tidak menerima gaji sehingga hanya yang memiliki integritas tinggi yang mampu bertahan - Minimnya SDM yang tersedia untuk melakukan monitoring pada setiap kluster	- Memperkuat UKM sehingga meningkatkan kesempatan kerja - Meningkatkan akses UKM terhadap lembaga dana - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas BDS (IWAPI & Kadinda) dalam melayani kebutuhan UKM
2.3	PEP-IWAPI- <i>Manulife Micro Credit Program</i>	Pemberian pinjaman modal usaha (<i>credit circle</i>)	PEP, IWAPI, dan Manulife	Tahun 2001 - sekarang	3 provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur)	Usaha kecil perempuan (termasuk mikro) yang dikelompokkan dalam kluster dan dibina melalui proyek PEP	Masih berjalan	- Fasilitator IWAPI tidak menerima gaji sehingga hanya yang memiliki integritas tinggi yang mampu bertahan - Minimnya SDM yang tersedia untuk melakukan monitoring pada setiap kluster - Ada anggota yang menunda angsuran	Usaha kecil yang bermitra dapat berkembang dengan baik
3. Koperasi Annisa Muslimat NU									
3.1	Usaha Simpan Pinjam Koperasi Annisa Muslimat NU	Pemberian pinjaman (melalui kegiatan simpan pinjam)	Koperasi Annisa Muslimat NU beserta cabang-cabangnya di tingkat kabupaten	Tahun 1998 - sekarang	4 provinsi, 40 kabupaten/kota (Jawa Timur - 36, Sumatera Barat -1, Sulawesi Selatan -2, Lampung -1)	Semua anggota Muslimat NU (semua perempuan) yang menjadi anggota koperasi Annisa, baik memiliki usaha maupun tidak	Masih berjalan	- Kelemahan komunikasi tertulis dari kader - Kurangnya dana sehingga banyak anggota yang belum mendapat pinjaman	80% anggota yang belum mendapatkan bantuan upaya sangat berminat pada upaya ini, dan merupakan potensi untuk perguliran dana.

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
4. KPEL									
4.1	Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)	-Fasilitasi pelaksanaan KPEL di daerah replikasi (a) pembentukan forum kemitraan (b) perencanaan strategi identifikasi, pemilihan dan pengembangan kluster ekonomi (c) perencanaan strategi pemberdayaan produsen dan kelompoknya - Dokumentasi dan diseminasi instrumen pendekatan KPEL	Sekretariat KPEL	Tahun 1998 - sekarang	- Wilayah pilot 6 provinsi, 19 kab; - Wilayah replikasi 9 provinsi, 32 kota/kabupaten	Pihak-pihak yang terkait dengan kluster komoditi, meliputi: - Pemerintah daerah - Produsen / pengusaha - Konsumen - Pemasok	Masih berjalan	- Di tingkat lokal kemitraan masih dipandang skeptis - Kemitraan belum sustainable/berkesinambungan - Belum adanya kebijakan nasional tentang pengembangan ekonomi lokal	- Banyak Pemda berminat mengembangkan KPEL - Metoda KPEL akan diterapkan pada pedagang informal di perkotaan. - Dukungan Pemda cukup besar utk pengembangan KPEL
5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)									
5.1	Pembinaan dan Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)	- Menggerakkan, membina, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan UP2K - Pemberian bantuan modal	TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	Tahun anggaran 1985/1986 - sekarang	Desa dan kelurahan di seluruh Indonesia	Keluarga yang berpenghasilan rendah, baik yang sudah mempunyai kegiatan usaha maupun belum	Masih berjalan	- Kurangnya kader di desa/kelurahan yang mempunyai kemampuan menggerakkan dan memfasilitasi kegiatan UP2K-PKK - Terbatas dan belum intensifnya pelatihan teknis industri dan kerajinan - Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok di bidang usaha ekonomi	Mengembangkan kegiatan usaha rumah tangga anggota UP2K

No.	Nama Upaya	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Wilayah	Sasaran	Status saat ini	Masalah	Potensi
6. PT Ukabima									
6.1	Kredit Khusus untuk Masyarakat Miskin Tanpa Agunan (Kusuma)	- Pemberian pinjaman modal - Pemberian pelatihan	PT Ukabima bersama BPR milik dan rekanan	April 2001 - sekarang	3 provinsi , 5 kabupaten (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat)	Perempuan miskin yang memiliki usaha mikro	Masih berjalan	Secara umum tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan upaya ini. Hanya ditemukan beberapa kasus berkaitan dengan pengembalian di tingkat pelaksana dan penerima upaya	- Memberdayakan peranan perempuan prasejahtera di wilayah sedang berkembang - Upaya ini dan upaya kredit komersial dapat mencapai 300.000 klien (60% perempuan) thn 2006 - Menjadi <i>intermediary</i> yang paling bertanggung jawab secara sosial dalam perkreditan rakyat.